

Vol. 5, No. 1, April 2022

ISSN 2614-766

JOURNAL OF DEVELOPMENT AND SOCIAL CHANGE

Kepala Editor:

Dr. Argyo Demartoto, M.Si.
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Tim Editor:

Prof. Dr. Mahendra Wijaya, M.S.
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret.
Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si.
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret.
Dr. Ahmad Zuber, D.E.A.
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret.
Dr. Yuyun Sunesti, M.A.
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret.
Dra. Rahesli Humsona, M.Si.
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret.
Addin Kurnia Putri, S.Sos., M.A.
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret.
Siti Kusujiarti, Ph.D.
Department of Sociology and Anthropology, Social Sciences Faculty,
Warren Wilson College, Ashville, North Carolina, United States.

Pelaksana/ Redaktur:

Addin Kurnia Putri, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Tim IT:

Rusbiyanto
Sugiyanto

Journal of Development and Social Change

Jurnal ini diterbitkan secara periodik setiap bulan April dan Oktober oleh Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Jurnal ini lahir berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Nasional ISSN Bapak Hendro Subagyo, M.Eng., dengan keputusan No.: 0005.2617187/JI.3.1/SK.ISSN/2018.01 pada tanggal 26 Januari 2018 untuk Media Cetak. Kemudian berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Nasional ISSN Bapak Hendro Subagyo, M.Eng., dengan keputusan No.: 0005.2617187/JI.3.1/SK.ISSN/2018.03 pada tanggal 14 Maret 2018 untuk Media Online. Secara umum, jurnal ini memfokuskan pada hasil penelitian. Review teori, dan metodologi, serta review buku dalam perspektif keilmuan Sosiologi, dan secara khusus terkait pokok persoalan pembangunan dan perubahan sosial dalam perspektif nasional maupun internasional. Jurnal ini terbit pertama kali pada bulan April 2018 yang dimulai dengan Edisi Vol. 1, No. 1, April 2018.

Sekretariat Redaksi:

Lab Sosio Gd. 4 Lt.3, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126
<http://jurnal.uns.ac.id/jodasc>

DAFTAR ISI

GAYA HIDUP MAHASISWA METROSEKSUAL SEBAGAI REPRESENTASI MASKULINITAS BARU (Studi Kasus pada Mahasiswa Metroseksual di Universitas Sebelas Maret) Clara Mega Utami, Argyo Demartoto	1-10
PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM KONFLIK RUANG DI PERKOTAAN (Studi Kasus Masyarakat Ketingan Baru, Surakarta) Muhammad Aminullah Thohir, Theofilus Apolinaris Suryadinata	11-24
HUBUNGAN ANTARA KEPENTINGAN EKONOMI DAN PARTISIPASI DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN KETAHANAN USAHA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL (Studi pada Pedagang di Pasar Gede Kota Surakarta) Victory Monica Christy, Ratna Devi Sakuntalawati	25-44
PENDIDIKAN ANTI-RADIKALISME DI SEKOLAH: Studi Penyelenggaraan Pendidikan SMA Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta Alif Faishal Farras, Yuyun Sunesti	45-61
KETAHANAN SOSIAL EKONOMI INDUSTRI RUMAH TANGGA GETHUK TAKE SELAMA PANDEMI COVID-19 Mitchell Giovanni Irianto Putro, Mahendra Wijaya	62-73
PENGEMBANGAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SEBAGAI DESTINASI DALAM PENERAPAN EKOWISATA KAWASAN WADUK GONDANG KARANGANYAR Hafidz Ihza Ar Raafii, Sudarsana	74-89
KESADARAN KRITIS BURUH PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA DALAM MEMPERJUANGKAN PEMENUHAN HAK MATERNITAS (Studi Kasus Buruh Perempuan Anggota FSBPI di Jakarta) Herlina, Aris Arif Mundayat	90-108
MEMBANGUN NILAI-NILAI INTEGRITAS SERTA IDENTITAS NASIONAL DILIHAT DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN Ais Fadila	109-121
PERAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR DI DESA SIRNOBOYO KABUPATEN PACITAN Mohamad Devic Pratama, Trisni Utami	122-147
KONTROL TUBUH PEREMPUAN PADA PRAKTIK SUNAT PEREMPUAN (Studi Dengan Pendekatan Relasi Kuasa Di Desa Ngemplak, Karangpandan) Setyawidi Rahayu, Sri Hilmi Pujihartati	148-180

GAYA HIDUP MAHASISWA METROSEKSUAL SEBAGAI REPRESENTASI MASKULINITAS BARU

**(Studi Kasus pada Mahasiswa Metroseksual di Universitas Sebelas
Maret)**

Clara Mega Utami¹, Argyo Demartoto²

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: claramega77@student.uns.ac.id

Abstract: *Gender is an attribute inherent in interchangeable men and women and stems from society's socio-cultural construction of femininity and masculinity. Talk about masculinity, along with the development of the era the concept has undergone many changes, one of which is characterized by the emergence of a new masculinity that perpetuates the values of hegemonic masculinity. These changes influenced the lifestyle of men who known as metrosexuals. Since the emergence of various products to support the appearance of men, they have become reluctant to express their character through a more modern lifestyle even though it is identified with women. Therefore, the purpose of this study is to explain the lifestyle of metrosexual students as a representation of new masculinity in Sebelas Maret University. This study used of Social Construction Theory by Peter L Berger and qualitative method. Sampling technique is purposive sampling. Data is collected by in-depth interviews and documentation. The validity using source triangulation. Data analysis techniques using interactive analytics models from Miles and Huberman. The result show metrosexual students lifestyle who represent a new masculinity, take care of themselves, follow trends of fashion, maintain health, visit hangout places and active on social media. The lifestyle is formed through the construction process that is influenced by the family, friends and social media. There are also inhibitory factors, in the form of consistency to maintain self-care and maintain appearance, mismatch to a product, financial problems and get toxic masculinity.*

Keywords: *Lifestyle, Metrosexual Students, Representation, New Masculinity*

Abstrak: Gender merupakan sebuah atribut yang melekat pada laki – laki serta perempuan yang dapat dipertukarkan dan berasal dari konstruksi sosial budaya masyarakat terhadap femininitas dan maskulinitas individu. Berbicara mengenai maskulinitas, seiring perkembangan zaman konsep tersebut telah banyak mengalami perubahan, ditandai dengan munculnya istilah maskulinitas baru yang meresistensi nilai-nilai maskulinitas yang hegemonik. Perubahan tersebut mempengaruhi gaya hidup kaum laki – laki yang dikenal dengan istilah metroseksual. Sejak munculnya berbagai produk untuk mendukung penampilan, mereka berani untuk mengekspresikan

diri melalui gaya hidup yang lebih modern meskipun hal tersebut diidentikan dengan perempuan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan gaya hidup mahasiswa metroseksual sebagai representasi dari maskulinitas baru di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Teori dalam penelitian menggunakan Teori Konstruksi Sosial dari Peter L Berger dengan metode penelitian kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Validitas data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk gaya hidup mahasiswa metroseksual yang merepresentasikan konsep maskulinitas baru diantaranya adalah merawat diri, mengikuti trend dunia fashion, menjaga kesehatan tubuh, mengunjungi tempat hangout dan aktif di media sosial. Gaya hidup tersebut terbentuk melalui proses konstruksi yang dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa lingkungan keluarga, pergaulan, pekerjaan serta media sosial. Selain itu ada pula faktor penghambat berupa konsistensi untuk merawat diri dan menjaga penampilan, ketidakcocokan terhadap suatu produk, masalah finansial serta mendapatkan perkataan toxic masculinity.

Kata Kunci : *Gaya Hidup, Mahasiswa Metroseksual, Representasi, Maskulinitas Baru*

PENDAHULUAN

Pada zaman dahulu dengan budaya patriarki yang masih kental, isu yang berkaitan dengan maskulinitas masih dianggap sebagai konsep yang bebas dari nilai – nilai ideal yang membatasi. Padahal sebenarnya konsep mengenai maskulinitas berasal dari konstruksi gender yang tidak pernah terbebas dari nilai – nilai sosial di masyarakat dan dapat menghambat kesetaraan dalam relasi gender. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa tidak terlalu krusial untuk membahas mengenai konsep maskulinitas daripada femininitas merupakan salah penyebab terjadinya ketimpangan dalam studi gender yang lebih terfokus pada isu – isu tentang perempuan saja.

Menelaah lebih jauh mengenai konsep maskulinitas atau kelelakian awalnya berasal definisi sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada laki – laki. Maskulinitas mengarahkan bagaimana laki – laki harus berperilaku, berpakaian, berpenampilan serta sikap dan kualitas apa yang harus dimiliki oleh laki – laki, misalnya macho, kuat, tegas, dominan dan lain sebagainya. Atribut tersebut sering kali dianggap sebagai sesuatu yang sudah menjadi kodrat dan melekat pada diri laki – laki. Padahal sebenarnya baik laki – laki maupun perempuan pasti memiliki sisi maskulin sekaligus feminin (Bashin, 2004).

Perkembangan budaya populer cenderung memberikan penawaran laki – laki untuk sejenak keluar dari norma maskulinitas yang hegemonik. Maskulinitas ideal yang dikenalkan dalam banyak budaya populer diasosiasikan dengan pengagungan bentuk fisik, aktivitas laki-laki yang dianggap *macho* serta adanya norma kelelakian yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kesopanan (Budiastuti & Nur, 2014).

Perkembangan kebudayaan tersebut salah satunya ditandai dengan kemunculan berbagai macam iklan yang ditampilkan oleh media. Melalui media konsep maskulinitas baru diperlihatkan dalam iklan – iklan kosmetik dengan tokoh laki-laki yang memiliki nilai femininitas tanpa menghilangkan sisi maskulinnya. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang memiliki nilai-nilai maskulinitas baru tersebut meresistensi nilai-nilai maskulinitas yang hegemonik yang membuat perempuan menjadi ter subordinasi (Fathinah et al, 2017). Kemudian konsep maskulinitas pada laki – laki saat ini juga bisa terpengaruh dari industri musik misalnya boyband Korea. Dahulu maskulinitas cenderung diidentikkan dengan kejantanan, atletis, kuat, berani, serta tidak peduli dengan penampilan. Namun saat ini konsep tersebut mulai tergantikan dengan maskulinitas yang diistilahkan sebagai “*new man*” yakni kombinasi antara kelembutan anak laki – laki (*boyish softness*) dengan maskulinitas asertif yang cenderung bersikap terbuka, jujur dan penuh percaya diri (Hanana et al, 2018).

Bentuk dari konsep maskulinitas baru tersebut salah satunya direpresentasikan pada gaya hidup laki – laki metroseksual. Konsep metroseksual berasal dari perpaduan dua kata yakni metropolitan dan heteroseksual. Istilah metroseksual pertamakali dikemukakan oleh Mark Simpson pada tahun 1994. Menurutnya metroseksual adalah definisi yang ditujukan kepada laki – laki yang hidup pada masyarakat post industri dan kapitalis. Menurut Kertajaya (2004) laki – laki metroseksual adalah mereka yang hidup di kota besar, mempunyai banyak uang serta memiliki gaya hidup hedon. Laki – laki metroseksual cenderung gemar berbelanja untuk kepuasan pribadi demi menunjang penampilannya. Umumnya laki – laki tipe ini sangat *brand minded* dalam hal memilih barang – barang yang akan mereka beli maupun perawatan tubuh yang mereka lakukan.

Perlu diketahui bahwa salah satu ciri dari laki – laki metroseksual adalah mereka yang sangat *aware* terhadap fashion dan produk – produk perawatan tubuh demi menunjang penampilannya. Survey yang telah dilakukan oleh Alexander Fury jurnalis fashion dari *Independent*, salah satu majalah fashion di Inggris yang dikutip oleh tirto.id mengungkapkan bahwa, setidaknya di tahun 2016 pendapatan dari industri kecantikan pria yang diakumulasi secara global mencapai 19,7 miliar dollar dan diprediksi akan meningkat hingga 27,76 miliar dollar pada tahun 2023. Selanjutnya menurut Fung Global Retail Tech, di kawasan Asia Pasifik negara Korea Selatan menduduki urutan pertama dalam industri kecantikan untuk pria. Disana rata – rata setiap tahunnya para pria mengeluarkan biaya 39 dollar untuk melakukan perawatan pada tubuhnya.

Demi mengikuti tren yang sedang berkembang, para laki – laki metroseksual berusaha memperbaiki citra dirinya dengan melakukan hal – hal feminin yang biasanya diidentikkan dengan kaum perempuan seperti melakukan *treatmen* pada wajah dan tubuh, memakai aksesoris, hingga melakukan operasi plastik untuk kepuasan pribadi. Dengan tindakan tersebut pada kenyataannya kehidupan laki – laki metroseksual tidak selamanya berjalan dengan sempurna. Mereka juga kerap mendapatkan stereotipe negatif dari masyarakat karena dianggap menyerupai kaum perempuan yang gemar

bersolek. Stereotipe tersebut masih dilanggengkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang menganut sistem budaya patriarki.

Di Indonesia sendiri laki – laki metroseksual tersebar di kota – kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Surabaya, Surakarta dan lain sebagainya dimana di kota – kota tersebut akses terhadap fasilitas dalam mendukung penampilan mereka seperti pusat perbelanjaan, klinik perawatan tubuh mudah untuk ditemukan. Oleh karena kemudahan akses tersebut mulai banyak laki – laki yang berusaha untuk memperbaiki citra diri mereka agar mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sekitar.

Berfokus pada Kota Surakarta dan merupakan salah satu kota kecil di Jawa Tengah dengan fasilitas layanan publik yang cukup lengkap seperti *mall*, *café*, klinik kecantikan, hingga pusat – pusat kebugaran mendorong munculnya gaya hidup metroseksual di kalangan laki – laki yang tinggal di daerah tersebut. Salah satu yang terpengaruh adalah di kalangan mahasiswa. Kehidupan mahasiswa yang masih tergolong sebagai masa peralihan dari remaja menuju dewasa membuat mereka mulai mencari jati diri, salah satunya dengan melakukan transformasi terhadap penampilan mereka agar lebih menarik dan menjadi pusat perhatian.

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji representasi konsep maskulinitas baru melalui gaya hidup mahasiswa metroseksual di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Di dalam proses representasi terdapat berlangsung tahap konstruksi terkait maskulinitas baru yang meliputi eksternalisasi yakni proses adaptasi dengan dunia sosio-kultural sebagai bagian dari produk manusia. Selanjutnya proses objektivasi melalui interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang mengalami institusionalisasi Terakhir adalah proses internalisasi dimana individu mengidentifikasi dirinya di dalam Lembaga atau organisasi sosial dimana individu tersebut menjadi bagian di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang ada pada kesadaran manusia (Bagus, 2002). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti sudah menentukan kriteria informan yang akan diteliti yakni mahasiswa aktif UNS berjenis kelamin laki - laki yang gemar merawat diri dan sangat memperhatikan penampilan. Pengambilan sampel berjumlah 11 informan dari beberapa fakultas. Pengambilan data menggunakan data primer berupa wawancara langsung dengan informan kemudian data sekunder berupa dokumen – dokumen pendukung penelitian. serta validitas data menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Gaya Hidup Mahasiswa Metroseksual sebagai Representasi Maskulinitas Baru.

Gaya hidup metroseksual merupakan salah satu dampak dari adanya pengaruh perkembangan zaman ke arah yang lebih modern yang juga tercermin pada gaya hidup anak muda zaman sekarang, salah satunya di kalangan mahasiswa metroseksual yang sangat memperhatikan penampilan diri. Oleh karena usia yang masih remaja serta berada dalam proses pencarian jati diri, membuat mereka mencoba untuk melakukan eksplorasi dalam gaya hidup berpenampilan demi mendapatkan kepuasan untuk dirinya sendiri. Bentuk gaya hidup yang diekspresikan oleh mahasiswa metroseksual diantaranya adalah,

a. Merawat diri

Jenis perawatan yang dilakukan oleh laki – laki tidak jauh berbeda dengan perempuan seperti menggunakan produk – produk *skincare*, *bodycare*, *haircare* maupun perawatan di klinik – klinik kecantikan. Perawatan tubuh dilakukan oleh para informan setiap harinya. Biasanya mereka melakukan setiap dua kali dalam sehari yakni saat pagi dan malam sebelum tidur.

b. Mengikuti Perkembangan *Trend* Fashion

Fashion menjadi salah satu cara individu dalam mengekspresikan dirinya di depan orang banyak. Fashion dapat mencakup berbagai jenis pakaian, celana, tas, sepatu dan lain sebagainya. Dalam membeli produk – produk fashion tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya *brand – brand* baik local maupun internasional. Beberapa informan menjelaskan bahwa mereka lebih memilih untuk membeli dari *brand – brand* local dan terkadang tidak terlalu memandang suatu *brand* tertentu. Sebab hal terpenting adalah ketika menggunakan produk tersebut, mereka merasa cocok dan nyaman.

c. Menjaga Kesehatan Tubuh

Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijaga. Ada berbagai macam cara untuk menjaga agar tubuh tetap fit dan bugar salah satunya melalui olahraga. Selain itu tujuan dari olahraga yang mereka lakukan adalah membentuk postur tubuh ideal sesuai dengan keinginan mereka. Beberapa olahraga yang sering dilakukan oleh para informan diantaranya adalah jogging, berenang, basket, *ngegym*, *push up*, *skipping*, maupun angkat beban yang dilakukan secara mandiri di rumah dengan membeli alat – alat pendukung seperti *dumble* dan tali untuk *skipping* atau lompat tali.

d. Mengunjungi Tempat *Hangout*

Sebagai seorang generasi *millennial* tentunya para informan tidak merasa asing dengan adanya tempat – tempat *hangout* kekinian yang sedang *booming*, seperti *coffe shop*, *café – café* kekinian maupun *mall*. Sebelum pandemi para informan biasanya mengunjungi tempat – tempat tersebut bersama teman – teman mereka untuk sekadar nongkrong dan *merefresh* pikiran dari padatnya jadwal kuliah.

e. Aktif Di Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu *platform* yang tidak dapat dipisahkan dari generasi millenial tak terkecuali pada mahasiswa dengan gaya hidup metroseksual. Mereka tidak hanya memikirkan eksistensinya dalam kehidupan sehari – hari di dunia nyata namun juga di dunia maya. Selain membagikan setiap moment yang dilakukan mereka juga berusaha untuk membentuk sebuah *personal branding* dan ciri khas masing – masing di hadapan *netizen* dunia maya. Sosial media yang paling sering diakses oleh sebagian besar informan diantaranya adalah *instagram*, *tiktok*, *twitter* serta *pinterst*.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Gaya Hidup Mahasiswa Metroseksual sebagai Representasi Maskulinitas Baru.

Ketika berbicara tentang gaya hidup setiap orang pastinya akan berbeda – beda. Ada banyak factor yang terlibat di dalamnya. Faktor tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

- Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri setiap individu. Menurut penuturan beberapa informan, faktor internal yang mendorong mereka untuk mengubah ataupun memperbaiki gaya hidup serta penampilannya adalah motivasi dari dalam diri untuk menjadi lebih baik lagi.
- Faktor eksternal menjadi aspek yang sangat berpengaruh terhadap gaya hidup dari mahasiswa metroseksual. Faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan keluarga, pertemanan, sosial media, pekerjaan, maupun untuk memberikan kesan yang baik serta menarik perhatian lawan jenis.

b. Faktor Penghambat

- Faktor internal diantaranya adalah konsistensi untuk tetap merawat diri dan menjaga penampilan, ketidakcocokan terhadap suatu produk sehingga mengharuskan untuk mencoba lagi produk – produk yang lain serta masalah finansial karena mereka belum mempunyai penghasilan tetap.
- Faktor eksternal yakni sering mendapatkan perkataan dan komentar yang menjurus ke arah *toxic masculinity* dari orang – orang sekitar. Hal tersebut membuat informan sangat merasa tidak nyaman sehingga sebagian besar dari mereka memilih untuk mengabaikan komentar negatif tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan.

3. Dampak Gaya Hidup Mahasiswa Metroseksual sebagai Representasi Maskulinitas Baru.

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tentunya akan memberikan berbagai pengaruh ataupun dampak. Tanpa disadari pula dari dampak tersebut dapat mengubah cara pandangan dari setiap individu. Begitu pun dengan gaya hidup pada mahasiswa metroseksual dimana saat ini mereka berada di zaman yang maju dan serba modern. Segala macam akses terhadap kebutuhan baik barang maupun informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Namun dibalik

kemudahan tersebut tentunya memberikan berbagai macam dampak baik positif maupun negative tergantung bagaimana cara mereka dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan tersebut.

- Dampak Positif

Berkaitan dengan dampak positif dari gaya hidup yang dijalani, sebagian informan mengungkapkan bahwa mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri. Selain itu mereka juga merasa bahwa orang – orang menjadi lebih bisa menerima dan menghargai keberadaan mereka

- Dampak Negatif

Disamping memberikan dampak yang positif, sebagian besar informan mengakui bahwa gaya hidup mereka saat ini pastinya juga menimbulkan dampak negatif contohnya adalah menjadi pribadi yang konsumtif. Perilaku konsumtif tersebut timbul karena ketidakpuasan dari dalam diri mereka untuk mendapatkan sesuatu yang belum mereka miliki. Apalagi saat ini mereka semakin dimudahkan dengan munculnya *market place* yang menyediakan berbagai macam barang untuk mendukung penampilan mereka seperti *fashion*, *skincare* dan lain sebagainya. Selain itu dampak lain yang dirasakan adalah menjadi tidak nyaman karena lawan jenis saja yang tertarik namun sesama jenis mulai terang – terangan memperlihatkan rasa suka mereka.

4. Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger

Gaya hidup mahasiswa metroseksual sebagai sebuah representasi maskulinitas baru yang sedang berkembang di Universitas Sebelas Maret saat ini dapat dikatakan sebagai hasil dari sikap, pengetahuan serta tindakan para informan yang telah terefleksikan dalam proses dialektis yakni internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi yang terjadi secara simultan . Berikut ini adalah uraian dari ketiga proses tersebut.

- a. Eksternalisasi adalah proses penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai bagian dari produk manusia. “*Society is a human product*” (Bungin, 2008). Dalam gaya hidup mahasiswa metroseksual sebagai representasi dari konsep maskulinitas baru menjadi suatu bentuk eksternalisasi tersendiri. Pada proses eksternalisasi tersebut dipengaruhi oleh *stock of knowledge* dimana individu akan memaknai dan melakukan pengekspresian diri sesuai dengan kebiasaan yang berasal dari proses sosialisasi terkait gaya hidup dan konsep maskulinitas yang mereka terima. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern para informan mulai berusaha untuk melakukan adaptasi ketika berada pada lingkungan yang baru seperti lingkungan pergaulan, pekerjaan maupun mengikuti perkembangan di media sosial. Dalam setiap lingkungan tersebut tentunya informan berinteraksi dengan individu – individu lain secara terus menerus. Pada tahap ini, peran dari individu lain juga berpengaruh terhadap informan sehingga mereka mempunyai dua realitas yakni realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif adalah ketika informan belum mengenal gaya hidup metroseksual sebagai bentuk representasi maskulinitas baru dimana seorang laki – laki yang peduli dengan penampilan

diri dan berani untuk mengekspresikan diri serta perasaan masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Selanjutnya realitas objektif dapat dilihat dari peran orang lain seperti teman bermain, rekan kerja dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kehidupan informan yang terbentuk melalui proses interaksi berupa *sharing* berbagai hal yang berkaitan dengan penampilan diri sebagai seorang laki – laki metroseksual.

- b. Objektivasi merupakan proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. “*Society is an objective reality*” (Berger dan Luckmann, 1990: 75–76). Pelembagaan ini tercipta melalui di proses pembiasaan pada aktivitas individu. Setiap tindakan yang sering mengalami pengulangan maka akan menjadi pola kebiasaan. Pada pola kebiasaan ini ada kemungkinan untuk dilakukan lagi di masa depan dengan cara yang sama ataupun memunculkan makna – makna baru yang dipahami sebagai sebuah “pengetahuan”. Proses ini menjelaskan bahwa pengetahuan tentang gaya hidup metroseksual sebagai representasi dari maskulinitas baru merupakan penyerapan pengetahuan eksternalisasi yang didasarkan pada pengalaman individu sehingga membentuk sebuah pola pengetahuan yang dapat disebarkan kepada orang lain. Sebagai sebuah pengetahuan, gaya hidup metroseksual dianggap dapat diterima oleh semua orang tetapi ada pula individu yang tidak menerima dengan gaya hidup tersebut. Dalam penelitian ini terdapat berbagai macam pengetahuan terhadap gaya hidup metroseksual sebagai representasi maskulinitas baru yang dapat dilihat dari sikap para informan yang mencerminkan gaya hidup tersebut sehingga memungkinkan untuk mempertahankan gaya hidup metroseksual dalam realitas kehidupan sehari – hari yang nantinya akan menimbulkan berbagai macam dampak.
- c. Internalisasi merupakan proses dimana individu mengidentifikasi dirinya di dalam lembaga- lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu tersebut menjadi bagian di dalamnya. “*Man is a social product*” (Berger dan Luckmann, 1990:87). Proses untuk mencapai taraf tersebut dilakukan melalui sosialisasi atau transmisi pengetahuan dari subjek – subjek lain. Ada dua jenis sosialisasi, pertama sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang didapatkan informan ketika berada di masa kanak-kanak. Kedua, sosialisasi sekunder merupakan setiap proses selanjutnya untuk masuk ke dalam aspek-aspek kehidupan baru dalam dunia objektif masyarakatnya yakni dari lingkungan yang lebih luas seperti lingkungan pergaulan dan lingkungan pekerjaan. Pada proses internalisasi terjadi penyerapan kembali nilai – nilai dari dunia objektif individu dengan menciptakan sebuah kesadaran. Bentuk kesadaran tersebut mempunyai dua kemungkinan yakni sadar bahwa perilaku yang dilakukan merupakan sesuatu yang salah atau justru sebaliknya yakni sebagai sesuatu yang tepat untuk dilakukan. Gaya hidup metroseksual sebagai sebuah kesadaran diri karena sudah diyakni dan tertanam dalam diri mereka melalui proses sosialisasi khususnya sosialisasi sekunder yang mempunyai peran sangat besar dalam membentuk identitas diri para informan agar tetap

menjadi diri sendiri dengan mendobrak stereotipe – stereotipe negatif tentang maskulinitas yang tidak sesuai dengan konstruksi sosial masyarakat di Indonesia. Kemudian gaya hidup mahasiswa metroseksual sebagai sebuah identitas danciri khas yang membedakan mereka dengan orang lain.

PENUTUP

Bentuk gaya hidup mahasiswa metroseksual yang merepresentasikan sebuah konsep maskulinitas baru diantaranya adalah melakukan perawatan diri seperti menggunakan *skincare*, *haircare* serta *bodycare*. memperhatikan dan mengikuti perkembangan dunia fashion, menjaga agar bentuk tubuh tetap ideal melalui olahraga dan diet sehat, mengunjungi tempat – tempat *hangout* serta aktif di media sosial untuk membentuk *personal branding* dan menunjukkan eksistensinya kepada orang lain. Faktor pendukung dibagi lagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa diri agar berpenampilan lebih baik dan menarik. Selanjutnya faktor eksternal adalah lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan baik di dalam kampus maupun di luar kampus, lingkungan pekerjaan serta media sosial. Faktor penghambat yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa metroseksual adalah konsistensi untuk tetap merawat diri dan menjaga penampilan, ketidakcocokan terhadap suatu produk, masalah finansial, serta mendapatkan komentar yang menjurus ke arah *toxic masculinity* dari orang – orang sekitar tentang penampilan mereka. Dampak dari representasi gaya hidup tersebut diantaranya menjadi lebih percaya diri, lebih berani untuk mengekspresikan diri sehingga lebih bisa diterima oleh orang lain serta mendapatkan penghasilan dari profesi sebagai seorang *brand ambassador*. Dampak negatifnya adalah menjadi pribadi yang konsumtif, mendapatkan komentar *toxic masculinity* dan juga merasa tidak nyaman karena disukai oleh sesama jenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, L, 2002. Kamus Filsafat . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bashin K. 2004. Exploring Masculinity, Women Unlimited. New Delhi
- Berger, Peter L & Thomas Luckman. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan oleh buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta : LP3ES
- Budiastuti, A & Nur Wulan. 2014. Konstruksi Maskulinitas Ideal Melalui Konsumsi Budaya Populer oleh Remaja Perkotaan. Jurnal Mozaik Vol 14 (1): 1-14
- Bungin, Burhan. 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fathinah, E. 2017. Maskulinitas Baru Dalam Iklan Kosmetik Korea: Etude House Dan Tonymoly. Jurnal Patanjala Vol. 9(2): 213 – 228

- Hanana A, et al. 2018. Konstruksi Maskulinitas Boyband 2PM pada Remaja Penggemar K-Pop. Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol 9(1): 59-72
- Kertajaya, Hermawan dkk. 2004. Metrosexual In Venus: Pahami Perilakunya, Bidik Hatinya, Menangkan Pasarnya. MarkPlus&Co. Jakarta
- Sukmadinata, N S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

**PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA
DALAM KONFLIK RUANG DI PERKOTAAN
(Studi Kasus Masyarakat Kertingan Baru, Surakarta)**

Muhammad Aminullah Thohir¹, Theofilus Apolinaris Suryadinata²

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
Email : thohir14@student.uns.ac.id

Abstrak : Masyarakat yang berada dalam lingkup negara memiliki berbagai hak untuk menjamin kualitas hidupnya agar sejahtera. Negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan berbagai hak kepada warga negaranya. Namun, masih banyak warga negara yang tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara sepenuhnya. Di perkotaan, kaum miskin kota merupakan kelompok yang paling rentan untuk tidak mendapatkan hak – haknya sebagai warga negara. Masyarakat yang berada di pemukiman Kertingan Baru merupakan kaum miskin kota yang belum mendapatkan haknya sebagai warga negara karena hidup di tanah sengketa. Penelitian ini berfokus bagaimana pemenuhan hak-hak sebagai warganegara dari masyarakat Kertingan Baru yang mengalami konflik perebutan ruang untuk hidup di perkotaan dengan teori Kewarganegaraan Sosial T.H. Marshall dan Konflik Ruang Henry Levebre. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui hasil wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) Konflik yang terjadi di Kertingan Baru adalah antara kelas borjuis dengan lumpen proletariat dalam memperebutkan ruang di perkotaan. (2) Kemiskinan masyarakat Kertingan Baru merupakan faktor terpenting terjadinya konflik ruang di perkotaan. (3) Hak warga Kertingan Baru tidak sepenuhnya dipenuhi oleh Negara.

Kata Kunci: Kaum Miskin Kota; Kewarganegaraan; Konflik Ruang.

Abstract : Communities within the scope of the state have various rights to ensure their quality of life in order to prosper. The state is fully responsible for providing various rights to its citizens. However, there are still many citizens who cannot get their rights as full citizens. In urban areas, the urban poor are the most vulnerable group from not getting their rights as citizens. The people in the Kertingan Baru settlement are the urban poor who have not yet received their rights as citizens because they live in disputed lands. This study focuses on how the citizenship rights of the Kertingan Baru community be fulfilled by the state in urban space conflicts. Social Citizenship theory by T.H. Marshall and Space Conflict theory by Henry Levebre are used for this research. This research method uses qualitative research with a case study approach. Sources of data obtained through interviews and literature studies. The results of this study are (1) the conflict that occurs in Kertingan Baru is between the bourgeoisie and the lumpen proletariat fighting for space in urban areas space. (2) The poverty of the Kertingan Baru community is the most important factor in the occurrence of spatial conflicts in urban areas. (3) The rights of the citizens of Kertingan Baru are not fully fulfilled by the State.

Keywords: Citizenship, Spatial Conflict, Urban Poor

PENDAHULUAN

Perubahan ruang terjadi akibat adanya konflik kepentingan antara para kapitalis (investor/pengusaha), masyarakat, dan negara. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik ruang di perkotaan. Menurut Lefebvre ruang adalah suatu produk politik bagi perubahan sosial ekonomi yang menyebabkan ruang bersifat pasif dan tidak netral (Lefebvre, 1991). Akibatnya negara sebagai pembuat kebijakan akan bersifat tidak netral dan berpihak kepada kepentingan investor atau kapitalis. Hal ini juga sesuai pemikiran Marxis, sebagai landasan Lefebvre yang dimana negara akan berpihak kepada kelas yang berkuasa yaitu kapitalis atau kelas borjuasi.

Ruang akan digunakan oleh kepentingan kelas borjuasi, akibatnya ruang masyarakat sebagai pihak lawan –dalam perspektif Marxis, masyarakat yang berada dalam kelas proletariat-, yang mereka tempati akan terancam diubah untuk kepentingan kelas borjuasi. Maka yang terjadi adanya konflik ruang antara kelas borjuasi dengan negara melawan kelas proletariat dalam memperebutkan ruang di perkotaan, yang dimana mereka memiliki kepentingan yang tidak sama atas ruang yang sedang diperebutkan.

Tidak hanya itu, kaum miskin kota sebagai mayoritas kelas proletariat di perkotaan juga rentan terhadap pelanggaran hak – haknya, karena mereka dianggap penghalang pembangunan kota yang bersifat kapitalistik. Mereka menggunakan ruang – ruang di kota, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan para kelas borjuasi, sehingga integrasi ruang adalah cara untuk menguasai ruang tersebut. Demi menguasai ruang tersebut, negara sebagai pihak yang dominan ke kelas borjuasi akan menggunakan kuasanya untuk tidak memberikan haknya kepada kelas proletariat demi memperlancar integrasi ruang. Padahal negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak – hak warga negara tanpa terkecuali. Terkhusus Negara Indonesia yang juga sesuai dengan konsep T.H. Marshall dimana negara berhak memberikan 3 hak utama yaitu hak sipil, hak politik dan hak sosial agar warga negara bisa hidup sejahtera tanpa adanya diskriminasi (Robet & Hendrik, 2017).

Di Ketingan Baru, Surakarta adalah contoh dimana kaum miskin kota memperebutkan ruang dengan para pengklaim tanah yang merupakan kelas borjuasi. Warga Ketingan Baru yang sudah menempati lahan Ketingan Baru sejak 1999, tiba-tiba di tahun 2004 didatangi oleh seorang yang mengklaim tanah Ketingan Baru adalah miliknya. Pengklaim tanah bersifat berkelompok yang dimana mereka juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Surakarta dalam perebutan ruang tersebut. Selama konflik berlangsung tidak pernah menemukan titik temu dan akhirnya di tahun 2018 menggunakan cara yang kasar melalui pengusuran masyarakat Ketingan Baru oleh pihak pengklaim tanah bersama pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini penulis tertarik ingin melihat bagaimana pemenuhan hak warga Ketingan Baru sebagai warga negara Indonesia serta kondisi ekonomi mereka yang hidup dalam konflik ruang selama bertahun-tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Lokasi penelitian berada di Ketingan Baru, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam memperoleh data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara ke warga Ketingan Baru, kuasa hukum pengklaim tanah Ketingan Baru, Pemerintah Kota Surakarta melalui, LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum warga Ketingan Baru, dan Kabar Djoeang, kelompok mahasiswa yang membantu warga Ketingan Baru selama konflik dan pasca konflik. Data primer juga dilakukan dengan observasi kampung Ketingan Baru. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari dokumen gugatan, laporan, foto yang dimiliki oleh LBH Yogyakarta dan Kabar Djoeang untuk memahami kondisi masyarakat Ketingan Baru lebih dalam. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik validitas menggunakan triangulasi data. Dan teknis analisis data melalui proses reduksi data, sajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Konflik Ruang di Kertingan Baru, Surakarta

Kampung Kertingan Baru dibatasi oleh dinding Universitas Sebelas Maret dan jalan Kyai H. Masykur sampai jalan Ki Hajar Dewantara, Kota Surakarta. Pemukiman ini langsung berhadapan dengan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) Jurug. Luas tanah Kertingan Baru yaitu 1.500 m² atau 1,5 hektar. Kertingan Baru sendiri terbagi menjadi 8 blok, blok 1 di bagian selatan sedangkan blok 8 di bagian utara. Daerah tersebut dihuni sekitar 200 KK lebih sebelum penggusuran di tahun 2018, lalu di tahun 2020 tersisa 21 KK yang masih tinggal di Kertingan Baru.

Konflik bermula ketika para relawan menagih janji politik dari Slamet Suryanto Walikota Surakarta periode 2000 - 2005 yang akan memberikan tanah bagi relawannya yang belum memiliki tanah di Kota Surakarta ketika dia menang. Pasca kemenangan para relawan yang berjumlah sekitar 200an KK menagih tanah tersebut dan akhirnya menempati tanah di Kertingan Baru atas pemberian walikota Surakarta dan menjadi warga Kertingan Baru. Namun di tahun 2004 ada pihak yang mengklaim tanah Kertingan Baru adalah miliknya dengan dasar tanah tersebut merupakan lahan tukar guling Pemerintah Kota Surakarta dengan PT. Bengawan Permai yang kemudian dibagikan kepada para pemilik saham PT. Bengawan Permai. Selama periode Slamet Suryanto, tanah tetap dimiliki oleh warga Kertingan Baru.

Di periode Joko Widodo, 2005 – 2010, para pengklaim meminta bantuan Walikota untuk menyelesaikan kasus Kertingan Baru. Di tahun 2011/2012 warga Kertingan Baru sebagian besar mau dipindahkan ke Randusari, Mojosongo atas tanah yang sudah dibeli oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan para pengklaim tanah. Namun 52 orang enggan relokasi ke Randusari dan masih memilih menetap di Kertingan Baru dengan alasan mau relokasi ketika tanah Kertingan Baru dinyatakan secara hukum adalah milik para pengklaim, dan tidak cocoknya mengenai tempat relokasi seperti luas lahan maupun lokasi tempat.

Warga yang memilih menetap di Kertingan Baru juga diancam akan digusur secara paksa, namun tidak terlaksana di tahun 2012 tersebut. Pasca relokasi Kertingan Baru ke Randusari, warga Kota Surakarta yang rumahnya digusur di daerah stasiun Jebres, pedaringan, Techno Park menetap di Kertingan Baru karena ada banyak lahan dan diterima oleh 52 warga yang masih menetap. Warga Surakarta yang pindah ke Kertingan Baru ini tidak mendapatkan relokasi, sehingga mencari lahan kosong yang sekiranya masih bisa dibangun rumah dan memilih Kertingan Baru.

Dengan kasus yang belum selesai pengklaim tanah meminta tolong lagi ke Joko Widodo yang sudah menjadi Presiden RI untuk menyelesaikan kasus Kertingan Baru. Akhirnya di tahun 2017 Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan SK untuk menertibkan Kertingan Baru yang digunakan pengklaim tanah untuk menguasai ruang Kertingan Baru. Akhirnya karena warga Kertingan Baru tidak menyerah atas ruang Kertingan Baru dan memilih menetap di Kertingan Baru sampai ada putusan pengadilan, di tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan penggusuran Kertingan Baru, yang menyisakan beberapa rumah dan 21 KK di tahun 2020.

2. Konflik Ruang di Perkotaan

Ruang akan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia. Ada yang membutuhkan ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk membangun sarana publik, bahkan ruang untuk kepentingan modal. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut konflik perebutan ruang tidak bisa terhindarkan karena tidak menemukan titik temu, antar golongan.. Bagi warga Kertingan Baru ruang yang mereka tempati merupakan aset terbesar mereka. Hal ini dibuktikan warga tetap memilih bertahan hidup disana. Walau ancaman selalu datang, mereka tetap tinggal di Kertingan Baru sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan tanah itu milik siapa.

Masyarakat kelas bawah atau proletariat yang membutuhkan ruang untuk tempat tinggal hanya bisa mencari tempat tinggal yang tak layak, bahkan tidak jarang mereka menduduki tanah tanah ilegal seperti warga Kertingan Baru.

Mereka tidak mampu untuk membeli tanah maupun rumah di perkotaan karena kondisi ekonomi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak terserap industri modern, dalam perspetif kelas mereka termasuk dalam lumpen proletariat. Hal tersebut bagi kelas atas atau kelas borjuasi dan negara dalam sistem kapitalis hanya akan menghambat tujuan mereka yaitu bagaimana mengakumulasi modal. Karena para pengklaim tanah Kertingan Baru sudah memiliki ruang untuk tempat tinggal, bahkan yang mengaku menguasai 50% tanah Kertingan Baru adalah keluarga pemilik PT. Djitoe dan perumahan Fajar Indah, Surakarta.

Dalam perspetif Marxis, negara juga akan bersikap dominan kepada pihak borjuasi dalam sistem kapitalis. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya permintaan bantuan dari pengklaim tanah Kertingan Baru melalui kuasa hukumnya untuk membantu urusan Kertingan Baru. Disini negara menunjukkan sifatnya sebagai pihak yang dominan kepada kelas borjuasi melalui pemerintah kota Surakarta saat era 2006 - 2010 justru merelokasi warga Kertingan Baru, bukannya mempertahankan ruang tersebut untuk kepentingan warga Kertingan Baru. Bahkan pemerintah kota Surakarta dan para pengklaim tanah mengeluarkan uang untuk merelokasi warga Kertingan Baru. Tidak bisa dipungkiri daerah relokasi yaitu Randusari, Mojosongo merupakan daerah yang tidak nyaman dan berdampingan dengan TPA Putri Cempo yang dimana merupakan penggunungan sampah, sedangkan Kertingan Baru merupakan tempat strategis di kota Surakarta dekat Perguruan Tinggi yang dimana masyarakat disekitar sana memiliki kesempatan untuk mendapatkan nilai ekonomi lebih daripada di Randusari dengan mendirikan tempat makan, warung atau usaha apapun yang bisa digunakan untuk kepentingan para mahasiswa. Lefebvre juga mengatakan bahwa ruang tidak akan bersifat netral dan akan berpihak kepada pihak yang dominan. Dalam kondisi kapitalistik kelas borjuasi lah yang dominan, sehingga ruang akan lebih mudah untuk digunakan untuk kepentingan kelas borjuasi dibandingkan kelas proletariat. Hal tersebut dibuktikan dengan konflik yang terjadi di Kertingan Baru.

Perubahan tata ruang dari pemukiman menjadi suatu ruang yang bersifat untuk mengakumulasi modal akan menimbulkan konflik ruang di perkotaan. Pihak borjuasi tidak akan berhenti untuk terus mengakumulasi modalnya dengan menguasai ruang-ruang yang ada di kota. Mereka mampu untuk membangun ruang seperti perumahan, mall, gedung, atau apapun yang bersifat mampu untuk mengakumulasi modal. Para pengklaim bahkan berani untuk mengeluarkan uang lebih untuk merelokasi warga Kertingan Baru di tahun 2011/2012 dan memberi uang kepada beberapa warga Kertingan Baru untuk mendapatkan ruang di Kertingan Baru yang bersifat sangat strategis. Penataan ruang yang bersifat kapitalis juga akan menggusur pemukiman-pemukiman kumuh yang sering digunakan oleh kaum miskin kota atau lumpen proletariat, termasuk warga Kertingan Baru.

3. Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Konflik Ruang di Kertingan Baru

Di dalam UUD 1945, negara Indonesia menjamin hak sosial bagi warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini senada dengan gagasan T.H. Marshall dimana hak sosial ada untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya. Kategorisasi umum yang diinisiasi oleh T.H. Marshall meliputi tiga hak, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial (Marshall, 1950). Teritorial dalam lingkup negara pun penting, dimana negara hanya bisa memberikan hak warga negaranya yang berada dalam teritorialnya termasuk.

Menurut T.H. Marshall hak sosial membuat warga negara memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum. Pemikiran Marshall ini memberikan kesimpulan bahwa kewarganegaraan itu merupakan gerakan emansipasi dalam bidang politik, hukum dan sosial-ekonomi. Jadi hal ikhwil kewarganegaraan itu menyentuh dimensi dunia usaha, ekonomi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Sehingga Marshall menyebut gerakan emansipasi kewarganegaraan dalam dimensi politik, hukum dan ekonomi ini sebagai konsep negara demokrasi, negara hukum (*rule of law*), dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) (Wahab & Sapriya, 2011). Konsep T.H. Marshall ini sangat cocok dengan dasar landasan negara Indonesia.

Namun pemenuhan hak terhadap warga negara Indonesia tidak sepenuhnya terlaksana. Kaum miskin kota adalah komunitas yang paling rentan untuk tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini terlihat dimana masyarakat Ketingan Baru yang menduduki tanah ilegal menurut pemerintah tidak mendapatkan hak – hak warga negara mereka sepenuhnya. Bahkan mereka aktif untuk menuntut hak mereka kepada pemerintah setempat dan hasilnya pun hak mereka belum sepenuhnya didapatkan oleh warga Ketingan Baru.

Alasan utama warga Ketingan Baru tidak sepenuhnya mendapatkan haknya adalah karena mereka tinggal di daerah ilegal. Mereka tidak memiliki alamat resmi atas tanah tersebut, sehingga hak – hak mereka tidak sepenuhnya diberikan. Atas dasar tersebut pemerintah Kota Surakarta melupakan bagaimana kewajibannya dalam memberikan hak – hak tersebut, khususnya hak atas perumahan dan hak atas jaminan sosial.

Negara Indonesia mengeluarkan Undang-undang tentang perumahan untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin di bidang perumahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia.

Namun warga Ketingan Baru tidak sepenuhnya mendapatkan hak atas perumahan tersebut. Pasca relokasi masih ada warga yang menetap di Ketingan Baru dengan alasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Tidak hanya itu warga kota Surakarta lainnya yang tidak mendapatkan hak atas

perumahan pasca penggusuran di beberapa wilayah Kota Surakarta mengakibatkan mereka menetap di Ketingan Baru, yang seharusnya tinggal sedikit warga yang hidup di sana. Akibatnya tidak adanya pemenuhan hak atas perumahan, mengakibatkan masalah Ketingan Baru semakin besar. Selain relokasi di Randusari, warga juga mendapat tawaran ganti rugi. Tapi disini ganti rugi tersebut sangatlah kecil, tidak sebanding dengan harga rumah yang sudah mereka dirikan di Ketingan Baru dan harga tanah di Kota Surakarta. Sehingga, bisa dikatakan hak atas perumahan warga Ketingan Baru tidak sepenuhnya diberikan.

Negara juga memiliki kewajiban memberikan jaminan negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Negara menjamin kepastian tersebut dengan membentuk Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Program jaminan sosial yang dimaksud dalam hal ini mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

Penyelenggara yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan program tersebut dibentuk berdasarkan undang undang yang berlaku, dalam hal ini UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan yang dibentuk ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menginstruksikan agar dibentuk sebuah badan penyelenggara untuk menjalankan fungsi sebagai penyelenggara jaminan sosial. Namun karena tidak seluruh masyarakat bergabung dengan BPJS karena alasan ekonomi, di tahun . Di tahun 2014, Presiden Jokowi mengeluarkan berbagai kartu agar masyarakat miskin bisa mengakses berbagai layanan sosial khususnya pendidikan dan kesehatan yaitu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun lagi lagi masyarakat Ketingan Baru yang berada dalam garis kemiskinan tidak mendapatkan berbagai layanan sosial tersebut. Sehingga

warga Ketingan Baru untuk mendapatkan layanan pendidikan maupun kesehatan sebagai hal dasar kehidupan diharuskan mengeluarkan uang dengan kondisi ekonomi yang dibawah UMR Kota Surakarta. Alasannya warga Ketingan Baru tidak mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah daerah adalah tidak memiliki alamat resmi. Sehingga warga Ketingan Baru tidak masuk daftar dalam berbagi penerima bantuan Negara.

Dalam hal ini menurut Agamben warga Ketingan Baru termasuk sebagai *homo sacer*. *Homo sacer* juga adalah suatu subjek yang didefinisikan oleh hukum tapi sekaligus dieklusi keluar dari hukum (Agamben, 2005). Warga Ketingan Baru dianggap tidak memiliki status hukum, tidak memiliki hak dan tanpa perlindungan.

4. Kemiskinan Struktural Masyarakat Ketingan Baru

Warga Ketingan Baru sebelum menempati lahan tersebut awalnya tidak memiliki tanah pribadi untuk tempat mendirikan rumah sebagai tempat tinggal di Kota Surakarta. Mereka pun bekerja serabutan seperti menjadi kuli bangunan ataupun bengkel. Yang dimana pekerjaan tersebut tidak pasti, kadang bekerja kadang tidak serta upah atau penghasilan yang diterima sedikit. Dengan upah tersebut warga tidak mampu untuk membeli rumah ataupun tanah, sehingga mendirikan rumah di tanah tanah yang tidak digunakan di wilayah Kota Surakarta seperti Pedaringan.

Di tahun 1999 warga yang nantinya menempati Ketingan Baru diberikan janji politik berupa tanah oleh calon Walikota Surakarta periode 2000 – 2005. Warga yang tadinya tidak memiliki tanah sebagai pondasi membuat rumah legal, akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satu faktor lepas dari kemiskinan struktural. Namun warga hanya diberikan tanah di Ketingan Baru tanpa adanya tanda hak milik resmi untuk warga, sehingga tidak ada jaminan resmi bahwa warga memiliki tanah tersebut secara aturan negara. Bisa dikatakan bahwa janji politik tersebut tidak menyelesaikan kondisi ekonomi warga yang akhirnya menempati Ketingan Baru.

Kurang lengkapnya sertifikat untuk mengakui bahwa warga memiliki hak atas tanah tersebut, membuat warga Kendingan Baru tidak bisa sepenuhnya melengkapi syarat untuk lepas dari kemiskinan struktural. Hal tersebut diperparah ada pihak yang mengaku memiliki tanah seluas 1,5 Hektar yang ditempati oleh warga Kendingan Baru. Sehingga, tidak ada perbedaan sebelum tinggal dan sesudah di Kendingan Baru, karena warga tidak memiliki hak resmi atas tanah yang mereka tempati dan hanya menempati tanah milik orang lain / proyek negara. Warga Kendingan Baru yang tidak memiliki hak atas tersebut, otomatis tidak memiliki identitas diri berupa KTP. Yang dimana warga tidak mendapatkan bantuan jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Selama tinggal di Kendingan Baru warga juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sebagian besar tetap menjadi kuli bangunan. Hanya beberapa warga saja yang pada akhirnya anaknya bisa bekerja lebih baik dari kuli bangunan seperti membuka warung kecil maupun buruh pabrik. Pekerjaan yang lebih baik dari kuli bangunan, juga tidak sepenuhnya bisa menjawab kondisi ekonomi warga Kendingan Baru. Karena berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Negara tidak menjawab buruh pabrik ataupun UMKM bisa sepenuhnya lepas dari kondisi tersebut.

Dengan adanya UU No 11 tentang Cipta Kerja membuat buruh pabrik tidak memiliki jaminan pekerjaan, karena metode aturan kontrak diperpanjang menjadi sampai 10 tahun melalui PP turunannya. Sehingga menjadi buruh pabrik yang dinilai lebih baik daripada kuli bangunan tidak menjawab dan tidak bisa menjadi faktor lepas dari. Warung kecil yang dijadikan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan juga kalah dengan muncul berbagai toko toko besar seperti Alfamart, Indomaret, dan mall mall besar. Hal tersebut karena warga Kendingan Baru tidak memiliki akses atas pendidikan dengan mudah untuk meningkatkan keahliannya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat keluarganya lepas dari jerat kemiskinan.

Faktor utama kemiskinan struktural yang dialami masyarakat Ketingan Baru adalah ruang kota yang tidak bisa dimiliki oleh kaum miskin kota untuk hidup di Kota Surakarta. Hal tersebut karena wilayah kota Surakarta yang sudah sangat sempit. Kaum miskin kota yang berada di daerah ilegal juga tidak diberi jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak memiliki identitas resmi atas daerah yang ditinggalinya. Berbagai kebijakan dari negara juga condong membuat kaum miskin kota yang menjadi buruh pabrik sangat susah untuk lepas dari kondisi kemiskinannya.

5. Teori Kewarganegaraan Sosial T.H. Marshall

Teori Kewarganegaraan Sosial menurut T.H. Marshall adalah warga negara memiliki hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Yang dimana warga negara memiliki 3 aspek dalam kehidupan bernegara, yaitu memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik, memiliki akses terhadap pengadilan hukum yang dijalankan oleh warga negara secara bersama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga negara, dan memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum.

Dalam penelitian ini dimana Warga Ketingan Baru merupakan warga negara Indonesia yang dimana Indonesia sebagai negara demokrasi dan hukum yang menjunjung kesejahteraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat Ketingan Baru yang merupakan warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak sipil, hak politik, dan hak sosialnya. Hak hak tersebut didapatkan oleh warga Ketingan Baru. Dalam hak sipil, warga Ketingan Baru memiliki akses terhadap pengadilan hukum untuk menuntut hak – haknya. Warga Ketingan Baru juga memiliki hak politik, yang dimana memiliki akses dalam pemilu. Namun, untuk hak sosial tidak sepenuhnya warga Ketingan Baru dapatkan seperti hak atas jaminan sosial.

6. Teori Konflik Ruang Henry Lefebvre

Menurut Lefebvre konflik terjadi karena adanya perbendaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang di perkotaan. Ruang sebagai produk politik mengakibatkan praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor

yang membuat regulasi tata ruang yaitu pemerintah atau negara. Keberpihakan atau ketidaknetralan aktor-aktor dalam menjalankan kuasanya tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh regulator (pemerintah). Praktik penataan ruang meliputi kegiatan produksi dan reproduksi ruang yang di dalamnya terdapat perjuangan dari klas-klas untuk mendapatkan dan menguasai ruang itu.

Konflik di Ketingan Baru terjadi karena adanya perbedaan pemanfaatan ruang dari masing masing kelompok atas ruang di Ketingan Baru. Masyarakat Ketingan Baru yang menginginkan tanah tersebut menjadi pemukiman sederhana bagi mereka bertetetangan dengan para pengklaim tanah tersebut, yang nantinya jelas akan digunakan sebagai akumulasi modal mereka. Ketidak netralan negara juga terlihat dimana pemerintah Kota Surakarta membantu pengklaim tanah untuk menguasai ruang tersebut dengan melakukan relokasi ke tempat kumuh lainnya yang tidak strategis dan penggusuran.

PENUTUP

Warga Ketingan Baru tidak bisa membeli tanah di Kota Surakarta karena harganya yang terlampau mahal bagi mereka yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan pendapatan yang sangat rendah. Ditambah ruang di Kota Surakarta yang sudah sempit untuk pemukiman, membuat harga semakin mahal. Yang pada akhirnya warga memilih untuk membangun rumah di tanah tanah yang tidak digunakan dengan konsekuensi tempat tinggal ilegal. Yang dimana konflik ruang di Kota bisa terjadi kapan saja, dan korbannya pasti kaum miskin kota yang tinggal di daerah ilegal. Karena menurut Lefevbre, ruang di perkotaan yang bersifat kapitalistik akan selalu dikuasai oleh klas borjuasi melalui integrasi ruang.

Sebagai kaum miskin kota di Kota Surakarta, warga Ketingan Baru belum sepenuhnya mendapatkan haknya sebagai warga negara. Mereka tidak mendapatkan hak atas perumahan maupun hak atas jaminan sosial yang sudah dijamin oleh negara. Warga Ketingan Baru menurut Agamben, merupakan *homo sacer* yang dimana hidup tanpa perlindungan hukum, tanpa hak dan perlindungan karena hidup di ruang konflik.

Kaum miskin kota di Ketingan Baru juga tidak mendapatkan berbagai bantuan sosial yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan warga Ketingan Baru tidak memiliki KTP yang beralamat resmi atas Ketingan Baru. Padahal secara finansial warga Ketingan Baru dibawah Upah Minimum Kota Surakarta..

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, Giorgio. 2005. *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press
- Aminah, Siti. 2015. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1):59-79.
- Lan, Thung Ju (Ed). 2019. *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Pedesaan: Ruang Sosial, Kebijakan, dan Pola Kerentanan Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Lefebvre, Henri. 1991. *The Production of Space*. Cambridge MA: Blackwell
- Marshall, T.H. 1950, *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press
- Putri, Febri Atikawati Wiseno. 2011. *Kajian Penyelesaian Sengeketa Tanah Ketingan Baru Jebres Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Robet, Robertus dan Hendrik Boli Tobi. 2017. *Pengantar Sosiologi Kewarganeraan: Dari Marx sampai Agamben*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Savirani, Amalinda dan Edi Saedi. 2017. *Berakrobat Hidup Sembari Memperjuangkan Hak*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung; Alpadeta.

**HUBUNGAN ANTARA KEPENTINGAN EKONOMI DAN PARTISIPASI
DALAM JUAL BELI *ONLINE* DENGAN KETAHANAN USAHA
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL**
(Studi pada Pedagang di Pasar Gede Kota Surakarta)

Victory Monica Christy¹, Ratna Devi Sakuntalawati²
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret

Email : victorymonicachristy@student.uns.ac.id¹, ratnadevi.solo@staff.uns.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between economic interest and participation in online buying and selling with the business resilience of traders in Pasar Gede, Surakarta City. The theories used in this research are Economic Action Theory and Participation Theory. This research is a research with a quantitative approach, using a survey method with the type of explanatory research (explanatory research). Collecting data using a research instrument in the form of a questionnaire. The population in this study were fruit traders in Pasar Gede as many as 127 people, with a sample of 96 people. Data analysis used correlation statistics consisting of product moment correlation, partial product moment correlation and multiple correlation, assisted by the Statistical Package for the Social Science for Windows version 23.0 program.

Based on the results of the study, it shows that the relationship between economic interests and business resilience is not pure, but must go through the participation variable in online buying and selling as a test factor for the intervening variable. However, within the population, economic interests, participation in online buying and selling, and business resilience are closely related. These results indicate that this study is in accordance with the theory of economic action according to Richard Swedberg and the theory of participation according to Taliziduhu Ndruha. It can be concluded that business resilience can be achieved if there is an economic interest and participation in online buying and selling.

Keywords: Economic Interests, Business Resilience, Participation in Online Buying and Selling, Traders, Traditional Market.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepentingan ekonomi dan partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha pedagang di Pasar Gede Kota Surakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindakan Ekonomi dan Teori Partisipasi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survei dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu pedagang buah di Pasar Gede sebanyak 127 orang, dengan sampel yang diambil sebanyak 96 orang. Analisis data menggunakan statistik korelasi yang terdiri dari korelasi *product moment*, korelasi parsial *product moment* dan korelasi ganda, yang dibantu dengan program *Statistical Package for the Social Science for Windows* versi 23.0.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa hubungan kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha tidak murni, tetapi harus melalui variabel partisipasi dalam jual beli *online* sebagai faktor uji variabel *intervening*. Akan tetapi di dalam populasi, kepentingan ekonomi, partisipasi dalam jual beli *online*, dan ketahanan usaha memiliki hubungan secara bersama-sama. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori tindakan ekonomi menurut Richard Swedberg dan teori partisipasi menurut Taliziduhu Ndruha. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan usaha dapat tercapai apabila terdapat kepentingan ekonomi dan partisipasi dalam jual beli *online*.

Kata Kunci: Kepentingan Ekonomi, Ketahanan Usaha, Partisipasi dalam Jual Beli Online, Pedagang, Pasar Tradisional.

PENDAHULUAN

Keberadaan pasar tradisional memiliki peran penting dan strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Pasar tradisional menjadi bagian dari rantai pemasaran dalam distribusi barang kebutuhan pokok, penyedia lapangan kerja bagi masyarakat, serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasar tradisional sebagai rantai pemasaran dalam distribusi barang kebutuhan pokok, menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, diantaranya bahan makanan, sayuran, buah-buahan, daging, pakaian, elektronik, dan lain-lain, serta terletak di sekitar kawasan permukiman agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, pasar tradisional mampu menampung lebih dari 12 juta pedagang, belum termasuk di dalamnya pengelola pasar, pemasok barang, serta pelaku pasar lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pasar tradisional di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 15.657 pasar. Jumlah tersebut bertambah 10,4% atau sebanyak 1.475 pasar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah pasar tradisional di Indonesia kembali bertambah hingga mencapai 16.235. Besarnya jumlah pedagang serta pasar tradisional ini dinilai signifikan untuk menopang perekonomian daerah pada khususnya dan negara pada umumnya.

Kegiatan jual beli di pasar tradisional didukung oleh pelaku pasar, antara lain pedagang, pembeli, dan pelaku penunjang pasar lainnya (Pramono, 2011). Setiap pelaku pasar memiliki kepentingan masing-masing ketika melangsungkan kegiatan ekonomi di pasar tradisional. Bagi pembeli, kepentingan dalam kegiatan jual beli terwujud dalam keterpenuhinya kebutuhan terhadap barang-barang yang diinginkan dan yang memberikan manfaat. Sedangkan pedagang, dalam kegiatan jual beli akan berupaya mewujudkan kepentingan ekonominya untuk memperoleh keuntungan atau laba dari transaksi dengan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perdagangan, pemenuhan kepentingan tidak hanya dari sisi pedagang tetapi juga pembeli, sehingga untuk memperoleh keuntungan, pedagang harus mempertimbangkan pembeli.

Dikaitkan dengan ketahanan usaha, Ratna Devi (2008) menyatakan bahwa kemampuan pedagang untuk mempertahankan eksistensinya dilakukan dengan cara mengelola laba (keuntungan), untuk keberlangsungan pengembangan usaha, memperluas jaringan, *saving* (menabung), dan pemenuhan kebutuhan subsisten. Oleh karena itu, keuntungan atau laba yang diperoleh pedagang dapat menentukan ketahanan usahanya. Keuntungan diperoleh dari jumlah uang yang didapat melalui hasil penjualan barang, atau yang disebut dengan omzet. Sehingga omzet merupakan ukuran ketahanan usaha, karena jika omzet menurun maka keuntungan yang didapat juga menurun, dan mengakibatkan ketahanan usahanya juga menurun.

Seiring berkembangnya jaman, adanya tuntutan pemenuhan harapan masyarakat memunculkan pasar modern, seperti supermarket, hypermarket dan minimarket, yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas baik dari segi komoditas maupun pelayanan bagi pembeli. Berbeda dengan pasar tradisional yang akrab dengan kesan kotor, kumuh, dan kurang nyaman. Perkembangan pasar modern yang meningkat lebih pesat jika dibandingkan dengan perkembangan pasar tradisional menjadi ancaman bagi ketahanan usaha pedagang pasar tradisional. Menurut penelitian Dewi (2020), ketahanan usaha yang dilihat dari omzet penjualan, menunjukkan bahwa omzet pedagang pasar tradisional menurun sebesar 36,6% karena eksistensi pasar tradisional menjadi kurang diminati akibat keberadaan pasar modern.

Tantangan lain bagi ketahanan usaha pedagang pasar tradisional yakni pasar online yang berkembang pesat seiring munculnya *e-commerce*. Awan Santosa (2020), menyatakan bahwa pedagang pasar tradisional mengalami penurunan omzet hingga 30% karena pergeseran pola konsumsi masyarakat di era digital. Perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan pesatnya pertumbuhan *e-commerce*. Menurut riset Statista tahun 2017, menunjukkan bahwa pengguna *e-commerce* terus mengalami peningkatan, dan tahun 2023 pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia diprediksi mencapai puncak dengan angka 212,2 juta jiwa (75,3%) (Octaviana *et al*, 2020).

Pertumbuhan *e-commerce* yang berguna sebagai sarana jual beli barang secara *online*, memberikan manfaat bagi perkembangan pelaku usaha mulai dari

produktivitas hingga daya bertahan usaha (Mukshin, 2019). Menurut hasil penelitian Amanda Rakanita (2019), menyatakan bahwa melalui kegiatan jual beli *online*, dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha diantaranya: meningkatnya pendapatan, jaringan pemasaran semakin luas, menghemat biaya, menambah relasi, serta kemudahan dalam bertransaksi.

Hasil penelitian Mukshin (2019), menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh pelaku usaha berkorelasi sangat kuat dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan jual beli *online*, yang dilihat dari meningkatnya omzet penjualan sebesar 10% - 50%. Peningkatan omzet penjualan melalui kegiatan jual beli *online* akan meningkatkan keuntungan yang diterima. Keuntungan diperoleh pada akhirnya akan digunakan untuk mengembangkan usaha. Dorongan untuk memperoleh keuntungan ini adalah kepentingan ekonomi pedagang.

Meskipun kegiatan jual beli *online* mampu meningkatkan ketahanan usaha, namun kenyataannya belum semua pedagang berpartisipasi. Keuntungan yang ditawarkan dari jual beli *online* belum menjamin pedagang mampu dan mau beradaptasi dengan teknologi. Mayoritas pedagang masih menyukai cara manual dalam transaksi. Terutama bagi pedagang yang usianya sudah tua yang mana mengalami kesulitan dalam mengoperasikan teknologi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Octaviani *et al* (2020), yang menyatakan bahwa faktor usia dan kurangnya kemampuan yang dimiliki dalam memanfaatkan IPTEK menjadi faktor penyebab pedagang tidak berpartisipasi dalam kegiatan jual beli *online*.

Salah satu pasar tradisional di Kota Surakarta yang mulai menerapkan digitalisasi adalah Pasar Gede. Pasar Gede dikenal sebagai pasar tradisional tertua dan terbesar di Kota Surakarta. Pasar ini ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi simbol kebudayaan, perekonomian serta pariwisata di Kota Surakarta. Pasar yang terbagi dalam dua bangunan ini menyediakan komoditas yang sangat beragam, diantaranya: buah, sayur, sembako, daging, ikan laut, kuliner, grabadan, dan lain-lain. Salah satu komoditas yang terkenal di Pasar Gede yaitu buah, karena dikenal memiliki kualitas yang lebih bagus daripada pasar tradisional lainnya di Kota Surakarta.

Beberapa pedagang di Pasar Gede telah terlibat dalam kegiatan jual beli secara *online*. Pedagang memanfaatkan media sosial serta aplikasi layanan belanja *online* untuk menunjang kegiatan jual beli mereka. Pemerintah Kota Surakarta pun turut mendukung upaya pemanfaatan kegiatan jual beli *online* di Pasar Gede dengan melibatkan perusahaan swasta yaitu Grab dan Gojek.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin mengetahui hubungan antara kepentingan ekonomi dengan partisipasi dalam jual beli online, hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha, hubungan antara partisipasi dalam jual beli online dengan ketahanan usaha, hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha melalui partisipasi dalam jual beli online, serta hubungan secara bersama-sama antara kepentingan ekonomi, partisipasi dalam jual beli online, dan ketahanan usaha. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Tindakan Ekonomi dari Richard Swedberg dan teori Partisipasi dari Taliziduhu Ndraha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pasar Gede Hardjonagoro Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survei dengan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yang bertujuan untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel kepentingan ekonomi dan partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha pedagang di Pasar Gede. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang buah di Pasar Gede Kota Surakarta sebanyak 127 orang. Sampel yang diambil sebanyak 96 orang, yang terdiri dari 47 pedagang los dan 49 pedagang kios. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional stratified random sampling* untuk memperoleh sampel yang representatif dengan melihat populasi pedagang buah di Pasar Gede yang terdiri dari dua kelompok berdasarkan tempat berdagangnya, yakni los dan kios. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Untuk menguji konsistensi dan keakuratan kuesioner dilakukan uji reliabilitas dan validitas. Analisis data menggunakan statistik korelasi *product moment*, korelasi parsial *product moment*, dan korelasi ganda yang dibantu dengan menggunakan program *Statistical Package for the Social Science for Windows* versi 23.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Hubungan antara Kepentingan Ekonomi dengan Partisipasi dalam Jual Beli *Online*.

Hipotesis:

H₀ : Tidak ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan partisipasi dalam jual beli *online*.

H_a : Ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan partisipasi dalam jual beli *online*.

Hasil perhitungan menggunakan statistik korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r_{xz} \text{ hitung} &= 0,243 \\ \text{Sig hitung} &= 0,017 \\ \alpha &= 0,05 \\ df &= 96-2 = 94 \\ r_{xz} \text{ tabel} &= 0,205 \end{aligned}$$

Membandingkan hasil r_{xz} hitung dengan r_{xz} tabel, untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan antara kepentingan ekonomi dengan partisipasi dalam jual beli *online*, sebagai berikut:

$$r_{xz} \text{ hitung} : r_{xz} \text{ tabel}$$

$$0,243 : 0,205$$

$$0,243 > 0,205$$

∴ Ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan partisipasi dalam jual beli *online*.

Menunjukkan dasar pengambilan keputusan dengan $r_{xz} \text{ hitung} > r_{xz} \text{ tabel}$, yaitu sebesar $0,243 > 0,205$ atau nilai $\text{Sig hitung} < \alpha$, yaitu sebesar $0,017 < 0,05$, yang menunjukkan ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan

30

partisipasi dalam jual beli *online*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan partisipasi dalam jual beli *online*. Berdasarkan Kriteria Pedoman Koefisien Korelasi, r_{xz} hitung = 0,243 menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut terkategori tingkat hubungan yang rendah.

2. Hubungan antara Kepentingan Ekonomi dengan Ketahanan Usaha.

Hipotesis:

H_0 : Tidak ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha.

H_a : Ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha.

Hasil perhitungan menggunakan statistik korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r_{xy} \text{ hitung} &= 0,282 \\ \text{Sig}_{\text{hitung}} &= 0,005 \\ \alpha &= 0,05 \\ df &= 96-2 = 94 \\ r_{xy} \text{ tabel} &= 0,205 \end{aligned}$$

Membandingkan hasil r_{xy} hitung dengan r_{xy} tabel, untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} r_{xy} \text{ hitung} &: r_{xy} \text{ tabel} \\ 0,282 &: 0,205 \\ 0,282 &> 0,205 \end{aligned}$$

∴ Ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha.

Menunjukkan dasar pengambilan keputusan dengan $r_{xy} \text{ hitung} > r_{xy} \text{ tabel}$, yaitu sebesar $0,282 > 0,205$ atau nilai $\text{Sig}_{\text{hitung}} < \alpha$, yaitu sebesar $0,005 < 0,05$, yang menunjukkan ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan

usaha. Berdasarkan Kriteria Pedoman Koefisien Korelasi, $r_{xy \text{ hitung}} = 0,282$ menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut terkategori tingkat hubungan yang rendah.

3. Hubungan antara Partisipasi dalam Jual Beli *Online* dengan Ketahanan Usaha.

Hipotesis:

H₀ : Tidak ada hubungan antara partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha.

H_a : Ada hubungan antara partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha.

Hasil perhitungan menggunakan statistik korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r_{zy \text{ hitung}} &= 0,494 \\ \text{Sig}_{\text{hitung}} &= 0,000 \\ \alpha &= 0,05 \\ df &= 96-2 = 94 \\ r_{zy \text{ tabel}} &= 0,205 \end{aligned}$$

Membandingkan hasil $r_{zy \text{ hitung}}$ dengan $r_{zy \text{ tabel}}$, untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan antara partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r_{zy \text{ hitung}} &: r_{zy \text{ tabel}} \\ 0,494 &: 0,205 \\ 0,494 &> 0,205 \end{aligned}$$

$\therefore$ Ada hubungan yang sedang antara partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha.

Menunjukkan dasar pengambilan keputusan dengan $r_{zy \text{ hitung}} > r_{zy \text{ tabel}}$, yaitu sebesar $0,494 > 0,205$ atau nilai $\text{Sig}_{\text{hitung}} < \alpha$, yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, yang menunjukkan ada hubungan antara partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada hubungan antara partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha. Berdasarkan Kriteria Pedoman

Koefisien Korelasi, $r_{zy \text{ hitung}} = 0,494$ menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut terkategori tingkat hubungan yang sedang.

4. Hubungan antara Kepentingan Ekonomi dengan Ketahanan Usaha melalui Partisipasi dalam Jual Beli *Online*.

Hipotesis:

H₀ : Tidak ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha melalui partisipasi dalam jual beli *online*.

H_a : Ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha melalui partisipasi dalam jual beli *online*.

Hasil perhitungan menggunakan korelasi parsial *product moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy.z \text{ hitung}} = 0,192$$

$$\text{Sig hitung} = 0,063$$

$$\alpha = 0,05$$

Uji signifikansi :

Menghitung besarnya nilai standar *error* dari koefisien korelasi, menggunakan rumus:

$$SE_r = \frac{1}{\sqrt{n-m}}$$

Diketahui:

SE_r = Standar *error* koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

m = Jumlah variabel

$$SE_r = \frac{1}{\sqrt{n-m}} = \frac{1}{\sqrt{96-3}} = \frac{1}{\sqrt{93}} = 0,104$$

Menentukan taraf signifikansi pada 95%, maka besarnya nilai $Z = 1,96$. Kemudian SE_r dikalikan dengan nilai Z , sebagai berikut :

$$SE_r \times Z = 0,104 \times 1,96 = 0,204$$

Membandingkan $r_{xy.z \text{ hitung}}$ (koefisien korelasi parsial *product moment*) dengan hasil dari $SE_r \times Z$, sebagai berikut:

$$r_{xy.z \text{ hitung}} : SE_r \times Z$$

$$0,192 : 0,204$$

$$0,192 < 0,204$$

∴ Jadi $r_{xy.z \text{ hitung}} < SE_r \times Z$, yaitu sebesar $0,192 < 0,204$, maka variabel indepeden dan variabel dependen memiliki hubungan yang tidak murni, melalui variabel perantara. Menunjukkan bukti bahwa, variabel kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha hilang (tidak ada hubungan). Hubungan tersebut ada jika melalui partisipasi dalam jual beli *online*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha melalui partisipasi dalam jual beli *online*. Berdasarkan Kriteria Pedoman Koefisien Korelasi, $r_{xy.z \text{ hitung}} = 0,192$ menunjukkan terkategori tingkat hubungan yang rendah.

5. Hubungan secara bersama-sama antara Kepentingan Ekonomi, Partisipasi dalam Jual Beli *Online*, dan Ketahanan Usaha.

Hipotesis:

H_0 : Tidak ada hubungan secara bersama-sama antara kepentingan ekonomi, partisipasi dalam jual beli *online*, dan ketahanan usaha.

H_a : Ada hubungan secara bersama-sama antara kepentingan ekonomi, partisipasi dalam jual beli *online*, dan ketahanan usaha.

Hasil perhitungan menggunakan korelasi ganda menunjukkan:

$$R^2_{y.xz} = 0,272$$

Angka koefisien determinasi ganda $R^2_{y.xz}$ yang dihasilkan adalah sebesar 0,272. Jadi besarnya variabel ketahanan usaha (y) tergantung pada variabel kepentingan ekonomi (x) dan variabel partisipasi dalam jual beli *online* (z).

Dapat dikatakan bahwa 27,2% dari varians variabel ketahanan usaha diterangkan oleh variabel kepentingan ekonomi dan variabel partisipasi dalam jual beli *online*. Sisa persentase varians, yaitu sebesar 72,8% masih dapat diterangkan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian atau yang tidak terhipotesiskan.

Uji signifikansi:

$$R_{y.xz} = \sqrt{0,272}$$

$$R_{y.xz} = 0,521$$

$$N = 96$$

$$df = 96-3 = 93$$

$$\alpha = 0,05$$

$$R_{y.xz} \text{ tabel} = 0,254$$

Membandingkan antara $R_{y.xz}$ hitung dengan $R_{y.xz}$ tabel, sebagai berikut:

$$R_{y.xz} \text{ hitung} : R_{y.xz} \text{ tabel}$$

$$0,521 : 0,254$$

$$0,521 > 0,254$$

∴ Jika $R_{y.xz} \text{ hitung} > R_{y.xz} \text{ tabel}$, maka terdapat korelasi di dalam variabel independen dan dependen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada hubungan secara bersama-sama antara kepentingan ekonomi, partisipasi dalam jual beli *online*, dan ketahanan usaha. Berdasarkan Kriteria Pedoman Koefisien Korelasi, $R_{y.xz} \text{ hitung} = 0,521$ menunjukkan hubungan ketiga variabel tersebut terkategori tingkat hubungan yang sedang.

B. Pembahasan

Dalam teori tindakan ekonomi yang dikemukakan oleh Richard Swedberg dinyatakan bahwa tindakan ekonomi didorong oleh kepentingan sebagai kekuatan mendasar yang didefinisikan secara sosial. Kepentingan ini merupakan fenomena sosial, sehingga individu harus mempertimbangkan individu lainnya ketika berupaya mewujudkan kepentingannya. Dalam penelitian ini, kepentingan ekonomi pedagang dinyatakan dalam keperluan untuk memperoleh keuntungan, dengan mempertimbangkan pembeli ketika berupaya mewujudkan kepentingan ekonominya.

Pernyataan ini sesuai dengan indikator penelitian yaitu (1) Kepentingan/ keperluan memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan

oposisi antara pedagang dengan pembeli dalam penetapan harga; (2) Kepentingan/ keperluan memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisi antara pedagang dengan pembeli dalam menjaga komoditas; (3) Kepentingan/ keperluan memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisi antara pedagang dengan pembeli dalam memberikan pelayanan berkualitas; (4) Kepentingan/ keperluan memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisi antara pedagang dengan pembeli dalam mempertahankan kredibilitas; (5) Kepentingan/ keperluan memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisi antara pedagang dengan pembeli dalam menjalin ikatan sosial-kultural.

Dalam teori tindakan ekonomi yang dikemukakan Richard Swedberg dinyatakan bahwa sebagai sebuah tindakan sosial, maka tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan. Salah satu gagasan yang menarik dari Swedberg adalah tentang penetapan harga. Menurutnya, harga dan uang adalah produk konflik, kepentingan, dan kompromi, sehingga merupakan hasil dari kekuasaan. Pernyataan ini sesuai dengan item penelitian yaitu (1) Kepentingan/ keperluan dalam penetapan harga dengan tawar menawar harga; (2) Kepentingan/ keperluan dalam penetapan harga dengan menetapkan harga khusus untuk pedagang nempil. Kedua item ini memiliki kategori kepentingan yang dominan.

Tindakan ekonomi sebagai sebuah tindakan sosial juga terinspirasi oleh kebiasaan, norma dan kepentingan dalam masyarakat. Tindakan ekonomi pedagang tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional, tetapi juga oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan item penelitian yaitu (1) Kepentingan/ keperluan dalam memberikan pelayanan berkualitas dengan menyapa ramah; (2) Kepentingan/ keperluan dalam memberikan pelayanan berkualitas dengan selalu memberikan senyuman; (3) Kepentingan/ keperluan dalam mempertahankan kredibilitas dengan jujur dalam timbangan. Ketiga item ini memiliki kategori kepentingan yang dominan.

Richard Swedberg juga menyatakan bahwa sebagai sebuah tindakan sosial, maka tindakan ekonomi melekat dalam jaringan hubungan interpersonal antaraktor. Pernyataan ini sesuai dengan item penelitian yaitu kepentingan/keperluan dalam menjalin ikatan sosial-kultural dengan menerapkan prinsip *tuna sathak, bathi sanak* (sedikit merugi tidak apa, tetapi memperoleh saudara/relasi) yang memiliki kategori kepentingan yang dominan.

Namun variabel kepentingan ekonomi dalam penelitian ini terkategori sedang, hal ini dikarenakan adanya salah satu item penelitian yaitu kepentingan/keperluan dalam menjalin ikatan sosial-kultural dengan menerapkan prinsip *ngalap nyaur* (mengambil barang dahulu, membayar kemudian) tidak memiliki kepentingan yang dominan. Sehingga apabila dikaitkan dengan teori tindakan ekonomi, jaringan hubungan interpersonal antara pedagang dan pembeli tidak terjalin melalui prinsip *ngalap nyaur*.

Hasil penelitian tentang variabel partisipasi dalam jual beli *online* terkategori rendah karena seluruh item penelitian tidak memiliki keaktifan yang dominan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Smelser dan Swedberg (2005) bahwa keterbatasan sumber daya, yang di dalamnya termasuk keterbatasan penguasaan teknologi menjadi hambatan aktor dalam melakukan tindakan ekonomi. Dalam penelitian ini, keterbatasan pedagang dalam penguasaan teknologi dapat menjadi hambatan pedagang dalam partisipasinya dalam kegiatan jual beli *online*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dengan partisipasi dalam jual beli *online* memiliki hubungan yang signifikan. Hubungan ini sesuai dengan pernyataan Richard Swedberg bahwa kepentingan mendorong tindakan seseorang, tetapi elemen sosial menentukan ekspresi dan arah tindakan apa yang akan diambil. Dalam penelitian ini, kepentingan ekonomi pedagang bersifat sosial yang mendorong tindakan ekonomi pedagang. Adanya perubahan perilaku konsumen (pembeli) akibat perkembangan jaman, menentukan tindakan pedagang untuk berpartisipasi dalam jual beli *online*, yang mengarah pada keterlibatan dan keaktifan pedagang dalam menjual dan melakukan promosi secara *online*. Pada indikator

penelitian variabel partisipasi dalam jual beli *online* yaitu keterlibatan/ keaktifan dalam periklanan secara *online*, mencerminkan indikator penelitian variabel kepentingan ekonomi yaitu kepentingan/ keperluan memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisi antara pedagang dengan pembeli dalam mempertahankan kredibilitas. Sedangkan pada indikator penelitian variabel partisipasi dalam jual beli *online* yaitu keterlibatan/ keaktifan dalam promosi penjualan secara *online*, mencerminkan indikator penelitian variabel kepentingan ekonomi yaitu kepentingan/ keperluan memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisi antara pedagang dengan pembeli dalam menjalin ikatan sosial-kultural.

Dalam teori partisipasi yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha dinyatakan bahwa partisipasi dapat menumbuhkan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang dapat dilihat dari rasa tanggung jawabnya. Rasa tanggung jawab tumbuh ketika yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan pada hal yang lebih besar. Dalam penelitian ini, kegiatan jual beli *online* tidak hanya sekedar menjual barang secara *online*, melainkan juga menerapkan sarana promosi yaitu periklanan dan promosi penjualan secara *online*. Pernyataan ini sesuai dengan indikator penelitian yaitu (1) Keterlibatan/ keaktifan dalam periklanan secara *online*; (2) Keterlibatan/ keaktifan dalam promosi penjualan secara *online*. Kedua indikator ini memiliki kategori keaktifan yang tidak dominan.

Dalam kegiatan jual beli *online*, promosi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha. Suatu usaha dapat bertahan dalam waktu yang lama apabila mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Dalam menghadapi kondisi yang berubah-ubah, pedagang harus mampu menciptakan peluang dan mampu *manage* resiko untuk memperoleh keuntungan baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang memiliki kemampuan untuk bertahan agar tetap eksis dalam usaha. Eksistensi ini dilihat dari kemampuan pedagang untuk

mengelola laba (realitas penggunaan laba), baik untuk keberlangsungan pengembangan usaha, memperluas jaringan, *saving* (menabung), dan pemenuhan kebutuhan subsisten, yang merupakan indikator variabel ketahanan usaha.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan promosi secara *online*, jaringan pemasaran dapat diperluas. Melalui promosi secara *online*, produk dapat dikenal oleh konsumen dalam jangkauan yang lebih luas. Pernyataan ini sesuai dengan item penelitian yaitu kemampuan memperluas jaringan dengan pembeli, yang memiliki kategori kemampuan yang dominan. Kemampuan mengembangkan usaha dalam perdagangan berkaitan dengan kemampuan untuk menyediakan barang yang berkualitas dan menyediakan layanan jasa pengantaran. Pernyataan ini sesuai dengan item penelitian yaitu (1) Kemampuan mengembangkan usaha dengan menyediakan barang berkualitas; (2) Kemampuan mengembangkan usaha dengan menyediakan layanan jasa pengantaran. Kedua item ini memiliki kategori kemampuan yang dominan.

Namun secara keseluruhan, variabel ketahanan usaha dalam penelitian ini terkategori sedang, hal ini dikarenakan adanya beberapa item penelitian yang tidak memiliki kemampuan yang dominan yaitu (1) Kemampuan menabung dalam bentuk emas; (2) Kemampuan menabung dalam bentuk kios/los; (3) Kemampuan menabung dalam bentuk rumah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam jual beli online dengan ketahanan usaha memiliki hubungan yang signifikan. Hubungan ini sesuai dengan pernyataan Taliziduhu Ndraha bahwa partisipasi dapat menumbuhkan kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Kemampuan pedagang untuk berkembang secara mandiri berkaitan dengan ketahanan usaha. Kemampuan ini dapat tumbuh ketika pedagang secara sadar dan bebas untuk berpartisipasi dalam jual beli *online*. Melalui partisipasi dalam jual beli *online* pedagang dapat menyerap nilai dan berkesempatan untuk belajar mengembangkan usahanya. Sebab pedagang tidak hanya menjual, tetapi juga menerapkan sarana promosi yaitu periklanan dan promosi penjual sebagai

strategi untuk memperluas jaringan dan mengembangkan usaha. Sehingga, pada indikator penelitian variabel partisipasi dalam jual beli *online* yaitu (1) Keterlibatan/ keaktifan dalam periklanan secara *online*; (2) Keterlibatan/ keaktifan dalam promosi penjualan secara *online*, mencerminkan indikator penelitian variabel ketahanan usaha yaitu (1) Kemampuan mengembangkan usaha; (2) Kemampuan memperluas jaringan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha memiliki hubungan yang signifikan. Pada indikator penelitian variabel kepentingan ekonomi yaitu (1) Kepentingan/ keperluan pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisinya dengan pembeli dalam menjaga komoditas; (2) Kepentingan/ keperluan pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisinya dengan pembeli dalam memberikan pelayanan berkualitas, mencerminkan indikator penelitian variabel ketahanan usaha yaitu kemampuan mengembangkan usaha. Kemudian indikator penelitian variabel kepentingan ekonomi yaitu kepentingan/ keperluan pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisinya dengan pembeli dalam menjalin ikatan sosial-kultural, mencerminkan item penelitian variabel ketahanan usaha yaitu kemampuan memperluas jaringan dengan pembeli.

Variabel partisipasi dalam jual beli *online* dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah variabel kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha memiliki hubungan yang murni atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kepentingan ekonomi pedagang dengan ketahanan usaha pedagang memiliki hubungan yang rendah dan tidak murni, sehingga hubungan yang tercipta membutuhkan perantara, yaitu partisipasi dalam jual beli *online*. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Richard Swedberg bahwa kepentingan mendorong tindakan seseorang, tetapi elemen sosial menentukan ekspresi dan arah tindakan apa yang akan diambil. Kemudian didukung dengan pendapat Taliziduhu Ndraha bahwa partisipasi dapat menumbuhkan kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Dalam penelitian ini kepentingan ekonomi pedagang mendorong tindakan pedagang

40

untuk berpartisipasi dalam jual beli *online*, yang mengarah pada keterlibatan dan keaktifan pedagang dalam menjual dan melakukan promosi secara *online*. Melalui partisipasi dalam jual beli *online*, pedagang dapat menyerap nilai dan berkesempatan untuk belajar, tidak hanya menjual tetapi juga terlibat dalam periklanan dan promosi penjualan secara *online*, sehingga kemampuan pedagang untuk mempertahankan usahanya dapat tumbuh.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan di dalam populasi antara kepentingan ekonomi dan partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha secara bersama-sama, dan hubungan tersebut terkategori sedang. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Richard Swedberg bahwa kepentingan menjadi alasan satu pola tindakan diambil daripada pola lainnya. Artinya, bahwa kepentingan mempengaruhi keputusan (pilihan) sang aktor. Dalam penelitian ini, kepentingan ekonomi pedagang untuk memperoleh keuntungan mempengaruhi keputusan pedagang untuk berpartisipasi dalam jual beli *online*. Kemudian menurut pendapat Taliziduhu Ndraha, partisipasi dapat menumbuhkan kemampuan untuk berkembang secara mandiri. Dalam penelitian ini, kemampuan pedagang untuk berkembang secara mandiri, yang berkaitan dengan ketahanan usaha dapat tumbuh ketika pedagang secara sadar dan bebas memilih untuk berpartisipasi dalam jual beli *online*. Partisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan keterlibatan dan keaktifan pedagang dalam menjual dan melakukan promosi secara *online*. Promosi merupakan kegiatan mengkomunikasikan produk untuk meningkatkan volume penjualan. Dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan/ laba penjualan akan meningkat pula. Keuntungan/ laba ini kemudian dikelola oleh pedagang untuk keberlangsungan pengembangan usaha, memperluas jaringan, *saving* (menabung), dan pemenuhan kebutuhan subsisten.

Jadi, kepentingan pedagang untuk memperoleh keuntungan mendorong partisipasi pedagang dalam jual beli *online*. Melalui partisipasi dalam jual beli *online*, akan meningkatkan keuntungan/ laba penjualan. Kemudian

keuntungan/ laba yang diperoleh digunakan untuk mempertahankan usaha agar tetap eksis dengan cara menjaga kontinuitas laba.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan partisipasi dalam jual beli *online*. Hubungan ini terbentuk karena keterlibatan/ keaktifan dalam periklanan secara *online*, mencerminkan adanya kepentingan/ keperluan pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisinya dengan pembeli dalam mempertahankan kredibilitas. Kemudian, hubungan ini juga terbentuk karena keterlibatan/ keaktifan dalam promosi penjualan secara *online*, mencerminkan adanya kepentingan/ keperluan pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisinya dengan pembeli dalam menjalin ikatan sosial-kultural.
2. Ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha. Hubungan ini terbentuk karena kepentingan/ keperluan pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisinya dengan pembeli dalam menjaga komoditas dan memberikan pelayanan berkualitas, mencerminkan adanya kemampuan mengembangkan usaha. Kemudian, hubungan ini juga terbentuk karena kepentingan/ keperluan pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan mempertimbangkan oposisinya dengan pembeli dalam menjalin ikatan sosial-kultural, mencerminkan adanya kemampuan memperluas jaringan dengan pembeli.
3. Ada hubungan antara partisipasi dalam jual beli *online* dengan ketahanan usaha. Hubungan ini terbentuk karena melalui partisipasi dalam jual beli *online* pedagang dapat menyerap nilai dan berkesempatan untuk belajar mengembangkan usahanya. Sebab pedagang tidak hanya menjual, tetapi juga menerapkan sarana promosi yaitu periklanan dan promosi penjual sebagai strategi untuk memperluas jaringan dan mengembangkan usaha.

42

4. Ada hubungan antara kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha melalui partisipasi dalam jual beli *online*. Artinya, kepentingan ekonomi dengan ketahanan usaha memiliki hubungan yang tidak murni, sehingga hubungan yang tercipta membutuhkan perantara, yaitu partisipasi dalam jual beli *online*. Hubungan ini terbentuk karena kepentingan ekonomi pedagang mendorong tindakan pedagang untuk berpartisipasi dalam jual beli *online*. Melalui partisipasi dalam jual beli *online*, pedagang dapat menyerap nilai dan berkesempatan untuk belajar, tidak hanya menjual tetapi juga terlibat dalam periklanan dan promosi penjualan secara *online*, sehingga kemampuan pedagang untuk mempertahankan usahanya dapat tumbuh.
5. Ada hubungan secara bersama-sama antara kepentingan ekonomi, partisipasi dalam jual beli *online*, dan ketahanan usaha. Hubungan ini terbentuk karena kepentingan pedagang untuk memperoleh keuntungan mendorong partisipasi pedagang dalam jual beli *online*. Melalui partisipasi dalam jual beli *online*, akan meningkatkan keuntungan/ laba penjualan. Kemudian keuntungan/ laba yang diperoleh digunakan untuk mempertahankan usaha agar tetap eksis dengan cara menjaga kontinuitas laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, L.V. Ratna. 2008. *Ikatan Solidariats, Keberdayaan Usaha, Dan Ketahanan Usaha Kelompok Etnis Pedagang Tekstil Pasar Klewer Surakarta*. Surakarta: Lindu Pustaka.
- Dewi, Dian Sukma. 2020. *Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pendapatan pasar Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur)*. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Mukshin. 2019. *Manfaat Penerapan Marketing Online (Menggunakan E-Commerce dan Media Sosial) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jurnal TEKNOKOM, Vol. 2 (1).

- Octaviani, Ismi, Abdul Haris, Sujarwo. 2020. *Strategi Adaptasi Pedagang Tradisional saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Edukasi IPS, Vol. 4 (2).
- Pramono, Hery Ananta. 2011. *Menahan Serbuan Pasar Modern*. Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta Diy.
- Rakanita, Amanda. 2019. *Pemanfaatan E-Commerce dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak*. Jurnal EKBIS, Vol. 20 (2).
- Santosa, Awan, Imam Suharjo, Sumiyarsih. 2020. *Digitalisasi Pasar Tradisional di Masa Pandemi*. Yogyakarta: MBridge Press.

PENDIDIKAN ANTI-RADIKALISME DI SEKOLAH :
Studi Penyelenggaraan Pendidikan SMA Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama di Surakarta

Alif Faishal Farras¹, Yuyun Sunesti²

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract: Radicalism is a social movement that has a view to making fundamental changes as a response to strong moral irritation and hopes for improvement towards a better direction according to the views of radical thinkers themselves. Lately, the notion of radicalism has begun to spread to students. Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama as the two largest organizations in Indonesia play an important role in anti-radicalism education efforts. This research was conducted in the city of Surakarta, which is the embryo and headquarters of various ideologies in Indonesia. The research was conducted using qualitative methods and a case study approach and analyzed using Talcott Parsons' Structural Functionalism Theory to explain the AGIL process in providing education in Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama schools. The results show that anti-radicalism education has not become the main goal of the education system of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. However, several aspects in the implementation of teaching and learning activities have led students to an attitude of tolerance, openness, and usefulness which is contrary to radical attitudes and behavior.

Abstrak: Radikalisme merupakan gerakan sosial yang memiliki pandangan untuk melakukan perubahan fundamental sebagai respon dari kejengkelan moral yang kuat dan mengharapkan perbaikan menuju arah yang lebih baik sesuai pandangan para pemikir radikal itu sendiri. Akhir-akhir ini paham radikalisme mulai menjalar hingga kalangan pelajar. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai dua organisasi terbesar di Indonesia memegang peranan penting dalam upaya pendidikan anti-radikalisme. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta yang merupakan embrio dan markas dari berbagai macam ideologi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus serta dianalisis menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons untuk menjelaskan proses AGIL dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan anti-radikalisme belum menjadi tujuan utama dari sistem pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tetapi beberapa aspek dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar telah mengarahkan siswa pada sikap toleransi, keterbukaan dan kebermanfaatan yang bertolak belakang dengan sikap dan perilaku radikal.

Kata Kunci : Pendidikan Anti-radikalisme, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sistem Pembelajaran

PENDAHULUAN

Fenomena radikalisme yang marak terjadi di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Greg Barton dalam Thoyyib (2018) berpendapat bahwa gerakan radikalisme di Indonesia telah ada sejak 1950, ditandai dengan munculnya gerakan Darul Islam atau DI/TII yang akhirnya dapat dipatahkan oleh pemerintah pada 1962. Gerakan radikalisme menurut Barton tidak hanya bersumber dari dalam melainkan juga karena adanya infiltrasi dari luar. Gerakan radikalisme biasanya memiliki indikator berupa karakter keras dan tegas, tanpa kompromi dalam usaha mencapai agenda tertentu, kesan karakter tersebut dapat dilihat dari diksi yang berkonotasi kekerasan dan militeristik dalam penamaan kelompok seperti Jundullah (Tentara Allah), Laskar Jihad, Hizbullah (Partai Allah) atau Front Pembela Islam (Rahmat dalam Nurjannah, 2018). Azra dalam Nurjannah menyebutkan beberapa kelompok atau gerakan radikalisme yang ada di Indonesia antara lain Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Jamaah Ikhwan al-Muslimin Indonesia (JAMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Radikalisme, menurut Arsyad Mbai sebagaimana dikutip oleh Tempo dalam Umar (2010), adalah akar dari terorisme. Disebut demikian karena tindakan radikalisme erat sekali dengan aksi-aksi teror dan kekerasan yang mengancam jiwa. paham ini tumbuh tidak hanya dari dalam saja, melainkan juga karena pengaruh infiltrasi dari luar (Thoyyib, 2018) utamanya dari Timur Tengah. Radikalisme dianggap menyimpang karena hanya fanatik pada satu pendapat saja, membawa prinsip bahwa hanya Syariat Islam yang mampu memberi solusi atas permasalahan-permasalahan sosial, politik, dan atau keagamaan. Pembaharuan yang digaungkan juga dilakukan dengan cara yang drastis, keras dan tanpa kompromi terhadap pihak yang dianggap musuh (Nurjannah, 2018).

Penganut paham radikalisme di Indonesia ditaksir sudah cukup banyak. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pada tahun 2018 menyampaikan bahwa setidaknya ada tujuh perguruan tinggi yang terpapar radikalisme (bbc.com, 2018), bahkan menurut Kepala BNPT, Suhardi Alius,

dalam pemaparannya di Yogyakarta, penyebaran radikalisme berbalut pendidikan sudah mencapai anak usia dini (tempo.co, 2019). Masifnya penyebaran paham radikalisme ini sudah seharusnya menjadikan semua pihak untuk menjadi tameng dalam penyebarannya.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia tentu memegang peranan penting dalam menanggulangi paham radikalisme. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, telah menyatakan darurat radikalisme (cnnindonesia.com, 2019). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam sebuah pidatonya, bahwa Muhammadiyah menentang segala bentuk teror, kekerasan, ekstrimitas dan segala perbuatan yang merusak di muka bumi (KompasTV dalam tribunnews.com, 2019). Beriringnya dua ormas Islam ini dalam menanggulangi radikalisme tentu akan membantu kinerja pemerintah dalam memberantas radikalisme dan terorisme, khususnya sektor pendidikan. Sebab lingkungan pendidikan sebagaimana telah disebutkan diatas telah banyak disusupi agenda penyebaran paham radikalisme.

Kedua ormas Islam ini memiliki lembaga pendidikan yang lengkap, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. persebarannya sudah hampir mencapai seluruh daerah di Indonesia. Tentu jumlah anak didik yang banyak akan sangat berpengaruh apabila diajarkan tentang radikalisme dan bahayanya serta langkah menanggulanginya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan pendidikan yang diselenggarakan oleh NU dan Muhammadiyah dalam menanggulangi radikalisme di Indonesia, khususnya pada pendidikan tingkat SMA/MA, khususnya di Kota Surakarta yang menjadi barometer politik nasional memiliki cukup banyak sejarah peristiwa berkaitan dengan gerakan radikal sangat rentan menjadi laboratorium lapangan bagi gerakan radikalisme (Prasetyo, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan,

47

menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono dalam Hidayat, 2012).

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Pendekatan studi kasus memusatkan pada suatu obyek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang bersangkutan. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam realitas sebenarnya dari kasus yang dipelajari, selain itu data juga dapat diperoleh dari semua pihak yang memahami kasus tersebut. Dengan kata lain, data dalam pendekatan studi kasus dapat diperoleh dari beragam sumber namun hanya terbatas dalam kasus yang akan diteliti. Kunci dari penelitian studi kasus ialah kedalaman analisisnya yang lebih dalam daripada metode penelitian kualitatif lainnya (Nawawi, 2003)

Sampel ditentukan secara *purposive*, sedangkan sumber data diperoleh dengan data primer dan data sekunder, yaitu data data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar dalam Santoso, 2017). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara/*interview*. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung (Koentjaraningrat dalam Ilham, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Radikalisme dalam pengertiannya memiliki banyak makna tergantung sudut pandang masing-masing individu, tetapi dalam menyikapi fenomena radikalisme setidaknya ada tiga sikap berdasarkan pemaparan para informan, yaitu :

1. Menolak; penolakan ini hanya terbatas pada sikap, belum pada tindakan konkrit,
2. Menolak dengan langkah; penolakan yang sudah memunculkan tindakan konkrit,

3. Menolak dan mencegah; yakni penolakan yang disertai tindakan untuk mencegah.

Teori fungsionalisme struktural dicetuskan oleh Talcott Parson untuk melihat masyarakat sebagai satu sistem yang memiliki bagian-bagian yang saling terhubung satu sama lain, satu bagian tidak dapat berjalan tanpa adanya hubungan dari bagian yang lain dan perubahan pada satu bagian akan berdampak pada ketidakseimbangan bagian yang lain. Agar sistem dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik maka setidaknya memenuhi empat syarat AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration* dan *Latency*).

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat juga berperan dalam menciptakan integrasi (*integration*) dalam masyarakat, khususnya dalam usaha menanggulangi radikalisme. Kedua organisasi telah bersepakat bahwa radikalisme ialah paham yang harus dicegah, dihindari dan ditanggulangi keberadaannya. Sebagai dua organisasi besar di Indonesia, kesatuan suara atas radikalisme ini seharusnya dapat membentuk integrasi kekuatan baru sebagai penyokong pemerintah dalam memerangi tindakan radikalisme. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai macam kegiatan yang mengarah pada penanggulangan radikalisme, salah satunya ialah melalui pendidikan.

Pada pelaksanaan pendidikan, perlu adanya integrasi sebagai salah satu faktor berjalannya suatu sistem untuk mencapai tujuan (*goal attainment*), dalam hal ini tujuan yang dimaksud ialah pendidikan anti-radikalisme. Meskipun lembaga-lembaga pendidikan dibawah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah mengamini sikap organisasi naungannya, tetapi dalam realitasnya dalam proses adaptasi terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara SMA Al Muayyad (Nahdlatul Ulama) dan SMA Muhammadiyah PK (Muhammadiyah) dalam penyelenggaraan pendidikan anti-radikalisme. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek, yakni (1) kurikulum, (2) perekrutan guru, (3) penerimaan siswa baru, (4) ekstrakurikuler siswa dan (5) kegiatan penangkalan radikalisme di sekolah.

1. Kurikulum

Prinsip pembelajaran yang digunakan oleh SMA Al Muayyad ialah SPM (*Science, Technology, Masyarakat*). Prinsip tersebut menghasilkan luaran berupa kemampuan siswa untuk bersikap inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat, kebermafaatan yang dimaksud ialah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan aplikatif dan tepat guna sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan keresahan di masyarakat. Adapun referensi pembelajaran dalam SMA Al Muayyad berasal dari dua sumber, yakni kurikulum diknas khusus kelas pagi dan kurikulum khusus *diniyah* (keagamaan) yang digunakan pada saat *madrasah sore*, kurikulum *diniyah* yang digunakan oleh SMA Al Muayyad berbasis pada materi *ahlus sunnah wal jamaah* dan praktik ibadah seperti wiridan, khutbah, memandikan jenazah dan lain sebagainya.

Sedangkan pembelajaran di SMA Muhammadiyah PK menekankan pada visi sekolah yaitu unggul dalam ketauhidan dan keilmuan dalam kualifikasi ulul albab, kualifikasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebermafaatan dan kemampuan untuk menjadi teladan khususnya bagi generasi muda. Kegiatan belajar mengajar di SMA Muhammadiyah PK menggunakan kurikulum diknas dan kurikulum internal Muhammadiyah untuk mata pelajaran Al Islam (Al-Quran-Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih) dan Kemuhammadiyah (AIK).

Secara teori, kedua sekolah memiliki kesamaan prinsip dalam proses pembelajaran yakni kebermafaatan. Prinsip kebermafaatan yang konstruktif tentu sangat bertolak belakang dengan pemikiran dan tindakan radikalisme yang destruktif sehingga proses adaptasi (*adaptation*) yang dilakukan sekolah dalam proses pendidikan anti-radikalisme menjadi lebih mudah.

2. Perekrutan Guru

Perekrutan guru di SMA Al Muayyad diselenggarakan secara terbuka dan bersifat umum, artinya siapapun dapat mengajukan lamaran menjadi guru SMA Al Muayyad. Proses seleksi guru meliputi administrasi, tes mengajar serta latar belakang yang dimiliki pelamar, termasuk juga kesanggupan bekerja di SMA Al Muayyad. Sekolah juga tidak mengharuskan calon guru yang melamar berlatar belakang Nahdlatul Ulama, justru jika ada guru yang tidak berlatar belakang Nahdlatul Ulama maka sekolah akan melakukan pendekatan kultural supaya guru yang bersangkutan menjadi dekat dengan amalan Nahdlatul Ulama.

SMA Muhammadiyah PK menyelenggarakan perekrutan guru dengan sistem terbuka dan bersifat umum. Akan tetapi sebagai amal usaha Muhammadiyah tentu pelamar dengan latar belakang Muhammadiyah akan lebih diutamakan meskipun hal tersebut bukan syarat mutlak. Proses seleksi meliputi tes tertulis berupa materi Al Islam Kemuhammadiyah dan materi sesuai bidang masing-masing, tes wawancara dan *microteaching*. Guru yang telah dinyatakan lolos akan menerima orientasi Al Islam Kemuhammadiyah melalui kajian pekanan serta Pesantren Kader yang dilakukan oleh Majelis Dikdasmen setiap daerah. Pesantren kader ini diselenggarakan guna membina wawasan kemuhammadiyah dan amalan-amalan sesuai dengan ciri khas Muhammadiyah.

Proses rekrutmen guru baik di SMA Al Muayyad dan SMA Muhammadiyah PK berlangsung dengan terbuka dan umum, hanya saja kedua sekolah sama-sama memiliki pertimbangan latar belakang calon guru meskipun hal tersebut bukan suatu pertimbangan mutlak. Setelah guru terekrut, SMA Al Muayyad tidak melakukan orientasi terhadap guru sehingga internalisasi nilai-nilai Nahdlatul Ulama berjalan secara kultural, berbeda dengan SMA Muhammadiyah PK yang memiliki

latensi/pola dalam melakukan internalisasi guru baru yakni melalui kajian rutin dan pesantren kader. Proses internalisasi nilai organisasi dan penjagaan guru oleh SMA Muhammadiyah PK tentu akan lebih tersistem dan terukur daripada SMA Al Muayyad yang mengandalkan pendekatan kultural.

3. Penerimaan Siswa Baru

Penerimaan siswa baru di SMA Al Muayyad dilakukan secara adil dan terbuka meskipun realitasnya 50% pendaftar merupakan alumni SMP Al Muayyad. Standar penilaian dalam proses penerimaan tidak diterapkan dengan ketat karena pertimbangan utama dalam penerimaan siswa baru adalah semangat yang dimiliki oleh calon siswa baru, sekolah juga tidak mengharuskan calon siswa berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Siswa baru yang dinyatakan lolos akan menerima orientasi berupa kepesantrenan, *ahlus sunnah wal jamaah* dan orientasi untuk menumbuhkan sikap menghormati keragaman budaya yang ada. Penanaman sikap menghormati keragaman budaya tentu menjadikan siswa tidak memiliki sikap eksklusif dan fanatik kesukuan, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan sikap radikal yang khas dengan fanatismenya.

SMA Muhammadiyah PK melakukan seleksi penerimaan siswa baru yang meliputi seleksi administrasi, tertulis, mengaji dan wawancara orang tua dan anak. Wawancara orang tua dilakukan agar sekolah memiliki gambaran latar belakang siswa. Calon siswa SMA Muhammadiyah PK tidak harus memiliki latar belakang Muhammadiyah, adapun calon siswa dengan kelebihan prestasi dan hafalan maka akan mendapatkan poin khusus. Siswa yang dinyatakan lolos akan mendapatkan orientasi berupa pengenalan sekolah, Al Islam dan kemuhammadiyahan dan penanaman nilai-nilai adab islami dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial yang ditanamkan seharusnya selaras

dengan prinsip pembelajaran yang menekankan pada kebermanfaatan di lingkungan masyarakat.

4. Ekstrakurikuler Siswa

Ekstrakurikuler di SMA Al Muayyad terdiri dari Pramuka, Ikatan Pelajar Al Muayyad (IPMA), tahfidz, karya ilmiah, khitobah dan IT. Adapun kegiatan kerohanian islam masuk dalam organisasi IPMA. Sedangkan SMA Muhammadiyah PK memiliki ekstrakurikuler yang lebih beragam yakni Hizbul Wathan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah/IPM (termasuk didalamnya kegiatan kerohanian islam), *e-sport*, fotografi, bahasa korea, *anime*, *english club*, *programming* dan *cooking class*.

Dilihat dari segi keragaman, SMA Muhammadiyah PK memiliki keragaman kegiatan ekstrakurikuler yang lebih banyak dan lebih berkembang daripada SMA Al Muayyad, hal itu tidak lepas dari sistem SMA Muhammadiyah PK yang memberikan ruang bagi siswa dan walinya untuk memberikan masukan terhadap kegiatan sekolah. Sedangkan SMA Al Muayyad tetap menjaga kegiatan ekstrakurikuler siswa dengan kekhasan sistem pesantrennya.

5. Kegiatan Penangkalan Radikalisme di Sekolah

SMA Al Muayyad secara khusus belum pernah mengadakan agenda berkaitan dengan penangkalan radikalisme karena sekolah yakin bahwa tidak ada siswa yang terpapar, adapun selama ini yang berjalan ialah kegiatan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam hal orientasi kebangsaan dan latihan baris berbaris. Demikian pula di SMA Muhammadiyah PK juga belum pernah secara khusus melaksanakan agenda serupa karena sekolah menilai hal tersebut belum diperlukan, akan tetapi TNI dan Polri sering dilibatkan dalam memberi sosialisasi mengenai kenakalan remaja dan tertib berlalu lintas.

Dari kelima indikator tersebut, tampak bahwa SMA Al Muayyad dan SMA Muhammadiyah PK memiliki karakteristik masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi arah penyelenggaraan pendidikan anti-radikalisme belum menjadi *goal*/tujuan sehingga jika mengacu pada pandangan fungsional-struktural, tidak ada sistem yang mengarahkan jalan pendidikan menuju tujuan pendidikan anti-radikalisme. Meski demikian dari kelima indikator diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara SMA Al Muayyad dan SMA Muhammadiyah PK yang dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah pendidikan yang diselenggarakan setidaknya mendekati tujuan pendidikan anti-radikalisme.

	SMA Al Muayyad	SMA Muhammadiyah PK
Persamaan	1. Menggunakan dua kurikulum, diknas dan organisasi, 2. Pembelajaran berorientasi kebermanfaatan di masyarakat, 3. Perekrutan guru dan penerimaan siswa baru dilakukan secara terbuka, 4. Kegiatan kerohanian islam masuk dalam organisasi intra sekolah, 5. Belum memiliki kegiatan khusus tentang penangkalan radikalisme, 6. Melibatkan TNI dan Polri dalam beberapa agenda sosialisasi.	
Perbedaan	1. Prinsip pembelajaran berupa <i>Science, Technology, Masyarakat</i> , 2. Internalisasi nilai keorganisasian pada guru melalui pendekatan kultural, 3. Siswa baru mendapatkan orientasi kepesantrenan, <i>ahlus sunnah wal jamaah</i> dan orientasi untuk	1. Prinsip pembelajaran sesuai visi unggul dalam ketauhidan dan keilmuan dalam kualifikasi ulul albab, 2. Internalisasi nilai keorganisasian pada guru melalui pendekatan sistemik, 3. Siswa baru mendapatkan orientasi pengenalan sekolah, Al Islam dan kemuhammadiyah

	menumbuhkan sikap menghormati keragaman budaya. 4. Ekstrakurikuler terbatas.	dan penanaman nilai-nilai adab islami dan kesalehan sosial. 4. Ekstrakurikuler beragam dan dinamis.
<i>Tabel 4.9. Persamaan dan Perbedaan SMA Al Muayyad dengan SMA Muhammadiyah PK</i>		

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa radikalisme ialah paham yang harus dicegah dan ditolak keberadaannya. Pemerintah tentu tidak bisa sendiri dalam menangani persebaran paham radikal yang kian meluas, oleh karenanya sikap dan langkah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia menjadi sangat diperhitungkan utamanya dalam menanggulangi radikalisme di kalangan pelajar. SMA Al Muayyad dan SMA Muhammadiyah PK sebagai sekolah dibawah naungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengamini sikap masing-masing organisasi terhadap radikalisme, yakni menolak dan mencegah persebarannya.

Dalam implementasinya, meskipun masing-masing sekolah telah mengamini sikap organisasi, tetapi pendidikan anti-radikalisme di sekolah nyatanya belum menjadi prioritas utama dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meski demikian, terdapat beberapa langkah yang dilakukan SMA Al Muayyad maupun SMA Muhammadiyah PK yang mengarah pada penangkalan radikalisme, utamanya pada penumbuhan sikap bermanfaat bagi lingkungan serta internalisasi nilai-nilai toleransi dan inklusif pada siswa. Hal tersebut sekalipun tidak mengarah pada pendidikan anti-radikalisme, tapi cukup menjadi suplemen yang mampu mengarahkan siswa pada sikap yang jauh dari perilaku radikal.

Selain hal tersebut, terdapat pula perbedaan-perbedaan sistemik yang penulis temukan dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Al Muayyad dan SMA Muhammadiyah PK, perbedaan tersebut tidak lepas dari karakteristik yang

berbeda antara dua organisasi yang menaunginya, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perbedaan sebagaimana terdapat pada tabel 4.9. dapat ditemui dalam lima indikator, yakni (1) kurikulum, (2) sistem perekrutan guru, (3) sistem penerimaan siswa baru, (4) ekstrakurikuler siswa dan (5) kegiatan penangkalan radikalisme di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk berbagai pihak terkait yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Organisasi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam rangka merumuskan pendidikan anti-radikalisme, sehingga penyikapan organisasi terhadap fenomena radikalisme dapat terimplementasi sampai pada lini pendidikan dan mampu menghasilkan insan-insan penerus bangsa yang jauh dari paham dan perilaku radikal.

2. Bagi Sekolah

Sebagai pihak yang langsung bersentuhan dengan siswa, maka sekolah memegang peranan penting terhadap nilai yang diinternalisasikan dalam proses belajar mengajar. Maka perlu bagi sekolah untuk memberikan penekanan khusus pada nilai kebangsaan, toleransi dan islam yang *rahmatan lil alamin* agar mampu diimplementasikan dengan baik oleh siswa di masyarakat.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, dari segi cakupan maupun analisis, sehingga hasil penelitian juga terbatas pada cakupan yang diteliti. Penelitian sangat mudah dikembangkan dengan menambah sekolah milik organisasi islam lain atau dengan memperluas cakupan dalam lingkup regional maupun provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas, dkk. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damsar. 2017. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta : Kencana
- Gettys, W.E. dan Dawson, Carl A. 1948. *An Introduction to Sociology*. New York: The Ronald Press Company
- Hasani, Ismail; Naipospos, Bonar Tigor; Tim Setara Institute. (2012.). *Dari radikalisme menuju terorisme : studi relasi dan transformasi organisasi Islam radikal di Jawa Tengah & di Yogyakarta / Tim Setara Institute ; editor, Ismail Hasani, Bonar Tigor Naipospos*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Haryanta, Agung Tri dan Eko Sujatmiko. 2012. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media.
- Kartodirdjo, Sartono. 2005. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kinloch, Graham C. 2009. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Semarang: Bumi Aksara
- Putra, Fadillah dkk. 2006. *Gerakan Sosial*. Malang: Aerrors Press.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan. Jakarta : Kencana Prana Media Group.

- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sujatmiko, I. G. 2006. *Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat*. Jakarta: LP3ES Indonesia
- Syarbaini, Syahril. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Taher, Tarmizi; dkk. 2005. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM IAIN.
- Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement, Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press
- Thalib, J.U. 2003. *Radikalisme dan Islamo Phobia. Dalam: Islam dan Terorisme* (Z.A. Maulani, dkk.; ed.). Yogyakarta: UCY Press
- Al-Amin, Mukayat dan Abdul Mujib. 2017. *Muhammadiyah Dan Terorisme, Diskursus Elit Dan Warga Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Terorisme* (<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/943>, diakses 10 April 2020)
- Alim, Nur; dkk. 2018. *Singularitas Agama: Identifikasi Aliran dan Paham Radikal di Kendari*. Jurnal Al-Ulum Vol. 18 No. 2, Desember 2018. Kendari: LP2M IAIN Gorontalo
- Asrori, Ahmad. 2015. *Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas* (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/331>, diakses 10 April 2020)
- Hamzah, Arief Rifkiawan. 2018. *Radikalisme Dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*. Jurnal Sosiologi Reflektif Vol. 13 No. 1 (<http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1305>, diakses 31 Maret 2020)

- Imansari, Nitra Galih. 2019. *Peran Ulama Nahdlatul Ulama Dalam Menangkal Radikalisme Di Provinsi Jawa Timur* (http://digilib.uinsby.ac.id/34435/2/Nitra%20Galih%20Imansari_F02717231.pdf, diakses 10 April 2020)
- Nurjannah. 2013. *Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah*. Jurnal Dakwah Vol. XIV, No. 2 Tahun 2013 (<https://media.neliti.com/media/publications/76812-ID-faktor-pemicu-munculnya-radikalisme-islam.pdf>, diakses 1 Maret 2021)
- Prasetyo, Laurentinus Yananto Andi. 2013. *PERAN TOKOH LINTAS AGAMA DALAM MENANGKAL GERAKAN RADIKALISME AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (Studi Pada Komunitas Tokoh Lintas Agama Di Kota Surakarta, Jawa Tengah)*. Jurnal Ketahanan Nasional No. XIX (3) 2013 (<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/download/6778/5316>, diakses 1 Agustus 2021)
- Qodir, Zuly. 2016. *Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama*. Jurnal Studi Pemuda Vol. 5 No. 1 2016 (<https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/37127/21856>, diakses 31 Maret 2020)
- Ruslan, Idrus. 2015. *Islam dan Radikalisme: Upaya Antisipasi dan Penanggulangannya*. Jurnal Kalam Vol. 9 No. 5 (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/329>, diakses 31 Maret 2020)
- Saifuddin. 2011. *Radikalisme Islam Di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*. (<https://www.neliti.com/id/publications/57583/radikalisme-islam-di-kalangan-mahasiswa-sebuah-metamorfosa-baru>, diakses 10 April 2020)

- Satriawan, Iwan, MN Islami, Tanto Lailam. 2019. *Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas* (<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JSM/article/view/4460>, diakses 10 April 2020)
- Tempo. 2019. *Radikalisme Berbalut Pendidikan Sudah Menyasar Anak Usia Dini di Indonesia*. <https://www.tempo.co/abc/4505/radikalisme-berbalut-pendidikan-sudah-menyasar-anak-usia-dini-di-indonesia>. Diakses 24 Maret 2020.
- Thoyyib, Mochamad. *Radikalisme Islam Indonesia*. Ta'Lim, vol. 1, no. 1, 31 Jan. 2018, pp. 90-105.
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2010. *Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10935>, diakses 31 Maret 2020)
- BBC. 2018. *Temuan BNPT tentang paparan radikalisme di sejumlah universitas dipertanyakan*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357353>. Diakses 24 Maret 2020.
- CNN indonesia. 2019. *Ketum PBNU Said Aqil: Radikalisme di Indonesia Sudah Darurat*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191015160121-20-439690/ketum-pbnu-said-aqil-radikalisme-di-indonesia-sudah-darurat>. Diakses 24 Maret 2020.
- Guru Pendidikan. 2019. *Pengertian Pendidikan*. (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pendidikan/>, diakses 13 April 2020)
- Hayati, Rina. 2019. *Pengertian Studi Kasus, Jenis, Tujuan, dan Contohnya* (<https://penelitianilmiah.com/studi-kasus/>, diakses 18 Mei 2020)

- Hidayat, Anwar. 2012. *Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap* (<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>, diakses 18 Mei 2020)
- Ilham, Mughnifar. 2020. *Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli Terlengkap* (<https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/>, diakses 18 Mei 2020)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Sekolah Kita* (<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>, diakses 18 Mei 2020)
- Ma'rifah, Indriyani. 2014. *Validitas Penelitian Kualitatif* (<http://indriyani-marifah.blogspot.com/2014/04/validitas-penelitian-kualitatif.html>, diakses 19 Mei 2020)
- Muhammadiyah. *Sejarah Muhammadiyah* (<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html>, diakses 13 April 2020)
- Nahdlatul Ulama. *Sejarah NU* (<https://www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu>, diakses 13 April 2020)
- Riadi, Muchlisin. 2019. *Teori Gerakan Sosial* (<https://www.kajianpustaka.com/2019/06/teori-gerakan-sosial.html>, diakses 10 Mei 2020)
- Santoso, Imam. 2017. *Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data* (<http://oldata.blogspot.com/2017/06/jenis-data-sumber-data-dan-metode.html>, diakses 18 Mei 2020)
- Tribunnews. 2019. *Terkait Radikalisme, Begini Pandangan Muhammadiyah*. <https://wow.tribunnews.com/2019/11/18/terkait-radikalisme-begini-pandangan-muhammadiyah>. Diakses 24 Maret 2020.

KETAHANAN SOSIAL EKONOMI INDUSTRI RUMAH TANGGA GETHUK TAKE SELAMA PANDEMI COVID-19

Mitchell Giovanni Irianto Putro¹, Mahendra Wijaya²

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

Email : giovanniputro@student.uns.ac.id

Abstrak : Dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia bahkan Indonesia. Hal tersebut dapat berdampak pada Industri Rumah Tangga Gethuk Take di Tawangmangu. Oleh karena itu Industri Rumah Tangga Gethuk Take didesak untuk dapat melakukan ketahanan sosial ekonomi agar terhindar dari kebangkrutan usaha dan pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi produksi dan pemasarannya dalam ketahanan sosial ekonomi Industri Rumah Tangga Gethuk Take selama pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial oleh Max Webber, Ketahanan Sosial, dan Ketahanan Ekonomi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan ketahanan sosial Industri Rumah Tangga Gethuk Take berhubungan dalam tindakan sosial karena tindakan tersebut diarahkan pada calon pembeli, selain itu juga menggunakan tiga bagian dari sifat ketahanan sosial yaitu *Resistance* atau perlawanan, *Recovery* atau pemulihan, *Creativity* atau kreatifitas. Sedangkan dalam ketahanan ekonomi dibagi dua yaitu produksi dan pemasaran. Dalam melakukan proses ketahanan sosial ekonomi pemilik industri menyesuaikan dengan keadaan usaha tersebut.

Kata Kunci: Ketahanan, Industri Rumah Tangga, Pandemi Covid-19

Abstrak: With the Covid-19 pandemic that has spread throughout the world, even Indonesia. This can have an impact on the Gethuk Take Home Industry in Tawangmangu. Therefore, the Gethuk Take Home Industry is urged to be able to carry out socio-economic resilience in order to avoid business bankruptcy and termination of employment. This study aims to find out how the production and marketing strategies are in the socio-economic resilience of the Gethuk Take Home Industry during the Covid-19 pandemic. The theory used in this study uses the theory of social action by Max Webber, Social Resilience, and Economic Resilience. The method used is a qualitative method with a descriptive approach and purposive sampling is done. Data was collected by means of in-depth interviews, observation and documentation. The results show that in carrying out social resilience, the Gethuk Take Home Industry is related to social actions because these actions are directed at prospective buyers, besides that it also uses three parts of the nature of social resilience, namely Resistance or resistance, Recovery or recovery, Creativity or creativity. Meanwhile, economic resilience is divided into two, namely production and marketing. In carrying out the process of socio-economic resilience, the industrial owner adapts to the condition of the business.

Keywords : *Resilience, Home Industry, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Industri rumahan atau *home industri* merupakan sektor industri yang proses produksinya masih menggunakan alat kelengkapan yang sederhana. Industri semacam ini dapat dikelola dalam skala rumah tangga sehingga bisa dipantau setiap saat, usaha ini bisa dikelola oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, dan modal usaha yang dibutuhkan ini relatif sedikit. Pada industri rumahan terdapat industri yang mengolah hasil pertanian salah satunya industri yang mengolah di bidang pangan atau makanan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia, dimana kebutuhan tersebut selalu didahulukan daripada kebutuhan lainnya.

Salah satu industri yang ada di wilayah Jawa Tengah terletak di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar memiliki cukup banyak industri pangan yang dapat dijadikan sebagai penopang perekonomian daerah sama seperti kota-kota yang lain. Salah satu jenis industri pangan yang ada di Kabupaten Karanganyar yaitu mengolah singkong. Singkong merupakan komoditas pertanian yang banyak diolah menjadi aneka produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia (Salim, 2012, h.7). Salah satu hasil pengolahan singkong yang terkenal di daerah Jawa Tengah adalah getuk. Salah satu getuk yang terkenal di Jawa tengah terkhusus di Kecamatan Tawangmangu adalah Gethuk Take. Gethuk Take merupakan Industri Rumah Tangga yang ada di Tawangmangu yang bahan bakunya dari singkong jalak towo.

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus coronavirus yang baru ditemukan. Pertama kalinya virus ini menyerang Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Dan menyebar ke negara tetangga hingga kini menyebar di seluruh penjuru dunia dan menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Menurut WHO awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus (2019-nCoV)*, kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Corona Virus Disease COVID-19) yang disebabkan oleh virus

Severe Aute Respiratory Sydrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Di Indonesia sendiri virus corona atau Covid-19 hingga saat ini telah mencapai 4.215.104 terkonfirmasi, sembuh 4.037.024 dan meninggal 141.939 (<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses 1 Oktober 2021). Akibatnya penyebaran virus corona ini berdampak pada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya di Indonesia terlebih adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan social berskala besar akan membatasi mobilitas masyarakat dan akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi sehingga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dibatasi. Dalam hal ini Industri Rumah Tangga Gethuk Take menjadi salah satu yang berdampak karena mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas penurunan produksi, kapasitas penurunan penghasilan, hingga pemasarannya.

Kenyataan inilah yang mendorong peneliti ingin mengkaji produksi dan pemasaran mengenai ketahanan sosial ekonomi Industri Rumah Tangga Gethuk Take selama pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Industri Rumah Tangga Gethuk Take yang beralamat di Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sumber data yang diperoleh menggunakan sumber data primer yaitu hasil transkrip wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi terkait Industri Rumah Tangga Gethuk Take. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik sampling menggunakan *Purposive Sampling*. Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun teknik analisis data menggunakan gagasan dari Mils dan Huberman yaitu dengan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Produksi dalam Ketahanan Sosial Ekonomi Industri Rumah Tangga Gethuk Take selama pandemi Covid-19.

Menurut J.B Wheeler (1956) dalam bukunya yang berjudul *Art and Sciene of War* menyatakan bahwa taktik merupakan seni dalam membuat rancangan atau strategi. Taktik adalah bagian dari strategi, dengan taktik maka strategi dapat dirancang, jadi dapat dikatakan bahwa strategi merupakan pedoman dalam pembuatan taktik. Sehingga taktik ialah bentuk nyata dari strategi. Taktik juga merupakan aplikasi dari strategi, tanpa strategi maka tidak ada taktik. Dalam penelitian ini strategi sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi.

Kegiatan produksi merupakan proses dimana kegiatan tersebut sebagai badan usaha, dimana produksi tersebut mempunyai makna suatu proses kombinasi dan koordinasi materi-materi dan kekuatan (input,sumber daya,jasa-jasa dan produksi dalam hal pembuatan suatu barang dan jasa). Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu proses dimana input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bertambah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari nilai tambah barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam rangka mempertahankan usaha industrinya, pemilik Industri Rumah Tangga Gethuk Take menjalankan atau melakukan berbagai langkah dalam rangka mengatur atau mengkoordinasikan produksi agar berjalan selaras sehingga usaha tersebut terus berjalan dan menekan seminimal mungkin masalah yang mungkin akan timbul. Dalam proses produksi pemilik industri memperhatikan beberapa hal yang nantinya akan mempengaruhi usahanya agar tetap bertahan hingga saat ini seperti modal, bahan baku dan tenaga kerja.

Modal merupakan salah satu faktor terpenting dalam menunjang proses produksi, dimana dengan tersedianya modal dalam jumlah yang mencukupi maka proses produksi akan dapat berjalan lancar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan modal untuk menunjang proses produksi, pemilik industri gethuk pada awalnya mengusahakan sendiri dalam artian dibantu pihak keluarga artinya usaha ini turun temurun. Lalu sebagian besar Industri Rumah Tangga Gethuk Take ini

masih mempunyai hubungan kerabat atau keluarga, sehingga masih ada ikatan sosial yang terbentuk. Dalam mendirikan Industri Gethuk Take ini memiliki kendala akan tetapi dengan berjalannya waktu yang ada kendala tersebut dapat diatasi dengan ketelatenan dan kesabaran dalam mendirikan industri ini. Sehingga perlahan demi perlahan bisa teratasi dengan baik mulai dari nol kita berjuang bersama hingga saat ini.

Salah satu faktor dalam jalannya proses produksi yaitu adanya bahan baku. Tanpa bahan baku maka proses produksi tidak akan berjalan. Dalam memproduksi gethuk akan selalu membutuhkan bahan baku untuk diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Bagi seorang pengusaha kecil seperti Industri Rumah Tangga Gethuk Take akan sangat penting memperoleh bahan baku yang dibutuhkan dengan mudah, layak harganya dan dengan biaya yang murah dan tidak mudah rusak bila diproses nantinya, sehingga dapat menekan biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi serta dapat menghasilkan barang dengan kualitas yang baik. Bahan baku yang digunakan Industri Rumah Tangga Gethuk Take ini menggunakan bahan baku yang utama yaitu singkong. Dalam memperoleh bahan baku singkong Industri Rumah Tangga Gethuk Take menerapkan sistem kerja sama dengan petani singkong dan terkadang dengan pengepul. Lalu dalam proses pembuatan gethuk itu bahan-bahannya tidak cuma singkong saja akan tetapi ada bahan-bahan lain yang digunakan yaitu gula, garam, daun pandan dan cairan bahan makanan. Proses pembuatan gethuk juga mudah dimulai dari pengupasan singkong, pencucian, penimbangan, pengukusan, selanjutnya proses njojoh atau tumbuk, proses selanjutnya pembentukan, lalu di kasih tepung panir setelah itu di packing lalu dimasukkan ke lemari dingin dan selanjutnya siap dipasarkan.

Tenaga kerja merupakan faktor utama yang diperhatikan oleh setiap pengusaha besar maupun kecil tak kecuali oleh Industri Rumah Tangga Gethuk Take dalam menunjang kelangsungan kegiatan produksi. Tenaga kerja yang digunakan disini tenaga kerja laki-laki dan perempuan dengan berbagai usia. Tenaga kerja yang mereka gunakan berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar desa

sendiri. Untuk tenaga kerjanya total memiliki 29 karyawan. Selama pandemi Covid-19 Industri Rumah Tangga Gethuk Take menerapkan sistem 5 hari kerja guna mengurangi resiko penularan Covid-19. Lalu rata-rata jam kerja pegawai jam 8 pagi sampai 4 sore akan tetapi pada awal pandemi tahun lalu sistemnya di olang atau gentian. Selama pandemi Covid-19 melanda tanah air industri ini juga tidak melakukan pengurangan pekerja hal tersebut dapat menyebabkan pengangguran dan berdampak pada perekonomian warga sekitar.

2. Strategi Pemasaran Dalam Ketahanan Sosial Ekonomi Industri Rumah Tangga Gethuk Take.

Dalam ketahanan sosial ekonomi agar tetap bisa bertahan ditengah pandemi diperlukan strategi pemasaran, dikarenakan dalam strategi pemasaran mempengaruhi strategi produksi dan strategi produksi akan mempengaruhi strategi pemasarannya. Oleh sebab itu pada dasarnya semua saling terkait satu sama lain. Strategi pemasaran juga merupakan hal terpenting dalam suatu usaha yang kemudian sangat mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan hidup usaha tersebut hingga bisa bertahan sampai saat ini. Dalam berbagai bidang usaha terkhusus dalam usaha industri, kegiatan pemasaran atau penjualan menjadi faktor utama kelangsungan siklus usaha, sehingga kemudian diperlukan strategi yang baik dalam menjual atau memasarkan produk-produk hasil produksi. Strategi pemasaran yang digunakan Industri Gethuk Take selama pandemi yaitu yang pertama tetap melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Google Bisnis, selain itu pemilik juga menggunakan aplikasi whatsapp untuk melakukan promosi di grup-grup whatsapp. Lalu yang kedua dengan cara menitipkan produk ke toko atau outlet di daerah tempat pariwisata didalam kota maupun luar kota. Selanjutnya yang ketiga dengan memberikan bonus kepada konsumen di hari tertentu pada saat pembelian beberapa pack produk Gethuk Take misalnya pada waktu jumat berkah jadi ketika ada konsumen yang ingin membeli produk gethuk pada waktu hari jumat lalu diberikan bonus oleh pemilik. Selain itu pemilik juga mempertahankan reseller dengan cara mengkomunikasikan hubungan yang baik supaya pelanggan yang lama

masih setia kepada Gethuk Take, dengan kerjasama itu terciptanya hubungan yang baik dan Industri Rumah Tangga Gethuk Take juga mencari customer baru agar jangkauan pemasarannya luas akan tetapi juga tidak meninggalkan customer lama atau pelanggan lama.

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia ini tetap berpengaruh dalam pemasarannya. Walau di masa pandemi pemasarannya sangat berpengaruh akan tetapi itu bisa teratasi dengan baik, pemilik tetap semangat untuk mempromosikan produk tersebut, tak hanya melakukan promosi Industri Rumah Tangga Gethuk Take juga melayani menerima saran dan kritiknya agar produk yang dijual juga ada pembenahan atau pembaharuan.

Industri Rumah Tangga Gethuk Take juga tidak membuka cabang dimana pun karena mereka ingin menjaga kualitas produk dan citra rasanya agar bisa bertahan hingga saat ini dan selalu di ingat masyarakat.

PEMBAHASAN

Dalam perspektif teori tindakan sosial semua kegiatan yang dilakukan oleh pemilik Industri Rumah Tangga Gethuk Take dalam melakukan ketahanan sosial ekonomi berhubungan dalam tindakan sosial yang diartikan oleh Max Weber yaitu tindakannya mempunyai makna atau subyektif arti bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain yaitu diarahkan pada calon pembeli atau konsumen gethuk. Dalam hal ini termasuk pada tindakan manusia untuk menentukan, memilih dan melakukan pekerjaan adalah tindakan sosial yang ada kaitannya dengan teori pendekatan definisi sosial. Paradigma definisi sosial menekankan bahwa kenyataan sosial yang bersifat subyektif yang terlepas dari individu. tindakan ini dilakukan oleh seseorang satu dengan yang lain maka dapat disebut tindakan sosial, dikarenakan jika seseorang melakukan tindakan tapi diarahkan pada benda mati atau tidak hidup maka tidak dapat disebut dengan tindakan sosial, seperti dijelaskan oleh pemilik industri bahwa dalam mempertahankan usahanya perlu adanya strategi atau langkah-langkah yang diambil dalam menjaga usahanya tersebut agar tetap stabil. Dalam melakukan Tindakan sosial

terdapat 4 tipe tindakan sosial Max Weber (Paul Doyle Johnson dalam Gushendi 2019) yaitu :

a) Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini merupakan tindakan yang dipertimbangkan secara matang, efektif dan efisien untuk mempunyai tujuan yang jelas. Tindakan ini paling efisien digunakan karena dalam melakukan strategi produksi dalam ketahanan sosial ekonom membutuhkan pengadaan bahan baku, proses produksi, dan proses pemasaran guna mempertahankan usahanya sehingga muncul adanya tindakan sosial ini.

b) Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan yang secara sadar akan perilaku dengan memperhitungkan manfaat sedangkan tujuan yang dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, dalam konteks tersebut sebagaimana cara meminimalisir biaya dalam proses produksi getuk dan menghasilkan barang yang berkualitas yang baik dan bisa diterima di masyarakat serta memiliki ekonomi yang tinggi.

c) Tindakan Afektif

Tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor yang artinya tindakan yang dikuasai perasaan emosi tanpa melakukan pertimbangan secara matang.

d) Tindakan Tradisional

Tindakan ini biasanya dilakukan tanpa adanya perencanaan baik tujuan maupun caranya, karena pada dasarnya mengulang dari yang sudah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan penelitian ini karena dengan kebiasaan para pemilik usaha dengan petani, misalkan pada pengadaan bahan baku, pada kegiatan pengadaan bahan baku sering sekali dilakukan pada pemilik usaha untuk bekerja sama dengan petani singkong guna memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut agar dapat memproduksi gethuk dengan kualitas yang baik.

Menurut peneliti dari ke empat tipe tindakan sosial dari Max Weber Industri Rumah Tangga (IRT) Gethuk Take memiliki ketiga tipe dari tindakan sosial, yaitu melakukan

tindakan rasionalitas instrumental, lalu tindakan rasionalitas nilai, dan tindakan tradisional.

Dalam perspektif teori ketahanan sosial, masyarakat dapat dikatakan memiliki ketahanan sosial apabila memiliki suatu kemampuan untuk dapat bertahan dari gangguan dan ancaman dari luar atau perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Webersik (2010) Ketahanan di sini merupakan sebuah kemampuan setiap individu dan masyarakat dalam menghadapi setiap bencana sehingga bencana tersebut dapat menjadi pembelajaran agar lebih siap menghadapi bencana tersebut apabila terjadi lagi. Dalam penelitian ini semua kegiatan yang dilakukan oleh pemilik industri rumah tangga Gethuk Take dalam melakukan ketahanan sosial ekonomi Industri Rumah Tangga (IRT) Gethuk Take berhubungan dalam teori ketahanan sosial. Selanjutnya ketahanan sosial memiliki tiga sifat jika dilihat dari bagaimana seseorang merespons suatu bencana, sifat tersebut adalah:

1) *Resistance* atau perlawanan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya masyarakat untuk bertahan dari bencana dan konsekuensinya. *Resistance* atau perlawanan pemilik industri Gethuk Take dalam mengupayakan agar usahanya tidak berhenti yaitu dengan pemilik tetap mempekerjakan karyawan tanpa mengurangi jumlah karyawan maupun PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap memproduksi produk akan tetapi dengan produk yang berbeda seperti dari bahan daging, ayam dan sayuran seperti risoles, sup matahari dan sosis. Selain itu dalam komposisi dalam pembuatan gethuk tidak ada pengurangan karna industri ini kaitannya usaha kuliner selalu tetap menjaga kualitas dari produk itu sendiri, dalam segi bahan atau bentuknya tidak ada pengurangan. Jadi memang Industri Rumah Tangga (IRT) Gethuk Take tetap menjaga mutu dan rasa produknya.

2) *Recovery* atau pemulihan

Recovery atau pemulihan berkaitan dengan kemampuan komunitas untuk keluar dari bencana (Adger, 2000). Dalam hal ini *Recovery* atau pemulihan yang dilakukan oleh pemilik usaha Gethuk Take ini disesuaikan dengan kemampuan

usahnya yaitu pemilik Industri Rumah Tangga Gethuk Take melakukannya dengan melakukan variasi rasa gethuk, jadi gethuk sendiri rasanya tidak hanya original aja. Industri Rumah Tangga Gethuk Take juga menciptakan berbagai rasa mulai dari rasa jahe, rasa durian, rasa isi coklat kacang. Selanjutnya pemilik juga melakukan *recovery* dengan cara membuat iklan melalui Whatsapp Group maupun kontak langsung. Selain itu pemilik industri juga memberikan bonus kepada konsumen di hari tertentu pada saat pembelian beberapa pack produk Gethuk Take.

3) *Creativity* atau kreatifitas

Merupakan keuntungan yang dicapai dalam ketahanan sebagai bagian dari proses pemulihan. Pemulihan yang optimal tidak hanya sebatas kembali pada titik keseimbangan awal, melainkan juga dapat beradaptasi dengan kondisi baru serta mengambil pelajaran dari pengalaman bencana, serta dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam hal ini kreativitas yang dibangun pemilik Industri Gethuk Take agar tetap bertahan di masa pandemi yaitu dengan tetap memproduksi dengan memberikan inovasi produk yang berbeda dari biasanya. Industri Gethuk Take memunculkan produk inovasi terbaru, dan adanya olahan kering yang semuanya itu berbahan dasar dari singkong. Inovasi terbaru produk gethuk itu sendiri antara lain cotot, singket, sibrontok, dan utri dan lain-lain. Selain itu olahan keringnya berupa opak dan kecimpring. Selain itu industri Gethuk Take juga berinovasi dengan promosi produk melalui instagram agar pemasarannya luas, dapat dikenal dan diketahui orang banyak sehingga dapat meningkatkan penjualan dari Industri tersebut.

Menurut sifat ketahanan sosial Industri Rumah Tangga Gethuk Take memiliki semua sifat dari ketahanan sosial, pemilik usaha telah melakukan *resistence* atau perlawanan, juga melakukan *recovery* atau pemulihan dan menghasilkan *creativity* atau kreatifitas dalam mempertahankan usahanya.

KESIMPULAN

Proses produksi Industri Rumah Tangga Gethuk Take di Tawangmangu dalam mempertahankan usahanya selama pandemi Covid-19 melalui beberapa tahapan atau cara. Tahapan tersebut berupa modal, bahan baku, dan tenaga kerja. Dalam hal modal bagi industri ini merupakan hal yang terpenting dalam mendirikan Gethuk Take, mereka memulai usaha ini secara turun temurun dari keluarga. Kemudian dalam hal bahan baku, selama pandemi Covid-19 melanda tanah air tidak berpengaruh pada bahan bakunya. Bahan baku masih tetap aman dan tidak kesulitan. Dalam hal tenaga kerja, pemilik usaha industri Gethuk Take menerapkan strategi yang bisa dilihat dari segi perekrutan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimiliki industri Gethuk Take ini menggunakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar sini dan lingkungan keluarga. Seperti, dari tetangga, kerabat dan beberapa ada yang berasal dari luar desa akan tetapi masih dalam lingkup Tawangmangu.

Dalam hal pemasaran. Industri Rumah Tangga Gethuk Take melakukan berbagai cara agar konsumen tertarik dan datang untuk membeli produknya. Selama pandemi Covid-19 Industri Rumah Tangga Gethuk Take mengalami permasalahan terkait memasarkan produk, pandemi ini memengaruhi sekali dalam memasarkan produk karena mereka menjual produk di tempat-tempat warung atau toko oleh-oleh di sekitar tempat wisata dan bahkan sampai ekspor ke hongkong. Selain itu Industri Rumah Tangga Gethuk Take juga melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Google Bisnis, selain itu pemilik juga menggunakan aplikasi Whatsaap untuk melakukan promosi di grup-grup whatsapp. Selanjutnya juga memberikan bonus kepada konsumen di hari tertentu pada saat pembelian beberapa pack produk.

Dalam perspektif teori tindakan sosial Max Weber yaitu tindakannya mempunyai makna atau subyektif arti bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain artinya Tindakan tersebut diarahkan pada calon pembeli atau konsumen gethuk. Dalam hal ini termasuk pada tindakan manusia untuk menentukan, memilih dan melakukan pekerjaan adalah tindakan sosial yang ada kaitannya dengan teori pendekatan definisi sosial. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh pemilik Industri Rumah Tangga

Gethuk Take dalam melakukan ketahanan sosial ekonomi berhubungan dalam tindakan sosial.

Industri Rumah Tangga Gethuk Take melakukan dengan baik dalam ketahanan sosial maupun ekonomi dalam mempertahankan usaha Industri Rumah Tangganya (IRT). Hal ini bisa dilihat dalam proses ketahanan sosial yang mencakup *resistence*, *recovery*, dan *creativity* Industri Rumah Tangga Gethuk Take selama masa pandemi Covid-19. Kemudian untuk ketahanan ekonomi usaha Industri Rumah Tangga Gethuk Take bisa dilihat pada proses produksi, dan proses pemasaran dimasa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. Neil. 2000. *Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human Geography*: Sage Publications ,Volume 24, Nomor 3, Hal. 347- 364.
- Covid19.go.id. (2021). (<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses 1 Oktober 2021).
- Gushendi, Dendi. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata dalam Tinjauan Teori Tindakan Sosial Max Webber*. Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya.
- J.B Wheeler. 1956. *Art and Science of War*. Canberra: Australian National University Press
- Salim, Emil. 2011. *Mengolah Singkong Menjadi Tepung Mocaf Bisnis Produk Alternatif pengganti Terigu*. Yogyakarta: Lily Publisher.
- WHO. (2020). *Coronavirus Disease (COVID – 19)*
<https://covid19.who.int/> Diakses pada 27 Februari 2021
- Webersik, C. 2010. *Climate change and security: A gathering storm of global challenges*. Praeger

PENGEMBANGAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA SEBAGAI DESTINASI DALAM PENERAPAN EKOWISATA KAWASAN WADUK GONDANG KARANGANYAR

Hafiidz Ihza Ar Raafii¹, Sudarsana²

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

Email : hafiidzraafii@student.uns.ac.id

Abstrak : Ekowisata merupakan wisata ramah lingkungan dan bertanggung jawab atas kelestarian alam. Waduk Gondang merupakan kawasan wisata baru dengan potensi kekayaan alam yang dapat dikembangkan menjadi ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengembangan obyek dan daya tarik wisata Waduk Gondang sebagai penerapan ekowisata oleh pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan bentuk kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi lalu dianalisis dengan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan upaya pengembangan yang dilakukan oleh pihak terkait antara lain : pemanfaatan potensi dan daya dukung alam kearah ekowisata, pembentukan kelompok sadar wisata Desa Gempolan (Pokdarwis), perencanaan pembangunan wisata air, perencanaan pembangunan sarana prasarana dan akomodasi pariwisata, melakukan promosi wisata beserta penyediaan paket wisata, serta melakukan berbagai upaya konservasi alam. Upaya pengembangan ekowisata di Kawasan Waduk Gondang belum dilakukan secara maksimal. Berbagai kendala dihadapi sehingga berakibat pada dampak yang dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah belum signifikan.

Kata Kunci : Ekowisata, Pokdarwis, akomodasi pariwisata, konservasi alam, pemerintah daerah

Abstrak: Ecotourism is environmentally friendly tourism and is responsible for the preservation of nature. Gondang Reservoir is a new tourist area with potential natural wealth that can be developed into ecotourism. This study aims to describe the efforts to develop objects and tourist attractions of the Gondang Reservoir as an application of ecotourism by related parties. This study uses a descriptive method with a qualitative form. Methods of data collection using observation, in-depth interviews and documentation and then analyzed with an interactive model, namely data collection, data reduction and data presentation. The results of the study show that development efforts carried out by related parties include: utilization of the potential and carrying capacity of nature towards ecotourism, formation of Kelompok Sadar Wisata in Gempolan Village (Pokdarwis), planning for water tourism development, planning for the development of tourism infrastructure and accommodation, conducting tourism promotions along with the provision of tour packages, as well as carrying out various natural conservation efforts. Efforts to develop ecotourism in the Gondang Reservoir area have not been carried out optimally. Various obstacles were faced so that the impact felt by the community and local government was not yet significant.

Keywords: *Ecotourism, Pokdarwis, Tourism Accommodation, Nature Conservation, Local Government*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugrahi kekayaan alam yang sangat luar biasa yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia sebagai aset yang berharga, dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat bersama negara dalam bidang pariwisata. Sektor pariwisata mulai menjadi salah satu sektor penghasil pendapatan negara yang sangat besar, bahkan pada tahun 2019 Kementerian Pariwisata memproyeksikan sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa negara terbesar selama lima tahun kedepan. Hal ini didukung dengan pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai sarana penunjang kegiatan kepariwisataan.

Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Republik Indonesia mengenai jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, menunjukkan adanya kenaikan jumlah wisatawan mancanegara yang berwisata di Indonesia. Akan tetapi pada tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia menurun tajam, hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya kasus pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, sehingga memaksa seluruh bandara, pelabuhan dan terminal ditutup dan berhenti beroperasi untuk sementara waktu terhitung selama kurang lebih delapan bulan sejak bulan April hingga November 2020. Hal ini tentunya berdampak sangat besar untuk seluruh sektor tak terkecuali sektor pariwisata.

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengandalkan dari sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Ada banyaknya destinasi pariwisata serta didukung dengan kenampakan alam yang indah menjadikan kabupaten ini menonjolkan pariwisata alam sebagai ikon promosi, hal ini terdapat pada julukan Karanganyar Bumi 'Intanpari' yang merupakan akronim dari Industri, Pertanian dan Pariwisata. Pada tahun 2016 Pemkab Karanganyar membuat daftar obyek wisata serta mengklasifikasikan

obyek- obyek wisata didalamnya menjadi tiga jenis, yaitu wisata unggulan, wisata andalan, dan 5 wisata potensial. Waduk Gondang merupakan salah satu kawasan wisata yang tergolong wisata andalan di Kabupaten Karanganyar. Waduk Gondang merupakan obyek wisata buatan yang pengerjaannya baru rampung pada tahun 2019 dan diresmikan pada bulan Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Ada berbagai jenis pariwisata yang dikembangkan di Indonesia, salah satunya wisata alam. Wisata alam yaitu konsep wisata dengan memanfaatkan alam sebagai daya tarik utama. Sedangkan, menurut Argyo Demartoto (2009 : 46) ekowisata merupakan wisata berbasis pada alam dengan mengikuti aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alam dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Pengelolaan kelestarian lingkungan alam menjadi penekanan yang menjadikan ciri khas ekowisata. Konsep ekowisata menjadi konsep pengembangan wisata yang ramah lingkungan yang tentunya membawa lebih banyak dampak positif terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi terutama bagi masyarakat sekitar kawasan ekowisata. Namun dalam keberjalannya upaya pengembangan wisata khususnya Waduk Gondang kearah ekowisata belum terlalu maksimal, oleh karena itu diperlukan upaya untuk pengembangan kawasan wisata yang tepat sehingga potensi yang ada dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Sehingga peneliti ingin menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan dalam upaya pengembangan potensi ekowisata di kawasan Waduk Gondang. Penelitian ini menjadi penting, karena peneliti ingin mengetahui keberlanjutan upaya pengelolaan lingkungan atau upaya konservasi melalui kegiatan kepariwisataan di kawasan Waduk Gondang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. menurut Borgan dan Taylor dalam Moleong (2001 : 3) diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan upaya – upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang terkait dalam

76

kaitannya dengan pengembangan wisata dengan konsep ekowisata di kawasan Waduk Gondang.

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Tujuan peneliti menggunakan teknik purposive agar peneliti mendapatkan informan atau sampel yang memenuhi kriteria, dengan kata lain informan dalam penelitian dipilih langsung oleh peneliti secara selektif dengan pertimbangan tertentu. Peneliti membagi informan menjadi tiga jenis seperti yang dikemukakan oleh Hendarso dalam Suyatno (2005 : 171 - 172) terdapat tiga macam informan dalam penelitian kualitatif, antara lain : informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan kunci dalam penelitian adalah Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar dan pihak Pemerintah Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan, informan utama adalah pihak Pokdarwis Desa Gempolan dan Ketua RT serta informan tambahan antara lain : warga masyarakat Desa Gempolan, pedagang sekitar Waduk Gondang dan wisatawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1) Upaya Pengembangan Ekowisata Kawasan Waduk Gondang

a. Potensi wisata kawasan Waduk Gondang

Potensi wisata yang ada di Waduk Gondang dapat diklasifikasikan menjadi potensi sumber daya hayati dan potensi sumber daya non hayati. Salah satu informan mengungkapkan bahwa kawasan wisata Waduk Gondang memiliki berbagai potensi, terutama potensi alamnya. Beberapa potensi hayati yang terdapat di kawasan wisata Waduk Gondang antara lain : perkebunan pohon jambu dan durian serta pembibitan ikan lele oleh warga Desa Gempolan. Sedangkan, untuk potensi sumberdaya non hayati terdapat pemandangan alam itu sendiri, tanah kas

desa, air yang ada di waduk dan arus air yang deras, serta tanah subur di sekitar kawasan wisata.

b. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Pokdarwis Desa Gempolan dibentuk atas inisiasi pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar juga memiliki kedudukan yakni sebagai pembina yang bertugas untuk mendampingi dan mengarahkan setiap kegiatan pokdarwis. Sedangkan, kedudukan pemerintah desa dapat sebagai pendamping yang bertugas mendampingi, memberi masukan serta memfasilitasi setiap kegiatan pokdarwis. Hal tersebut memang sesuai dengan pedoman kepengurusan dan keanggotaan pokdarwis, yang mana dalam setiap struktur pokdarwis terdiri atas pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, seksi – seksi dan anggota.

Pokdarwis Desa Gempolan memiliki beberapa peran dan fungsi antara lain sebagai salah satu aktor yang mempromosikan kawasan wisata dan berperan langsung pada tahap perencanaan hingga tahap paling akhir dalam pembangunan pariwisata termasuk pula mengelola obyek dan potensi wisata. Dengan demikian, pokdarwis harus berperan aktif dalam setiap upaya pengembangan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebenarnya telah membuat pelatihan secara rutin dan memfasilitasi perwakilan dari setiap pokdarwis dalam sebuah forum komunikasi pokdarwis. Forum komunikasi tersebut dapat dijadikan sarana bagi setiap pokdarwis yang ada di Kabupaten Karanganyar untuk berbagi pengalaman dan menjadi tempat berdiskusi dalam memecahkan sebuah masalah dalam kaitannya dengan pengembangan wisata. Adanya pandemi *covid-19* yang memaksa pertemuan dialihkan secara daring melalui media sosial. Dinas pariwisata Kabupaten Karanganyar juga mengagendakan pembinaan rutin untuk pokdarwis yang selalu menekankan pada kepariwisataan yang ramah lingkungan.

c. Upaya Pengembangan Kawasan Wisata Waduk Gondang

Melihat potensi kekayaan alam serta daya dukung di kawasan wisata Waduk Gondang, dapat dikembangkan menjadi suatu destinasi wisata dengan konsep ekowisata dengan beberapa alasan selain potensi dan daya dukung alamnya antara lain yaitu adanya pelibatan masyarakat dengan budaya lokal didalamnya dalam kegiatan kepariwisataan, adanya upaya konservasi alam, Penedukasian kepada masyarakat mengenai sebuah kegiatan kepariwisataan juga dilakukan mengingat masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi aktor utama dalam menjaga kelestarian lingkungannya, sebagaimana penuturan informan berikut :

*“Kalau **ekowisata** sangat cocok, dengan pertimbangan daya dukung serta potensi lingkungan yang ada disana,.. dengan **melibatkan masyarakat lokal** didalamnya ada **budaya lokal** kita bantu angkat atau perkenalkan. Kemudian, **konservasi alam**,... serta yang tidak kalah penting dengan **mengedukasi masyarakat**,.. Kunci dari ekowisata kan sebenarnya adalah **keberlanjutan serta kelestarian** alam dengan melibatkan masyarakat lokal,...”*

(wawancara dengan Ari Fitryanto, 12 Juli 2021)

Selain mengembangkan sebagai ekowisata, pemerintah juga berencana akan mengembangkan kawasan wisata Waduk Gondang juga menjadi agrowisata sederhana. Agrowisata atau *agrotourism* merupakan suatu kegiatan kepariwisataan dengan memanfaatkan sektor pertanian menjadi objek dan daya tarik utama mengingat Desa Gempolan terkenal sebagai kawasan durian dan bahkan hampir setiap rumah warga memiliki kebun yang ditanami pohon durian. (Ulfah dkk, 2017)

Berbagai rencana sudah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk realisasi pengembangan antara lain, membangun dermaga labuh untuk pemberhentian *jetski*. Pemerintah daerah juga tengah berusaha membuat rencana untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan pariwisata yang akan dikembangkan dengan pengembangan dan konservasi buah durian.

Pemerintah Desa Gempolan juga berencana untuk membuat kolam renang dan pasar wisata desa dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan sebagai

penjual di pasar desa dengan memanfaatkan tanah kas desa. Lain halnya dengan pihak Pokdarwis Desa Gempolan yang menghendaki untuk memprioritaskan pemanfaatan kawasan wisata menjadi suatu tempat rekreasi dan olah raga air. Pokdarwis ingin memanfaatkan arus air yang berada di sungai sekitar kawasan waduk untuk arung jeram, hal ini karena arus air sangat mendukung dan air tidak akan kering dan banjir serta arus air yang cenderung stabil.

Masyarakat Desa Gempolan juga selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan dan pengembangan, baik dari tahap perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan. Pemerintah bersama masyarakat menyusun prioritas pembangunan infrastruktur maupun fasilitas lain serta masyarakat sekitar juga dilibatkan sebagai pemberi masukan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Desa Gempolan juga selalu melibatkan masyarakat sekitar, misalnya pada tahapan pemeliharaan lingkungan yakni melalui program penanaman bibit pohon durian dan program resik – resik desa. Pokdarwis Desa Gempolan juga diikutsertakan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan pengembangan wisata, pengelolaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan kawasan baik yang diadakan pemerintah desa maupun secara mandiri.

Pemerintah daerah sudah membuat perencanaan pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata atau akomodasi antara lain *rest area*, area parkir dan plaza kuliner serta sarana pendukung ekowisata lainnya. Tidak kalah pentingnya pemerintah daerah juga akan mengembangkan Desa Gempolan menjadi sebuah desa wisata. Lebih lanjut, pemerintah daerah merencanakan pembangunan penginapan atau *homestay*. Rencananya untuk pengelolaan dan manajemen penginapan sepenuhnya akan diserahkan kepada pokdarwis Desa Gempolan. Akan tetapi, hingga saat ini, rencana pembangunan berbagai akomodasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan belum dapat terealisasi karena dians pariwisata masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat maupun bupati selaku kepala daerah.

Untuk mempromosikan sebuah destinasi pariwisata, pemerintah daerah menggunakan beberapa strategi. Pertama, dinas pariwisata melakukan promosi

melalui media sosial. Selanjutnya yaitu dengan mengadakan *travel dialog* yaitu dengan mengunjungi kota atau kabupaten yang dianggap berpotensi untuk menjaring wisatawan dari kota atau kabupaten tersebut. Terakhir, pihak dinas juga mengadakan *M-Trip* yaitu dengan mengundang wartawan untuk membantu mempublikasikan destinasi pariwisata tersebut serta biro travel untuk membuat sebuah rangkaian kegiatan kepariwisataan di destinasi wisata tersebut.

Sedangkan, untuk promosi kawasan wisata Waduk Gondang baru dilakukan melalui media sosial. Untuk promosi dengan *travel dialog* dan *M-Trip* belum dapat dilakukan karena pihak Dinas Pariwisata masih melakukan pengkajian dan masih mempersiapkan sarana dan prasarana serta akomodasi. Usaha promosi wisata melalui media sosial instagram juga dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan wisata Waduk Gondang dengan membuat akun instagram dengan nama *@wadukgondang.kra*.

d. Upaya Konservasi Kawasan Waduk Gondang

Pemerintah Desa Gempolan melakukan konservasi melalui program kerja kelurahan yakni dengan penanaman pohon durian, sekitar 3.000 buah bibit pohon durian yang ditanam pada beberapa tempat antara lain di tanah kas desa, tanah senggang yang berada pada beberapa titik di wilayah desa dan rumah warga. Pihak kelurahan juga mengajak dan menginstruksikan masyarakat sekitar kawasan wisata untuk menanam minimal satu buah pohon durian di rumah masing – masing.

Penanaman yang dilakukan memang sudah dilaksanakan, akan tetapi dalam upaya pemeliharaan bibit tanaman belum dilakukan dengan baik. Beberapa bibit pohon dicuri oleh oknum tertentu. Pemerintah Desa Gempolan juga menggiatkan ‘resik – resik desa’. Bersih – bersih lingkungan dilaksanakan secara rutin minimal 3 kali dalam satu bulan.

Upaya pemeliharaan lingkungan atau konservasi alam sudah pernah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, upaya tersebut antara lain dilakukan oleh Ibu Iriana dengan penanaman 250 pohon durian lokal pada wilayah *greenbelt* di kawasan Waduk pada Februari, 2017. Sedangkan pada tahun 2020 kementerian

PUPR kembali menanam pohon durian pada kawasan *greenbelt* pula dengan melibatkan masyarakat menjadi pemelihara pohon durian.

2) Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Pengembangan Ekowisata

Kendala yang dihadapi sedikit banyak menghambat upaya pengembangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. berikut beberapa kendala yang didapat dari temuan di lapangan.

a. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar kawasan wisata

Kesadaran akan pengembangan kegiatan kepariwisataan antar warga masyarakat yang ada di kawasan wisata masih belum dapat terbangun sepenuhnya. Selain itu, adanya kecemburuan antar warga satu wilayah kebayanan dengan wilayah lainnya, hal ini terjadi karena dalam setiap upaya pembangunan atau pemeliharaan kawasan wisata beberapa warga masyarakat merasa iri karena daerah tempat tinggalnya yang masih berada di kawasan wisata tidak diutamakan dalam pembangunan.

b. Tidak berjalannya kegiatan pokdarwis

Kurangnya kontribusi dari anggota pokdarwis Desa Gempolan menghambat pokdarwis itu sendiri untuk melakukan kegiatannya. Hal ini karena karena anggota pokdarwis memiliki kesibukan masing – masing sehingga menyebabkan tugas dan peran pokdarwis tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini pendanaan kegiatan pokdarwis juga menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pokdarwis. Pokdarwis Desa Gempolan juga kurang mendapatkan pelatihan dan pendidikan dari pemerintah. Hal ini lah yang menyebabkan pokdarwis Desa Gempolan divakumkan atau dinonaktifkan untuk sementara waktu karena ketiadaan dana dan dukungan dari pemerintah.

- c. Kesepakatan perjanjian antara pemerintah daerah dan pihak pengembang terkait lokasi kepariwisataan

Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar menjelaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk melakukan kesepakatan melalui perjanjian atau MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak BBWS terkait lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepariwisataan.

Seyogyanya pemerintah desa menunggu perintah dan penyerahan dari pemerintah daerah, pemerintah desa belum dapat pula untuk bergerak melakukan pengembangan wisata. Upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa hanya sebatas membuat objek – objek wisata sederhana dengan memanfaatkan tanah kas desa.

- d. Kurangnya sarana transportasi dan akomodasi pendukung kegiatan kepariwisataan

Sarana transportasi umum untuk menjangkau kawasan wisata masih sangat terbatas. Transportasi umum hanya melewati jalan utama yang merupakan jalan penghubung antar Kecamatan dan Kabupaten Sragen. Moda transportasi umum darat tersebut berupa angkutan pedesaan yang jumlahnya sangat terbatas. Area parkir pun di kawasan wisata belum tertata dan hanya dibuat warga secara sederhana.

Akomodasi sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan di kawasan wisata Waduk Gondang juga masih sangat belum memadai. Akomodasi yang telah tersedia di kawasan wisata antara lain beberapa tempat makan sederhana semi permanen dan tempat ibadah yang jumlahnya sangat terbatas.

3) Dampak dari Pengembangan Ekowisata

Setiap pembangunan dan pengembangan objek maupun kawasan wisata tentunya membawa sebuah dampak, dampak tersebut dapat meliputi bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

a. Bagi Pemerintah Daerah

Dampak secara ekonomi juga harus dirasakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kawasan wisata dapat menjadi penambah anggaran daerah atau nasional. Tujuan utama dari sebuah pengembangan dalam hal ekonomi tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dengan penghasilan dari kawasan wisata tersebut, disamping itu suatu kawasan wisata juga harus menjadi sumber pendapatan daerah dalam hal ini melalui pajak yang dibayarkan warga sekitar dan retribusi.

b. Bagi Masyarakat Sekitar

Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar kawasan wisata masih belum dirasakan secara signifikan. Namun adanya pembangunan kawasan wisata Waduk Gondang sedikit banyak tetap mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata.

Dampak peningkatan ekonomi sudah dirasakan oleh salah seorang pedagang di kawasan wisata, beliau merupakan Ibu Mini. Adanya pembangunan dan pengembangan pariwisata di kawasan Waduk Gondang dapat membantu menjalankan perekonomian keluarga Ibu Mini, bahkan menurut Ibu Mini dari hasil berjualan dapat membantu sedikit banyak pembiayaan kuliah putrinya yang memasuki perkuliahan.

Dalam bidang sosial budaya, adanya pembangunan dan pengembangan kawasan Waduk Gondang menimbulkan pergeseran mata pencaharian warga Gempolan yang awalnya sebagai buruh tani yang bekerja menggarap tanah pemilik sawah atau kebun, kini sebagian sudah beralih berdagang di sekitar kawasan wisata, akan tetapi petani masih

menjadi mata pencaharian yang paling dominan mengingat masih luas serta tujuan utama pembangunan waduk yaitu untuk pengairan atau tadah air untuk mencegah kekeringan saat musim kemarau.

Adanya pembangunan dan pengembangan kawasan wisata Waduk Gondang membawa dampak positif dan negatif dari sisi sosial budaya. Bapak Erwan memberikan contoh kedua dampak tersebut antara lain, dampak positif yang ditimbulkan antara lain pola mata pencaharian masyarakat yang mulai berubah. Sementara, untuk contoh negatif dampak sosial budaya yakni di kawasan waduk sering dijadikan tempat berpacaran pasangan muda – mudi, hal ini sangat bertentangan dengan norma kesopanan yang sudah menjadi budaya di Indonesia.

Dampak sosial dan budaya lain yang ditimbulkan adalah adanya pola interaksi sosial yang baru misalnya pola interaksi antara warga masyarakat yang berjualan makanan dengan wisatawan. Ada pula perubahan pola keseharian warga masyarakat, yang awalnya sebagai buruh tani yang harus ke ladang pada saat pagi buta, kini setelah adanya pembangunan dan pengembangan waduk warga yang berjualan dapat memulai aktifitas bekerjanya lebih siang. Akan tetapi masih terdapat pula budaya dan tradisi yang tidak luntur karena pembangunan dan pengembangan pariwisata kawasan Waduk Gondang, budaya tersebut yakni budaya gotong royong yang terlihat dalam ‘sambatan’. Sambatan merupakan bentuk kerja sama atau gotong royong yang dilakukan antar warga Desa Gempolan untuk membangun atau memperbaiki rumah warga.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, dalam paradigma ini melihat tentang tindakan sosial, Webber melihat setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh aktor memiliki tujuan atau makna tertentu. Tindakan yang dilakukan aktor dan individu mengarah pada diri aktor atau individu itu sendiri dan juga mengarah pada individu lain. Penelitian ini menggunakan teori aksi yang dikemukakan oleh Webber, yang mana dalam teori aksi ini, Webber membagi 4

85

tipe dalam tindakan atau aksi sosial yang meliputi : (1) Tindakan Rasionalitas Instrumental, (2) Tindakan Rasionalitas Berorientasi Nilai, (3) Tindakan Rasional Afektif atau Emosional, (4) Tindakan Rasional Tradisi atau Tradisional. Dalam teori ini manusia atau individu disebut sebagai aktor, aktor dalam penelitian ini merupakan pihak yang terkait dengan upaya pengembangan pariwisata kawasan Waduk Gondang antara lain yaitu pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Desa Gempolan dan masyarakat dengan berbagai elemen didalamnya. Aktor tidak hanya menjadi objek, melainkan aktor memiliki peran sebagai subjek dalam melakukan pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya pengembangan ekowisata sebagai destinasi wisata di Kawasan Waduk Gondang, memiliki hubungan erat dengan konsep tindakan rasionalitas instrumental atau *zwerk rational* yang dikemukakan Webber. Dalam tindakan sosial ini aktor atau individu memiliki cara – cara untuk mencapai tujuan tertentu dan setiap tindakan yang dilakukan aktor berasio atau berakal. Dalam hal ini aktor yang dimaksud adalah pihak – pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan ekowisata

Para aktor di atas memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu mengembangkan kegiatan kepariwisataan dengan konsep ekowisata melalui cara - cara tertentu dengan tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata serta dapat meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa cara yang dilakukan aktor antara lain yaitu pembentukan pokdarwis, perencanaan pengembangan dengan konsep ekowisata dan argowisata, perencanaan pembangunan akomodasi pendukung kegiatan kepariwisataan, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat, melakukan promosi kawasan wisata Waduk Gondang serta upaya konservasi alam yang tak kalah pentingnya sesuai dengan pelaksanaan konsep ekowisata.

Tindakan rasionalitas instrumental karya Webber memiliki keterkaitan dengan teori aksi milik Hinkle yang merujuk karya Parsons, dalam hal ini para aktor menjadi subjek sekaligus objek pengembangan pariwisata. Subjek yang

dimaksudkan adalah para aktor berperan penuh dalam setiap upaya pengembangan wisata dengan keterlibatannya dalam setiap upaya pengembangan pariwisata dan sebagai objek yaitu menjadi sasaran upaya pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai suatu tujuan para aktor menggunakan teknik, prosedur, metode serta alat yang telah dipersiapkan aktor untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun secara sadar dan berakal para aktor dalam pengembangan ekowisata di kawasan Waduk Gondang telah menentukan sendiri teknik, prosedur metode serta alat yang dapat membantu dan menunjang tujuan yang telah rencanakan. Dalam hal ini, upaya pengembangan pariwisata di kawasan Waduk Gondang kearah ekowisata. oleh karena itu para aktor telah mempersiapkan teknik, prosedur, metode serta alat yang dipilih dan digunakan sesuai dengan prinsip – prinsip pengembangan ekowisata.

Ada beberapa kondisi yang tidak dapat dihadapi dan dirubah oleh para aktor. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi kendala yang dihadapi dan membatasi cara – cara aktor untuk bertindak dalam usahanya mengembangkan pariwisata. Kondisi yang demikian dapat berasal dari internal aktor itu sendiri dan dari pihak eksternal diluar aktor. Adapun kendala yang berasal dari dalam aktor antara lain : kurangnya kesadaran masyarakat akan pengembangan pariwisata dan tidak berjalannya pokdarwis secara maksimal. Sedangkan, kondisi yang menghambat aktor dari luar antara lain belum adanya titik temu antara pihak pengembang pembangunan Waduk Gondang dengan pemerintah daerah terkait lahan yang akan diserahkan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata serta masih kurangnya sarana prasarana serta akomodasi penunjang kegiatan kepariwisataan di kawasan wisata Waduk Gondang.

Aktor – aktor pengembangan pariwisata akan menilai mengenai tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukannya. Penilaian dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan upaya pengembangan yang akan, sedang dan yang telah dilakukan. Selain penilaian dalam konsep ini juga membicarakan mengenai

evaluasi dalam keberjalanan suatu kegiatan kepariwisataan, diharapkan dengan adanya evaluasi oleh para aktor dapat memperbaiki, menambah dan juga meningkatkan kualitas pelayanan agar menciptakan suatu kepariwisataan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekowisata.

Dalam upaya pengembangan pariwisata di kawasan Waduk Gondang seluruh aktor dari pihak terkait selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai, norma serta aturan moral. Hal ini bahkan sudah dilakukan sejak awal tahapan perencanaan pembangunan Waduk Gondang. Para aktor juga turut terlibat dan berperan penuh dalam pengambilan keputusan pada saat pembangunan waduk. Dalam upaya pengembangan pariwisata para aktor juga menerapkan etika nilai norma moral agar dapat mengurangi dampak negatif dari adanya sebuah pengembangan pariwisata baik dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan ataupun dampak negatif yang dapat memicu terjadinya konflik antar masyarakat.

KESIMPULAN

Berbagai upaya pengembangan pariwisata dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Upaya pengembangan wisata tersebut antara lain : pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Desa Gempolan; pemanfaatan potensi daya dukung lingkungan serta sumber daya alam yang ada menjadi sebuah kawasan wisata baru dengan penambahan obyek wisata baru yang berpedoman pada prinsip ekowisata; pengkajian dan perencanaan pembangunan berbagai sarana prasarana serta akomodasi wisata mengingat kawasan wisata ini tergolong kawasan wisata baru; serta promosi wisata baik melalui media sosial, *travel dialog* dan *m-trip*. Selain melakukan upaya pengembangan, untuk menciptakan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, maka diperlukan suatu upaya konservasi. Upaya konservasi juga telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait, upaya tersebut antara lain seperti penanaman pohon bibit durian dan resik – resik desa yang merupakan kegiatan kerja bakti yang merupakan program dari Kelurahan Gempolan.

Adapun kendala yang menghambat upaya pengembangan wisata antara lain : Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar kawasan wisata, tidak berjalannya kegiatan pokdarwis, belum adanya titik temu antara pemerintah dengan pihak pengembang untuk lokasi pengembangan pariwisata, serta kurangnya sarana transportasi dan akomodasi pendukung kegiatan kepariwisataan.

Terdapat pula dampak yang ditimbulkan dari adanya upaya pembangunan atau pengembangan kawasan Waduk Gondang. Dampak tersebut antara lain dampak ekonomi dan dampak sosial budaya. Meskipun belum terlalu signifikan, dampak ekonomi akibat pembangunan waduk telah dirasakan bagi masyarakat sekitar kawasan Waduk Gondang. Sedangkan, bagi pemerintah daerah dampak ekonomi sebagai sumber pendapatan daerah diperoleh melalui pajak dan retribusi. Untuk dampak sosial budaya terlihat dari mulai bergesernya mata pencaharian masyarakat sekitar. Meskipun demikian, budaya gotong royong masih melekat pada warga Desa Gempolan, hal ini tercermin dari tradisi adat masyarakat sekitar yaitu '*sambatan*' yang masih peneliti temui di Desa Gempolan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group
- Demartoto, Argyo. DKK 2009. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Ulfah, Irma Fitriana, DKK. 2017. "Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di DesaBumiaji, Kota Batu, Jawa Timur". Jurnal Politik Indonesia. 2 (1) (2017) 46-64

KESADARAN KRITIS BURUH PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA DALAM MEMPERJUANGKAN PEMENUHAN HAK MATERNITAS (Studi Kasus Buruh Perempuan Anggota FSBPI di Jakarta)

Herlina¹, Aris Arif Mundayat²

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

E-mail: ina.herlina@student.uns.ac.id

Abstract: This research is motivated by the condition of women workers who still experience maternity rights violations in the workplace, even though there are laws regulating women workers' maternity rights. The purpose of this study is to describe the critical consciousness of women workers as members of the trade union fight for their maternity rights and to describe the role of the FSBPI trade union in increasing the critical awareness of its women workers. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data was taken using in-depth interviews, literature studies, and documentation studies. This research uses Paulo Freire's theory of critical consciousness and Albert Bandura's *self-efficacy* to analyze the findings. Based on the results of the study, it was shown that the problem-posing education implemented by the union in the advocacy and education had not maximally raised the critical consciousness of women workers. External factors influence the internal factors – *self-efficacy* in women workers, which causes them to not be fully in the critical consciousness stage. These external factors include workload and intimidation from the company, work status, and lack of support from the government.

Keywords: *Women Workers, FSBPI, Maternity Rights, Critical Consciousness, Self-efficacy*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi buruh perempuan yang masih mengalami pelanggaran hak maternitas di tempat kerja, walaupun sudah ada undang – undang ketenagakerjaan yang mengatur hak maternitas buruh perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesadaran kritis buruh perempuan sebagai anggota serikat pekerja dalam memperjuangkan hak maternitasnya dan peran serikat pekerja FSBPI dalam meningkatkan kesadaran kritis anggota buruh perempuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kesadaran kritis Paulo Freire dan *self-efficacy* Albert Bandura untuk menganalisis hasil temuan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan hadap masalah yang diterapkan serikat dalam bidang advokasi dan pendidikan belum secara maksimal memunculkan kesadaran kritis buruh perempuan. Terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal yakni *self-efficacy* pada diri buruh perempuan, yang menyebabkan buruh perempuan belum sepenuhnya berada dalam tahap kesadaran kritis. Faktor eksternal tersebut antara lain Tingginya beban kerja dan intimidasi dari perusahaan, status kerja, serta kurangnya dukungan dari pemerintah.

Kata Kunci: *Buruh Perempuan, FSBPI, Hak Maternitas, Kesadaran Kritis, Self-efficacy*

PENDAHULUAN

Industri tekstil atau garmen selalu dikaitkan dengan perempuan, karena perempuan dianggap lebih terampil daripada laki – laki. Oleh karena itu perusahaan garmen selalu identik dengan citra buruh perempuan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap buruh perempuan. Perempuan dapat mengembangkan kemandiriannya dalam bidang ekonomi dan perempuan bisa terlepas dari stereotip pekerjaan domestik. Tetapi keikutsertaan perempuan dalam dunia industri tentu memiliki berbagai hambatan. Perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi perempuan di tempat kerja seperti mata rantai yang tidak pernah terputus. Melihat pentingnya sebuah payung hukum untuk pekerja perempuan, pada masa Orde Baru disahkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur tentang hak maternitas dan perlindungan pekerja perempuan (Indraswari dan Yulifar, 2019). Lalu pada 2003 peraturan mengenai hak dan perlindungan buruh perempuan dituangkan dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam undang – undang ketenagakerjaan, terdapat pasal yang secara khusus mengatur tentang hak buruh perempuan pasal 76, 77, 81, 82, dan 153. Hak – hak yang wajib diterima buruh perempuan di tempat kerja antara lain pembatasan aktivitas dan waktu kerja bagi buruh yang sedang hamil, hak memperoleh jaminan keamanan dan konsumsi bagi buruh perempuan yang bekerja pada tengah malam hingga pagi, hak untuk mendapat cuti maternitas seperti cuti pada hari pertama dan kedua haid/menstruasi, cuti hamil, cuti melahirkan, atau cuti keguguran tanpa di PHK serta hak untuk menyusui pada saat bekerja. Tetapi adanya undang – undang tersebut belum cukup melindungi buruh perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kasus pelanggaran hak maternitas buruh perempuan serta didukung oleh data dari komnas perempuan. Di KBN Cakung maraknya kasus pelanggaran hak maternitas ditunjukkan oleh hasil kajian dari Perempuan Mahardhika pada tahun 2017. Berdasarkan hasil dari penelitian pada 118 pekerja perempuan yang pernah dan sedang hamil, 74 orang mendapat perlakuan khusus saat hamil dan 44 orang diperlakukan sama seperti tidak hamil. Adapun kasus

pekerja perempuan yang melahirkan, mereka tidak mendapat libur full selama 3 bulan setelah melahirkan sesuai yang tertuang dalam undang – undang, sebanyak 20,4% pekerja perempuan tidak mendapat cuti melahirkan, kemudian 2,1% pekerja perempuan mendapat cuti melahirkan kurang dari 3 bulan dan 77,5% pekerja perempuan mendapat cuti melahirkan selama 3 bulan. Terapat temuan bahwa pekerja perempuan yang melakukan cuti saat melahirkan tidak mendapat upah secara penuh seperti saat mereka bekerja.

Diskriminasi yang dialami oleh perempuan khususnya ditempat kerja terjadi karena budaya patriarki yang masih mengakar di Indonesia. Perempuan masih dianggap sebagai gender kedua yang kedudukannya dibawah laki – laki sehingga perempuan mengalami subordinasi (Aslamiah dan Pinem, 2020). Oleh karena kedudukan buruh yang lemah ini, maka buruh membutuhkan sebuah wadah untuk membangun kekuatan guna menyeimbangkan posisi buruh dengan perusahaan. Sebuah wadah yang dapat mengadvokasi kepentingan buruh adalah serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan peluang bagi buruh atau pekerja untuk berorganisasi dan menyuarakan kepentingannya. Sejak jaman penjajahan, serikat pekerja telah menjadi alat pergerakan kaum buruh untuk melawan penindasan (Cahyono dan DS, 2003).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Zuhaena (2016), persoalan diskriminasi buruh perempuan terletak pada sistem dan sumber daya manusia (SDM) dalam sektor buruh, perusahaan dan pemerintah yang tidak berwawasan gender. Sistem sosial yang tidak seimbang ini membuat buruh perempuan berada pada kondisi yang rentan mengalami penindasan. Oleh karena itu untuk menciptakan kesadaran kritis guna meminimalisir diskriminasi hak – hak buruh perempuan, maka perempuan membutuhkan sebuah sistem sosial yang berkeadilan gender dalam dunia industri agar dapat meminimalisir dan menghentikan diskriminasi gender dalam lingkup perburuhan. Sebagai langkah awal, peningkatan kesadaran kritis ini dapat dimulai melalui organisasi serikat pekerja. Tidak hanya sebagai anggota atau pengurus tetapi perempuan harus dapat masuk kedalam komite organisasi perburuhan agar dapat

terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan organisasi. Sehingga kedepannya buruh perempuan mempunyai kapasitas untuk menciptakan gerakan ketidakadilan di tempat kerja. Kajian ini berfokus pada peran serikat pekerja FSBPI dalam perlindungan hak pekerja perempuan. Sejak awal berdiri, FBLP (atau sekarang FSBPI) memfokuskan perhatiannya pada buruh perempuan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi FSBPI dalam menanamkan kesadaran kritis dan kesetaraan gender. FSBPI sebagai salah satu serikat yang konsisten mengangkat isu – isu buruh perempuan, menarik peneliti untuk mengetahui kesadaran kritis anggotanya khususnya anggota dari buruh perempuan mengenai hak maternitasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data pada penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, studi literatur dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada enam informan yang merupakan anggota dari serikat pekerja FSBPI dan pengurus serikat pekerja FSBPI. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti melalui studi literatur dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Mils dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Kritis Buruh Perempuan Sebagai Anggota Serikat Pekerja

Salah satu serikat kerja yang cukup besar di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung adalah Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI). Awal mula berdiri pada tanggal 5 Juni 2009, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) bernama Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP). Pendiriannya diprakasai oleh tiga orang perempuan, yaitu Jumisih, Dian Septi dan Atin. Pendirian serikat

pekerja FBLP pada waktu itu berangkat dari obrolan dan diskusi – diskusi sesama buruh terkait dengan kehidupan di pabrik, dari obrolan dan diskusi itu lah menjadi semangat para buruh untuk membentuk suatu serikat dan melakukan aksi. Basis serikatnya masih mencakup wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah. Lalu pada tanggal 15 November 2020, berdasarkan hasil kongres kedua FBLP resmi mengganti namanya menjadi FSBPI. Sejak awal berdiri, FSBPI tidak hanya fokus ke masalah umum perburuhan saja tetapi juga fokus mengangkat isu permasalahan buruh perempuan. Komitmen FSBPI untuk memperjuangkan kepentingan buruh perempuan dan meningkatkan kapasitas buruh perempuan telah tertuang dalam misi organisasi serikat pekerja FSBPI.

Buruh perempuan yang menjadi anggota basis FSBPI di beberapa PT di KBN Cakung mengungkapkan jika keikutsertaan buruh dalam serikat pekerja sangat penting dalam perjuangan hak – hak buruh. Posisi buruh yang sering mengalami penindasan dan tidak memiliki kuasa menjadi kendala ketika buruh melakukan tuntutan kepada pemilik modal. Bergabungnya buruh dalam organisasi serikat pekerja menjadi salah satu langkah buruh untuk memperoleh dukungan ketika buruh harus berhadapan dengan pemilik modal untuk memperjuangkan haknya. Informan buruh menganggap jika serikat pekerja lebih memahami permasalahan buruh dan hak – hak buruh yang telah diatur dalam hukum negara. Sehingga informan merasa bahwa keterlibatan serikat pekerja dalam kegiatan advokasi buruh membuat mereka merasa aman dan percaya diri.

Kondisi pelaksanaan hak maternitas di tempat informan bekerja belum berjalan dengan baik. Informan sebagai buruh perempuan masih sering mengalami hambatan dalam memperoleh haknya. Menurut informan hak maternitas yang masih sulit untuk diakses oleh buruh perempuan adalah hak maternitas yang mengharuskan buruh perempuan untuk cuti, seperti cuti haid, cuti kehamilan, cuti melahirkan atau cuti keguguran. Cuti haid yang menurut Undang – Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 81 berhak diberikan kepada buruh perempuan pada hari pertama dan kedua haid diubah dalam bentuk uang. Buruh

perempuan mendapatkan uang ganti cuti ketika haid setiap bulannya. Informan juga mengatakan jika sering mengalami hambatan ketika ingin mengambil cuti saat sedang sakit haid. Perusahaan sering tidak mengizinkan buruh perempuan untuk mengambil cuti terutama ketika target kerja tinggi. Akibatnya buruh perempuan harus tetap bekerja ketika sakit atau beristirahat sebentar di klinik yang disediakan oleh perusahaan, bagi buruh perempuan yang tidak bisa bekerja sama sekali memilih untuk meliburkan diri tanpa keterangan. Terkait dengan cuti maternitas yang lain, seperti cuti kehamilan, melahirkan dan atau keguguran buruh perempuan tidak mendapat jangka waktu cuti yang tetap seperti yang terlampir pada Undang – Undang Ketenagakerjaan pasal 82 ayat (1). Lamanya ketiga cuti tersebut tergantung dari surat rekomendasi dokter. Apabila dalam jangka waktu yang telah direkomendasikan dokter ternyata buruh perempuan belum mampu untuk bekerja maka buruh perempuan harus memperbaharui surat rekomendasi dokter dan menyerahkan kepada perusahaan. Walaupun sudah ada surat rekomendasi dokter, buruh perempuan terkadang mengalami desakan dari perusahaan untuk segera kembali bekerja. Ada pula buruh perempuan yang memaksakan diri untuk kembali bekerja agar tidak terkena amarah atasan.

Tidak semua perusahaan di KBN Cakung memiliki ruang laktasi yang memadai. Pengadaan ruang laktasi seringkali harus melalui proses negosiasi yang panjang dengan manajemen perusahaan. Tetapi tidak semua buruh perempuan bisa menikmati ruang laktasi. Terkadang ketika ingin mempergunakan hak maternitas tersebut, buruh perempuan sering mengalami hambatan pekerjaan, sehingga buruh perempuan memilih untuk tidak mempergunakan haknya dalam mempergunakan ruang laktasi. Tingginya beban kerja membuat buruh khususnya buruh perempuan bekerja dibawah tekanan dan mengesampingkan kepentingannya demi mencapai target. Apabila buruh tidak memenuhi target, mereka akan mendapat omelan dan intimidasi dari atasan. Hal ini menyebabkan buruh perempuan tidak bisa melakukan apa – apa. Padahal dalam undang – undang ketenagakerjaan pasal 83, buruh perempuan mempunyai hak untuk dapat dengan leluasa melakukan pompa

ASI. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, buruh perempuan yang masih menyusui tidak berikan toleransi untuk melakukan pompa ASI. Beberapa kasus pelanggaran hak – hak maternitas pada buruh perempuan yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan masih mempunyai kesempatan untuk mencurangi undang – undang yang berlaku. Hal ini menyebabkan kewajiban yang berhubungan dengan hak reproduksi berubah menjadi hal yang menakutkan bagi buruh perempuan, karena seringkali hal itu mempengaruhi kesempatan kerja buruh perempuan. Sehingga buruh perempuan kerap dihadapkan pada keputusan yang sulit antara mementingkan kesehatan atau kebutuhan ekonominya. Selain itu, buruh perempuan sebagai anggota serikat pekerja ketika dihadapkan dengan situasi pelanggaran belum sepenuhnya bertindak kritis. Contoh kasus sebelumnya menunjukkan bahwa apabila terjadi bentuk pelanggaran yang masih bisa ditolerir oleh mereka maka mereka akan mengalah dan melakukan penyesuaian dengan mengesampingkan kepentingan dirinya atau cara lain tanpa sepengetahuan perusahaan.

- **Faktor – Faktor yang Menyebabkan Buruh Perempuan Sebagai Anggota Serikat Pekerja Tidak Menggunakan Kesadaran Kritis untuk Memperjuangkan Hak Maternitasnya**

- a. **Tingginya Beban Kerja dan Intimidasi dari Pihak Perusahaan**

Perubahan bentuk hak maternitas seperti cuti haid menjadi diuangkan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mau mengalami hambatan dalam kegiatan dan jumlah produksi ketika buruh perempuan mengambil cuti. Perusahaan hanya mementingkan terpenuhinya target kerja tiap harinya. Besarnya beban kerja juga menyebabkan buruh perempuan tidak mendapatkan keleluasaan untuk mempergunakan haknya. Apabila buruh perempuan tidak memenuhi target kerja maka mereka akan mendapatkan omelan dan intimidasi dari atasan. Target pekerjaan, intimidasi dan ancaman dari pihak perusahaan menjadi alasan buruh perempuan tidak mau

mengambil hak nya. Adanya perbedaan kepentingan menjadi akar konflik antara perusahaan atau pemilik modal dengan buruh. Demi mendapatkan untung yang sebesar – besarnya tidak jarang perusahaan atau pemilik modal mengesampingkan hak – hak yang harus diperoleh oleh buruhnya agar tidak mengganggu proses produksinya. Intimidasi dari pihak perusahaan tidak hanya terjadi sehari – hari ketika bekerja, tetapi juga terjadi ketika buruh perempuan melakukan advokasi. Sehingga buruh perempuan banyak yang mundur dari proses advokasi tanpa sepengetahuan serikat pekerja karena mendapat ancaman atau iming – iming dari perusahaan.

b. Status Kerja

Tidak semua buruh perempuan sudah berstatus pekerja tetap, sebagian masih ada yang berstatus pekerja kontrak bahkan buruh harian lepas. Ketidakpastian status kerja mempengaruhi kondisi buruh karena seringkali perlakuan dan hak yang diterima oleh pekerja tetap dengan bukan pekerja yang berstatus tetap. Status kerja yang tidak tetap ini membuat buruh perempuan mengalami ketakutan ketika akan mempergunakan haknya karena berada dalam posisi rentan untuk diputus kontraknya. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa tidak sedikit buruh perempuan yang berstatus kerja kontrak yang diputus kontraknya ketika ia akan mengambil cuti maternitas. Biasanya buruh perempuan akan di iming – imingi akan dipanggil bekerja lagi ketika mereka sudah sehat. Tetapi itu hanya harapan palsu yang diberikan oleh perusahaan. Buruh perempuan tidak pernah dipanggil bekerja kembali. Ketidakpastian status kerja memberikan kesempatan perusahaan untuk mengintimidasi buruh dan membuat perusahaan dengan bebas melakukan pemutusan kontrak kerja.

c. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah

Negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan perusahaan seringkali tidak menemui hasil. Apabila hal ini terjadi maka proses negosiasi harus melibatkan pemerintah atau dinas terkait. Menurut informan, keterlibatan

pemerintah sebagai pihak ketiga dalam proses mediator belum maksimal karena pemerintah masih subjektif, tidak solutif dan cenderung masih berpihak kepada pemilik modal. Selain itu informan juga menuturkan jika pemerintah belum aktif melakukan sidak terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kasus pelanggaran di tempat kerja. Tidak adanya dukungan yang maksimal dari pemerintah sebagai pihak yang seharusnya lebih memiliki kuasa daripada pemilik modal membuat buruh khususnya buruh perempuan merasa semakin terpinggirkan.

2. Peran Serikat Pekerja untuk Meningkatkan Kesadaran Kritis Buruh

Perempuan dalam Upaya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Maternitas

Salah satu serikat kerja yang cukup besar di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung adalah Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI). Sejak awal berdiri, FSBPI tidak hanya fokus ke masalah umum perburuhan saja tetapi juga fokus mengangkat isu permasalahan buruh perempuan guna meningkatkan kesadaran kritis anggotanya khususnya perempuan. Wakil ketua nasional sekaligus pendiri serikat pekerja FBLP (Sekarang FBSPI), Jumisih, mengungkapkan jika alasan serikat pekerja memberikan perhatian khusus pada permasalahan buruh perempuan karena buruh perempuan berada dalam posisi rentan dan tidak bisa melawan penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal. Sehingga serikat pekerja mengupayakan untuk menyadarkan buruh perempuan sehingga buruh perempuan bisa melawan. Serikat pekerja saat ini masin didominasi oleh laki – laki, seringkali hal ini bisa mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam serikat pekerja dan kurang bisa menyuarakan kepentingannya karena menjadi minoritas serta tidak ada dukungan dari serikat pekerja untuk mensejahterakan buruh perempuan melalui pemenuhan hak maternitasnya. Sementara keberadaan serikat pekerja bertujuan untuk membela kepentingan buruh, oleh karena itu sebaiknya pendidikan gender harus melembaga di serikat pekerja agar agenda perburuhan di serikat pekerja dan

aksi – aksi pembelaan hak buruh bisa menyasar kepada kepentingan semua gender.

Berdasarkan hasil temuan, terdapat dua peran serikat pekerja FSBPI yang digunakan untuk membangun kesadaran kritis dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak maternitas buruh perempuan yaitu peran advokasi dan peran pendidikan.

- **Peran Advokasi**

Sudah menjadi tugas wajib serikat pekerja untuk melaksanakan peran advokasi dalam memperjuangkan hak – hak buruh. Peran advokasi FSBPI telah tertuang dalam Anggaran Dasar visi dan misi serikat FSBPI. Sebagaimana tertulis dalam misi FSBPI, terdapat dua bentuk perjuangan hak – hak perburuhan, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah cara advokasi serikat buruh terkait kepentingan buruh melalui jalur hukum. Sedangkan non-litigasi adalah cara advokasi serikat buruh terkait dengan kepentingan buruh melalui jalur non-hukum seperti konferensi pers, unjuk rasa, mogok kerja dan lain sebagainya. Jika terjadi kasus pelanggaran hak buruh, serikat pekerja akan mengumpulkan data kronologi dan saksi. Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul, maka akan dilakukan mediasi bipartit ataupun tripartit. Serikat FSBPI cukup transparan terkait penyelesaian kasus pelanggaran hak perburuhan karena mereka melibatkan secara penuh korban dalam proses penyelesaian kasus. Selain itu, serikat pekerja juga aktif mengikutsertakan buruh perempuan dalam kegiatan non-litigasi. Seperti contoh aksi dan kampanye yang dilakukan dibawah ini.



Gambar 1.

Konsolidasi Buruh PT Amos Indah Indonesia Menolak Penerapan Sistem Harian Lepas (HL) dan Tuntutan Cuti Melahirkan 3 Bulan (Instagram: @marsinah.fm)



Gambar 2.

Aksi Bersama 16 HAKTP 2020 Di Depan Gedung DPR RI

Tujuan dilibatkannya buruh dalam setiap proses advokasi adalah agar buruh dapat ikut serta dalam proses perkembangan advokasi kasusnya, belajar melakukan advokasi agar kedepannya mereka bisa berani bersuara melakukan advokasi dan menumbuhkan semangat perjuangan. Sebelum melakukan advokasi, biasanya FSBPI juga memberikan pengetahuan mengenai advokasi melalui simulasi advokasi. Serikat pekerja FSBPI dalam hal ini tidak memposisikan dirinya sebagai “dewa penolong” atau “pemadam kebakaran”, dalam proses advokasi, buruh tetap memegang peran utama.

- **Peran Pendidikan**

Selain peran advokasi, FSBPI menjalankan peran pendidikan untuk memperjuangkan dan melindungi hak maternitas buruh perempuan. Peran pendidikan ini merupakan salah satu bentuk pencegahan agar buruh

perempuan paham mengenai hak nya dan memiliki kesadaran ketika hak nya dilanggar. Sehingga buruh perempuan dapat berani berbicara melakukan protes ataupun melakukan advokasi. Program pendidikan bagi buruh perempuan telah tertuang dalam misi organisasi FSBPI. Setiap anggota serikat wajib mendapatkan pendidikan, karena menurutnya dari pendidikan buruh perempuan bisa mendapatkan bekal untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di pabrik. Adanya pendidikan bertujuan agar buruh perempuan mempunyai kesadaran kolektif terkait haknya ditempat kerja. sehingga mereka diharapkan dapat ikut berkontribusi aktif memperjuangkan dan melindungi hak maternitasnya di tempat kerja. Secara garis besar pendidikan yang berikan tidak hanya membahas hak maternitas saja namun hampir disemua kegiatan pendidikan di FSBPI menyinggung mengenai hak maternitas, karena hak maternitas merupakan hak dasar yang dimiliki oleh buruh perempuan. Adapun kegiatan pendidikan yang turut membahas hak maternitas yang diselenggarakan oleh FSBPI antara lain Diskusi Hunian, Radio Marsinah.fm, Sekolah Buruh Perempuan, dan Posko Pembelaan Buruh Perempuan. Metode yang digunakan oleh serikat pekerja adalah metode diskusi. Diskusi yang dilakukan tidak hanya membahas suatu topik tetapi juga bisa membahas kasus yang sedang terjadi di tempat kerja. Diskusi dilakukan mulai dari lingkup terkecil seperti yang dilakukan di Diskusi Hunian. Apabila buruh perempuan sedang mengalami suatu permasalahan bisa melakukan pengaduan melalui Posko Pembelaan Buruh Perempuan. Selain menerima aduan, Posko Pembelaan Buruh Perempuan secara berkala mengadakan diskusi publik dan aksi kampanye. Serikat FSBPI juga mengadakan pendidikan formal bagi buruh perempuan, yaitu di Sekolah Buruh Perempuan. Materi yang disampaikan di Sekolah Buruh Perempuan meliputi materi tentang pendidikan organisasi, industri garmen, gender, kekerasan berbasis gender, dan perempuan dalam dunia kerja. Materi tersebut sudah tertuang dalam modul Sekolah Buruh Perempuan.

FSBPI juga memiliki radio komunitas yang bernama Marsinah.fm. Radio komunitas ini berfungsi sebagai sumber informasi dan kampanye agenda perburuhan.

Secara garis besar, model pendidikan yang diselenggarakan oleh FSBPI adalah personal persuasif. Model personal persuasif menuntut buruh perempuan untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Buruh perempuan tidak hanya menjadi objek tetapi juga dapat terlibat sebagai subjek dalam kegiatan pendidikan. Sehingga buruh perempuan menjadi lebih terbuka dan berani untuk menyampaikan pendapat.

PEMBAHASAN

Kondisi perampasan hak maternitas buruh perempuan ini menurut Paulo Freire dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* disebut dengan dehumanisasi. Buruh perempuan sebagai kaum yang tertindas dieksploitasi tenaganya melalui kerja kejar target dan dirampas hak maternitas nya oleh penindas yaitu pemilik modal atau pihak perusahaan (Freire dan Ramos, 2000). Kondisi ini tercipta dari ketidakadilan, dimana pemilik modal merasa lebih dominan dalam proses industri, sedangkan buruh perempuan hanya sebagai penyedia jasa yang diupah oleh pemilik modal. Menurut Paulo Freire, hubungan antara penindas dan kaum yang tertindas merupakan hubungan yang sudah terpola. Kesadaran kaum tertindas secara otomatis mengikuti kesadaran kaum penindas. (Freire dan Eran, 2001). Kondisi ini ditunjukkan dengan kondisi buruh perempuan yang takut untuk melakukan protes ketika haknya tidak diberikan oleh pihak perusahaan. Buruh perempuan pasrah dan menerima iklim kerja yang sudah dilanggengkan oleh pihak perusahaan. Kondisi ini menurut Paulo Freire disebut adaptasi. Adaptasi mencerminkan kondisi manusia pada tahap yang paling rapuh serta merupakan gejala dehumanisasi. Buruh perempuan hanya melakukan adaptasi dengan lingkungan yang sudah dibentuk oleh kaum penindas dan tidak mau melakukan perubahan realitas.

FSBPI dalam meningkatkan kesadaran kritis buruh perempuan melakukan dua peran, yaitu peran advokasi dan peran pendidikan. Secara garis besar baik dalam

bidang pendidikan maupun advokasi, FSBPI membangun kesadaran kritis melalui model pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah adalah model pendidikan yang bisa membebaskan manusia dari penindasan (Freire dan Eran, 2001). Ciri – ciri model pendidikan ini adalah menempatkan kaum tertindas menjadi objek dan subjek pendidikan. Ciri ini terlihat dalam metode pendidikan FSBPI yang bersifat personal persuasive. Dimana buruh perempuan dibuat untuk komunikatif dan ambil bagian dalam kegiatan pendidikan FSBPI. Di bidang advokasi FSBPI melibatkan anggotanya untuk dapat terlibat dalam kegiatan advokasi baik litigasi maupun non-litigasi. Model pendidikan yang dianut oleh FSBPI ini bertujuan untuk memberikan kesempatan buruh perempuan untuk dapat berpikir kritis dalam dunianya, memahami arti perjuangan serta mampu melihat realitas sebagai sesuatu yang dapat diubah. Serikat pekerja FSBPI sebagai pihak yang memberdayakan tidak menjadikan dirinya sebagai pihak yang superior dan memaksa buruh perempuan untuk patuh terhadap peraturan dan keputusan yang mereka buat, tetapi mereka mengajak dan ‘merangkul’ buruh perempuan untuk melawan penindasan. Harapannya ketika buruh perempuan sudah mampu untuk menganalisis masalah di lingkungannya, berani untuk melakukan konfrontasi serta mampu untuk mengemukakan argumentasi maka buruh perempuan sudah ada dalam tahap kesadaran kritis.

Di beberapa kasus, buruh perempuan sebagai anggota serikat belum cukup kritis untuk menghadapi situasi pelanggaran hak maternitas yang dialaminya. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kasus pelanggaran hak maternitas, seperti cuti haid yang diuangkan, sulitnya mendapat libur cuti haid, tidak diberikan keleluasaan untuk memompa ASI, dan di PHK akan atau ketika cuti maternitas. Buruh perempuan menyadari jika hak nya tidak dapat terpenuhi dengan baik tetapi mereka hanya pasrah dan patuh kepada keputusan perusahaan. Kondisi ini menempatkan buruh perempuan pada kesadaran naif. Buruh perempuan hanya menyesuaikan dengan realitas dan tidak melakukan perlawanan. Dapat disimpulkan jika pendidikan dan pengetahuan yang diberikan oleh serikat pekerja belum bisa membuat buruh perempuan berada dalam kesadaran kritis.

Jika dilihat dari kacamata teori *social learning* Albert Bandura (1977), kegiatan pendidikan yang diberikan oleh serikat pekerja menjadi sarana bagi buruh perempuan untuk *modeling* atau mengamati perilaku orang lain dalam hal ini adalah perilaku organisasi serikat buruh terutama perilaku yang berhubungan perjuangan hak maternitas. Pembelajaran sosial yang diperoleh buruh perempuan berfungsi sebagai sumber informasi dan motivasi. Melalui pembelajaran sosial, buruh perempuan akan dapat menganalisis tindakan dan akan mengetahui secara langsung dampak negatif dan positif dari tindakan organisasi, sehingga buruh perempuan bisa meniru dan melakukannya dikemudian hari sesuai dengan kemampuannya. Tiga aspek yang berkontribusi dalam pembelajaran sosial meliputi kognitif, perilaku dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut yang memiliki pengaruh yang kuat adalah aspek kognitif. Salah satu aspek kognitif yang mempengaruhi tindakan individu adalah *self-efficacy* (keyakinan diri). *Self-efficacy* atau keyakinan diri membuat individu berani untuk mengambil keputusan dan bertindak. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dijelaskan juga *self-efficacy* pada diri buruh perempuan dan dampaknya (Bandura, 1997).

Keterlibatan serikat pekerja tidak menjadi tolak ukur timbulnya berkurangnya pelanggaran hak maternitas di tempat kerja. Serikat pekerja tidak bisa terus menerus memantau dan mendampingi buruh. Faktor yang juga mempunyai pengaruh besar dalam terpenuhinya hak maternitas buruh perempuan di tempat kerja adalah aspek diri buruh perempuan dalam hal ini adalah faktor *self-efficacy* atau keyakinan buruh perempuan untuk bertindak. Contoh kasus yang sudah disebutkan pada sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa ketika buruh perempuan mengalami pelanggaran hak maternitas, mereka tidak bisa melawan dan hanya pasrah dengan keputusan manajemen perusahaan. Mereka takut akan mengalami intimidasi dan di putus kerja. Hal ini sesuai dengan indikator individu yang memiliki *self-efficacy* yang rendah dimana individu tersebut tidak berdaya, apatis, memiliki saspirasi yang rendah dan selalu memikirkan kegagalan. Keyakinan diri yang rendah membuat buruh perempuan tidak berdaya dan tidak bisa melakukan ‘tawar menawar’ dengan perusahaan. Kondisi ini membuat

perusahaan dengan mudah melakukan dominasi terhadap buruh perempuan. Lebih parahnya perusahaan dengan mudah membuat kebijakan dengan merubah sistem perlindungan hak maternitas buruh perempuan secara sepihak. Akibatnya mau tidak mau buruh perempuan menuruti kebijakan tersebut. *Self-efficacy* dengan ketiga faktor menghambat kesadaran kritis buruh perempuan saling berhubungan, seperti tingginya beban kerja dan intimidasi dari perusahaan, status kerja dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Faktor eksternal tersebut membawa pengaruh pada *self-efficacy* buruh perempuan, karena faktor – faktor tersebut mempengaruhi pembentukan kemampuan kognitif buruh perempuan. Faktor yang mempengaruhi *self-efficacy* menurut Bandura (1997) antara lain, pengalaman keberhasilan, pengalaman orang lain, persuasi verbal, serta kondisi fisik dan afektif.

PENUTUP

Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) merupakan salah satu serikat pekerja yang basisnya berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur. Pada awal berdiri yaitu pada tanggal 5 Juni 2009, FSBPI masih bernama FBLP (Federasi Buruh Lintas Pabrik). Pergantian nama dari FBLP menjadi FSBPI terjadi pada tahun 2020 berdasarkan hasil kongres persatuan. Kongres persatuan tersebut melibatkan beberapa serikat pekerja dari berbagai daerah yang bersepakat untuk bersatu. Sejak awal berdiri, anggota serikat mayoritas adalah buruh perempuan. Komposisi gender dalam kepengurusan juga didominasi oleh perempuan. Selain fokus pada isu perburuhan secara umum, seperti isu jam kerja atau gaji, serikat pekerja FSBPI juga fokus kepada isu buruh perempuan salah satunya yaitu hak maternitas.

Hak maternitas merupakan hak dasar pada buruh perempuan sudah tertuang dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomer 13 Tahun 2003 dan Konvensi ILO nomer 183. Walaupun sudah ada undang – undang nasional dan internasional yang berlaku, itu tidak menjamin terpenuhinya hak maternitas buruh perempuan di tempat kerja. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pemberitaan tentang kasus pelanggaran hak maternitas. Kondisi kerentanan buruh perempuan ini menjadi alasan

bagi serikat pekerja FSBPI untuk meningkatkan kesadaran kritis buruh perempuan khususnya mengenai hak maternitasnya. Peran yang dilakukan serikat pekerja FSBPI yaitu melalui peran pendidikan dan peran advokasi.

- Peran Pendidikan

Dibidang pendidikan, serikat pekerja FSBPI memberikan peluang kepada buruh perempuan untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan seperti dikusi hunian, Sekolah Buruh Perempuan (SBP), Marsinah.fm, dan Posko Pembelaan Buruh Perempuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pendidikan di FSBPI adalah metode personal persuasif.

- Peran Advokasi

Serikat pekerja FSBPI berkomitmen untuk melibatkan anggotanya dalam setiap advokasi, baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi.

Baik advokasi maupun pendidikan, keduanya sama – sama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membangun kesadaran kritis pada buruh perempuan, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas buruh perempuan, serta mendorong buruh perempuan untuk bisa melawan penindasan.

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak buruh perempuan anggota serikat pekerja FSBPI yang belum mendapatkan haknya dengan baik. Tingginya beban kerja dan intimidasi dari perusahaan, status kerja dan kurangnya dukungan pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan perlindungan hak maternitas buruh perempuan. Faktor tersebut membuat perempuan sulit untuk mengakses haknya dan tidak berani untuk melakukan perlawanan. Hal ini menempatkan buruh perempuan dalam kondisi kesadaran naif, dimana buruh perempuan mengetahui bahwa haknya tidak dapat terpenuhi tetapi mereka tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya mengikuti kebijakan dari perusahaan. Pendidikan dan pengalaman yang diberikan oleh serikat pekerja untuk menumbuhkan kesadaran kritis pada buruh perempuan belum berhasil secara maksimal. Faktor eksternal mempengaruhi faktor kognitif buruh perempuan, khususnya *self-efficacy* (keyakinan diri) buruh perempuan. Faktor

eksternal tersebut antara lain tingginya beban kerja dan intimidasi dari perusahaan, status kerja dan kurangnya dukungan dari pemerintah. *Self-efficacy* yang rendah menyebabkan kesadaran kritis buruh perempuan tidak muncul. Sehingga buruh perempuan masih terperangkap dalam kesadaran naif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia.
- Bandura, A. 1977. *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Bandura, A. 1997. *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H Freeman and Company
- Cahyono, E., DS, Soegiri. 2003. *Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Federasi Buruh Lintas Pabrik. 2017. *Modul Sekolah Buruh Perempuan*. Jakarta: Federasi Buruh Lintas Pabrik.
- Freire, P. 1967. *Educacao Como Pratica Da Liberdade*. Terjemahan Martin Eran. 2001. *Pendidikan yang Membebaskan*. Cetakan 1. Jakarta: Media Lintas Batas.
- Freire, P. 1993. *Pedagogia del Oprimido*. Terjemahan oleh Myra Bergman Ramos. 2000. *Pedagogy of the Oppressed: 30th Anniversary Edition*. New York: Continuum.
- Indraswari, G.F., Yulifar, L. 2018. Surastri Karma Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954. *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7(1): 67 – 78.

- Perempuan Mahardhika. 2017. *Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak Maternitas pada Buruh Gramen: Kajian Kekerasan Berbasis Gender di KBN Cakung*. Jakarta: Perempuan Mahardhika.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *Ketenagakerjaan*. 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.
- Zuhaena, F. 2016. Keterwakilan Perempuan dalam Serikat Buruh. *Prosiding Seminar Nasional Sustainable Competitive Advantage* 6(1). Universitas Jendral Soedirman: 65 -79.

MEMBANGUN NILAI-NILAI INTEGRITAS SERTA IDENTITAS NASIONAL DILIHAT DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN

Ais Fadila

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Abstract: *The qualities of uprightness and public character of Indonesia today are confronting not kidding difficulties from both outer and inward impacts, and these qualities tend to be disintegrated and corrupted. In a setting like this, the universe of training, including instructors plays an essential part in keeping up with and fostering the qualities of respectability and public character, since schooling has the capacity of enculturation and socialization of qualities to understudies so they can assemble themselves and along with their current circumstance fabricate society and country. Hence, it is important to foster another worldview of training that can keep up with these qualities to develop and grow appropriately, and corresponding to educators, it is important to have proficient instructors who have far reaching ability.*

Keywords: *Value of Integrity, National Identity, Education*

Abstrak: Kualitas integritas dan karakter publik Indonesia saat ini tidak main-main menghadapi kesulitan baik dari dampak luar maupun dalam, dan kualitas-kualitas ini cenderung hancur dan rusak. Dalam suasana seperti ini, alam semesta pelatihan, termasuk instruktur memainkan peran penting dalam menjaga dan membina kualitas kehormatan dan karakter publik, karena sekolah memiliki kapasitas enkulturasi dan sosialisasi kualitas kepada siswa sehingga mereka dapat berkumpul sendiri dan bersama dengan keadaan mereka saat ini membentuk masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan pandangan dunia lain tentang pelatihan yang dapat mengikuti kualitas-kualitas tersebut untuk berkembang dan tumbuh dengan baik, dan sesuai dengan pendidik, penting untuk memiliki instruktur yang mahir yang memiliki kemampuan jangkauan jauh.

Kata Kunci : *Nilai Integritas, Identitas Nasional, Pendidikan*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara alami diperkenalkan ke dunia darisiklus otentik yang panjang. Berawal dari zaman kerajaan, zaman ekspansionisme, kesadaran semangat patriotisme yang dimulai pada tahun 1908 (Boedi Oetomo), Sumpah Remaja (1928), dan sampai pada puncaknya pada Ketetapan Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah panjang perjuangan negara telah melahirkan visi publik dalam struktur negara negara yang bergantung pada perasaan tekad bersama dan dorongan kuat untuk mencapai tujuan

bersama dalam jalinan tujuan publik seperti yang diungkapkan dalam Pendahuluan UUD 1945, khususnya menjamin segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mendorong bantuan pemerintah secara keseluruhan dan pembinaan perseorangan. kehidupan negara, dan mengambil bagian dalam menyelesaikan permintaan dunia tergantung pada harmoni abadi.

Sebagai sebuah negara ekspres yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan, tidak diragukan lagi bahwa masyarakat dan negara Indonesia benar-benar memiliki kualitas kehormatan dan kepribadian publik yang luar biasa kokoh. Bahkan kualitas kejujuran dan kualitas kepribadian negara secara cerdas oleh para arsitek utama (penulis negara negara), diangkat dan dipadatkan ke dalam premis negara Pancasila. Pancasila diamini dengan alasan bahwa ia dapat memenuhi keragaman negara. Pancasila dikandung karena lahir dari pemikiran-pemikiran baik dunia dan menyuarakan kepentingan-kepentingan harga diri manusia, pemerataan, dan pentingnya kesadaran berbangsa serta negara. Pancasila dijadikan sebagai cita-cita berbangsa dan bernegara dengan alasan bahwa menempatkan eksistensi keragaman yang sarat dengan ketahanan. Saat ini sudah lama sejak Indonesia merdeka. Dunia berubah begitu cepat dan kuat, dipisahkan oleh keresahan dalam inovasi data dan korespondensi yang mempengaruhi perubahan sosial yang fenomenal, mengingat permintaan kehidupan antar negara dan goyahnya kualitas dan masyarakat. Alvin Tofler, seorang futurolog terkenal menggunakan istilah "future shock" untuk menggambarkan kondisi aliran yang membawa kita ke dalam keadaan di mana kita mengalami ketegangan yang sangat besar dan ketiadaan jalur individu karena kita dihadapkan dengan terlalu banyak perubahan jadwal yang terlalu lama. Itulah yang sedang terjadi dialami oleh masyarakat dan negara Republik Indonesia. Kebetulan, kita bereaksi secara bertahap terhadap ruang lingkup yang sangat besar dan perubahan yang cepat (Soyomuktii, 2008 : 41). Realitas mendunia yang kemudian dikenal dengan istilah "globalisasi" suka suka atau tidak suka ini perlu kita hadapi dengan alasan kita tidak bisa lepas dari arus globalisasi yang begitu deras. Globalisasi merupakan standar yang secara masif mempengaruhi ruang serta waktu yang semakin

cepat atau terjadi dalam bahasa Anthony Giddens – distenziasi ruang waktu. Jelaslah, pergaulan manusia dengan inovasi, orang dengan orang yang berbeda, semakin serius: implikasi baru didapat dari objektivitas, baik yang bijaksana maupun yang konyol mengingat kemajuan jalur material, ilmu pengetahuan dan inovasi, yang terus berkembang (Soyomukti, 2008: 43).

Bagaimana ini bisa menjadi perubahan besar dan cepat terkait dengan kualitas kepercayaan dan karakter publik Indonesia? Kemudian, pada saat itu, bagaimana kita harus menghadapi dan bereaksi, adalah masalah kita yang tidak dapat dihindari hari ini. Yang jelas, seperti yang diungkapkan oleh Sztompka (2007:112), globalisasi menghadirkan risiko dan harapan. Arah globalisasi yang mencakup semua bagian kehidupan masa kini (keuangan, politik, dan sosial) tercermin dalam perhatian penuh persahabatan. Cara individu melihat dunia, dunia lingkungan mereka sendiri dan dunia secara keseluruhan, sedang mengalami perubahan yang signifikan.

Keunikan perkembangan nonkonformis yang meluas, perang psikologis, kekacauan, pemerintahan mayoritas yang tidak terkendali, kemerdekaan yang disalahartikan mungkin merupakan tanda bahwa kualitas gabungan kita sebagai sebuah negara sedang diadili. Sementara cara hidup rakus, realis, dan wirausahawan telah memberdayakan perilaku yang merosot, melegitimasi segala cara, jauh dari keterusterangan dan keaslian, itu mungkin merupakan indikasi bahwa atribut dan kualitas (karakter) publik kita mulai goyah dan mengalami pengalaman yang mendalam kehancuran.

METODE

Strategi eksplorasi menggunakan metodologi subjektif dan grafis. Pemeriksaan subyektif adalah gerakan pemikiran yang tepat untuk melacak kenyataan dengan tujuan akhir untuk mengatasi masalah eksplorasi dengan terus-menerus menggunakan latihan permintaan normal, untuk mencari kepastian logis yang teratur. Kajian diarahkan menggunakan konsentrasi pada masalah-masalah penelitian dengan mengacu pada berbagai sumber tulisan dan kekhasan sosial yang terjadi di mata masyarakat. Sumber

tulisan yang digunakan dalam ulasan ini diperoleh dari buku, buku harian, web, dan hasil penelitian sebelumnya. Spesialis dalam menggali data bukan dari individu sebagai aset people, melainkan memperoleh data dari arsip. Laporan diharapkan dapat menganalisis luar dan dalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepastian dan bukti suatu kejadian (Al Muchtar, 2015: 3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Kehormatan dan Karakter Publik

Dalam referensi *Word Sosciology and Rekted Sciences* dinyatakan bahwa nilai merupakan kapasitas yang diakui untuk ada dalam suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apresiasi adalah gagasan tentang sesuatu yang asli dan ilmiah. Didalam kehidupan bermasyarakat sebagai manusia, nilai dimanfaatkan sebagai premis, alasan/motivasi dalam bertindak serta bertindak, yang diengaja maupun tidak. Esteem tidak setara dengan realitas dimana realitas harus terlihat melalui penilaian uji coba, sedangkan esteem adalah dinamis yang harus dirasakan, direnungkan, dipahami, dan ditempati orang. Nilai juga berhubungan dengan keyakinan, keyakinan, keinginan, dan sebagai hasil dari sesuatu refleksi batin (batin) manusia (Kaelan, 2001:179). Rasa percaya diri dapat diartikan sebagai asosiasi dari beberapa pertemuan yang tergabung menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan dan norma yang sama (Andisuhandi, 2008). Dalam hukum di seluruh dunia, setiap negara berdaulat memiliki kesusilaan lokal, menunjukkan bahwa ruang negara itu tidak dapat diuji oleh negara alternatif. Setiap negara berdaulat memiliki hak penuh untuk menuntut agar negara asing tidak berusaha mengabaikan kekuasaannya, baik dalam bidang nilai, militer, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan public person secara etimologis berasal dari kata "character" dan "publik".

Kata kepribadian (bahasa Inggris: character) dalam arti yang sebenarnya mengandung arti suatu merek, tanda atau watak yang dihubungkan dengan individu, kumpulan atau benda sehingga dikenali dari orang lain. Dengan cara ini, kepribadian menyiratkan atribut, tanda atau karakter individu, perkumpulan, daerah setempat dan secara mengejutkan suatu negara dengan tujuan agar kepribadian dapat mengenalinya

dari orang lain. Kata publik menyinggung gagasan tentang etnisitas. Publik menyinggung tandan yang lebih besar dari sekedar pengelompokan yang bergantung pada ras, agama, budaya, bahasa, dll. Dengan cara ini, kepribadian publik lebih menyinggung karakter negara dari perspektif politik (solidaritas politik).

1. Area Rekonsiliasi Publik

Dengan asumsi kami menyelidiki, ada beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong dan pendukung untuk koordinasi publik:

- 1) Wilayah sosial-sosial Bagi masyarakat Indonesia, wilayah sosial merupakan wilayah fundamental dalam memperluas rekonsiliasi publik. Pada umumnya ada unsur-unsur penting untuk penataan negara Indonesia, lebih spesifiknya:
 - Ada predeterminasi yang khas, khususnya bersama mendekam di bawah imperialisme asing selama hampir 350 tahun.
 - Ada keinginan khas untuk menjadi otonom, untuk melepaskan diri dari belenggu ekspansionisme. - Adanya satu kesatuan rumah khususnya nusantara yang terbentang dari sabang sampai merauke.
 - Ada tujuan bersama untuk mencapai kemajuan dan kesetaraan sebagai sebuah negara. Cara hidup negara yang sangat berbeda dengan berbagai tradisi, identitas, ras, dialek teritorial dan lain-lain juga merupakan kekayaan yang luar biasa, yang dapat dikelola dengan baik.
- 2) Bidang Keuangan. Masalah keuangan adalah bidang utama yang sangat sensitif. Banyaknya disparitas keuangan sampai dengan kebutuhan, pengangguran, dan sifat canggung modal adalah fokus lemah yang dapat merusak rekonsiliasi publik. Gangguan sosial yang muncul di arena publik sering kali dipicu oleh keinginan sosial yang meluas dan mengarah pada peningkatan politik yang secara efektif diserbu.
- 3) Bidang Politik. Kemajuan politik bangsa mengalami titik tinggi dan titik rendah yang dinamis. Bersamaan dengan perubahan tahun 1998, kehidupan politik Indonesia telah mengalami lompatan yang sering membuat kita tidak siap untuk menjalankan mayoritas aturan pemerintahan yang bergantung pada moral

politik. Kehebohan politik telah melahirkan pejabat-pejabat pemerintah yang seringkali hanya mementingkan kepentingan arisan, arisan, bahkan orang-orang yang jauh dari kepentingan negara dan negara. Bisa jadi kita telah melahirkan legislator, namun legislator tak berdaya.

- 4) Keamanan Wilayah Faktor keamanan sangat vital untuk menjaga kemantapan negara dan negara. Bangsa yang sama juga menjadi salah satu elemen yang dipertimbangkan oleh para penyandang dana untuk memasukkan sumber daya ke Indonesia. Strategi taktis yang menjaga kualitas dan berdiri di atas kepentingan daerah, negara dan negara adalah keputusan yang ideal untuk terus diwujudkan oleh permintaan kesempatan.

2. Jenis-Jenis Ikatan Masyarakat

Beberapa jenis kepribadian masyarakat Indonesia wajib dipertahankan serta meningkatkannya yakni sebagai berikut:

- 1) Bahasa umum atau bahasa solidaritas, lebih tepatnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa yang paling banyak digunakan yang kemudian dianut sebagai bahasa solidaritas pada tanggal 28 Oktober 1928.
- 2) Cara berpikir dasar negara, khususnya Pancasila. Berisi lima sifat esensial yang menjadi dasar pemikiran dan falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan kepribadian masyarakat yang berkedudukan sebagai premis negara dan falsafah masyarakat Indonesia.
- 3) Himne Umum adalah Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai himne umum pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyanyikan secara menarik sebagai lagu devosi masyarakat.
- 4) Citra Publik, khususnya Garuda Pancasila. Garuda merupakan bird run of the mill of Indonesia yang dimanfaatkan sebagai citra negara.
- 5) Pepatah umum, khususnya Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna khas namun sekaligus satu. Menunjukkan bahwa negara

kita heterogen, namun sekaligus perlu menjadi satu negara, lebih tepatnya negara Indonesia.

- 6) Spanduk publik, tepatnya Merah Putih. Merah berarti berani dan putih berarti diberkati. Citra merah putih dikenal pada masa kejayaan di Indonesia yang kemudian dikukuhkan sebagai panji negara. Spanduk merah putih dikibarkan secara menarik pada 17 Agustus 1945, namun telah dipajang pada acara Janji Remaja.
- 7) Konstitusi (hukum dasar) negara, khususnya UUD 1945. Ini adalah hukum dasar yang tersusun yang memiliki tingkat paling tinggi dalam permintaan yang sah dan digunakan sebagai aturan untuk organisasi negara.
- 8) Jenis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkuasa atas perseorangan. Jenis negaranya adalah kesatuan, sedangkan jenis pemerintahannya adalah Republik. Kerangka politik yang digunakan adalah kerangka berbasis popularitas (individual sway).
- 9) 9) Awal Informasi Nusantara. Sebagai cara pandang manusia Indonesia terhadap dirinya dan keadaannya saat ini yang sebagian besar bersifat khas dan memiliki kualitas prinsip dengan menitikberatkan pada solidaritas dan kejujuran negara, solidaritas lokal dalam pelaksanaan aktivitas publik, sebagai negara, dan sebagai negara untuk mencapai tujuan publik.
- 10) Budaya lokal yang telah diakui sebagai budaya masyarakat. Masyarakat yang berbeda dari masyarakat umum Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat disenangi dan diakui oleh masyarakat yang lebih luas daerahnya adalah masyarakat umum. Budaya publik pada dasarnya adalah puncak dari budaya teritorial. Perkembangan dan pengesahan beberapa tokoh masyarakat Indonesia sebenarnya sudah dimulai dengan adanya perhatian politik terhadap negara Indonesia sebelum berubah menjadi negara. Ini sesuai dengan kualitas penataan model yang canggih. Kesadaran politik ini merupakan pengembangan jiwa patriotisme sebagai pembangunan melawan imperialisme dan pengakuan

negara Indonesia. Selanjutnya, patriotisme yang berkembang lebih jauh di dalam negeri Indonesia bekerja dengan penataan karakter nasional Indonesia.

Peranan Pendidikan

Tujuan utama sekolah yakni kemajuan karakter. Tugas sekolah ialah untuk memimpin orang di masa depan memiliki pilihan untuk merangkul masa depan mereka sendiri dan tidak menyangkal kapasitas mereka untuk mengelola inkonsistensi reguler yang terus berkembang. Dinas Persekolahan Umum merencanakan visi pelatihan publik, khususnya individu yang cerdas dan serius. Terkait dengan perluasan kualitas kejujuran dan kepribadian publik, jelas pengajaran memainkan peran yang sangat penting. Untuk situasi ini, tugas pengajaran harus dilihat menurut perspektif sekolah kasual, pelatihan formal, dan pengajaran non-formal.

sebuah.

a. Persyaratan untuk pandangan dunia lain tentang sekolah

Terlepas dari pergantian peristiwa yang cepat, UNESCO berusaha untuk memenuhi permintaan sosial sekolah dengan membuktikan kolom yang disarankan di bidang pelatihan, secara spesifik mencari tahu, belajar bagaimana, mencari tahu bagaimana menjadi, mencari tahu cara hidup masing-masing. Di Indonesia, kolom-kolom ini belum diotorisasi. Sejujurnya, aturan pengajaran sangat lengkap dan dengan asumsi itu sangat baik dapat diterapkan secara akurat dan andal, itu akan benar-benar ingin menjadi komponen yang selain mendominasi data dan informasi, juga memiliki rasa kewajiban dan kepedulian sosial yang tinggi (Suryomukti, 2008: 31).

b. Diperlukan sekolah dengan sudut pandang dunia. Peningkatan kualitas kejujuran dan karakter publik saat ini tidak dapat disangkal dari kondisi adegan yang berubah. Ada kecenderungan bahwa negara-negara di planet ini juga melakukan contoh penggabungan dunia dengan membentuk kemitraan dan perusahaan di seluruh dunia, misalnya: IMF, AFTA, ASEAN, EEC. Tentunya kita sebagai negara harus pandai-pandai mengatur dan memilih mana yang bisa menambah negara dan mana yang bisa melenyapkan kepentingan negara (publik). Mungkin ujian terberat kami

- dalam persaingan di seluruh dunia adalah kualitas (SDM) yang buruk. Kualitas SDM yang rendah juga memberikan keseriusan kita sebagai negara rendah.
- c. Sudut pandang ekologis sekolah diperlukan. Kita dapat melihat bahwa Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah ekologis yang intens. Penghancuran hutan yang ekstrim, kekhasan banjir dan longsor, dan perubahan suhu di seluruh dunia akan menjadi masalah yang signifikan bagi Indonesia dan dunia. Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia harus menunjukkan way of lifenya sebagai negara yang memuja iklim. Cara hidup kita sebagai sebuah negara tidak boleh tercerai-berai oleh perilaku tamak dengan illegal logging dan illegal logging.
- d. Pentingnya Pendidikan Moral dan Karakter Kita secara keseluruhan merasakan betapa isu etika dan karakter akhir-akhir ini sangat menghebohkan. Manifestasi dekonsistensi moral berkembang seiring dengan melemahnya ikatan moral di arena publik. Zuriyah (2007:10) mengatakan bahwa secara signifikan terlebih lagi di masa globalisasi di dunia yang terbuka, kewajiban kebajikan mulai melemahkan. Masyarakat sedang menghadapi kedaruratan yang berlapis-lapis, dan kedaruratan yang dirasakan sangat parah adalah kedaruratan kebajikan. Tidak kurang dari 4 (empat) pokok renungan mengapa pembentengan akhlak dan budi pekerti begitu penting: (1) Melemahnya ikatan kekeluargaan, keluarga yang pada umumnya merupakan pembina utama akhlak yang baik, mulai kehilangan kapasitasnya; (2) Pola negatif kehidupan dewasa muda saat ini. Keunikan perkuliahan siswa, masuknya narkoba, seks bebas, dan perilaku aneh lainnya adalah bukti bahwa keberadaan remaja kita sangat menegangkan; (3) Tidak adanya contoh yang baik di arena publik. Cara hidup pionir daerah yang akan cukup sering dekad, buruk, dan licik telah menambah rusaknya keutamaan dalam masyarakat dan (4) Keakraban dengan kecanggungan hidup antara kemajuan dan harmoni adalah dengan semua account mulai diakui oleh banyak negara.
- e. Pentingnya pelatihan multicultural
- Kecenderungan bahwasannya kita adalah negara yang majemuk/multikultur, dari segi agama, adat istiadat, kepribadian, bahasa daerah, maupun budaya daerah. Isu yang

mengganjal di Indonesia hingga saat ini adalah bentrokan dan disebabkan oleh multikultur yang lebih besar. Model aslinya adalah apa yang terjadi pada Mbah Priok di Jakarta, kemajuan perkumpulan-perkumpulan aneh di ranah publik, misalnya Pilkada di Mojokerto. Tentang Indonesia yang penuh dengan pluralisme, seperti yang ditunjukkan oleh Masa Asy'arie, persiapan multikultural menjadi penting untuk memiliki pilihan inovatif menonton varietas sehingga konflik muncul karena perubahan dan perubahan sosial. Kehadiran negara di masa depan. Seperti yang dikemukakan oleh Naim dan Sauqi (2008: 191) persiapan pluralis multikultural adalah dorongan yang menonjolkan metode yang paling dikenal luas untuk menumbuhkan cara hidup yang sadar, tulus, dan berpikiran terbuka menuju keragaman sosial yang hidup di antara populasi secara keseluruhan dengan level jelas. bagian yang lebih besar. Dengan sebagian besar sekolah multikultural, akan ada perhatian dan pemahaman yang luas yang muncul dalam watak yang halus, bukan orang yang kaku, membatasi dan menolak kehadiran berbagai afiliasi dan orang khusus, apa pun yang penting.

Peran Strategis Pendidik

Dalam membina kualitas amanah dan kepribadian masyarakat di era globalisasi, tugas pengajar (pendidik/pembicara) ternyata sangat vital. Pengajar sebagai poin dalam pelatihan dituntut untuk memiliki keterampilan menyeluruh yang meliputi: kemampuan akademik, kemampuan karakter, kemampuan sosial dan keterampilan ahli. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mery Field mengemukakan adanya tiga kebutuhan wajib dimiliki pendidik didalam menciptakan pengajaran yang berwawasan mendunia: kapasitas yang wajar, pengalaman yang beragam, dan kemampuan pendidikan. Kapasitas terapan khawatir tentang perluasan informasi pendidik berkaitan dengan isu-isu di seluruh dunia. Instruktur harus memiliki pengetahuan tentang masalah, elemen, sejarah, dan kualitas dunia sehingga mereka memiliki apa yang diperlukan untuk melihat nilai dalam persamaan dan perbedaan sosial di planet ini area lokal serta membuat lingkungan belajar yang unik sehingga siswa dapat bereaksi terhadap lingkungan. masalah sesuai dengan masalah di seluruh dunia. Kebutuhan berikut adalah pengalaman budaya yang beragam. Kebutuhan ini

tidak diklaim oleh banyak pendidik Indonesia. Di kalangan guru kondisinya masih lebih baik. Sementara itu, kebutuhan ketiga dari kemampuan instruktif dalam pandangan dunia menyangkut strategi pembelajaran yang tepat sehingga siswa dapat memahami suatu masalah dalam pengaturan yang luas dan menyeluruh. Berkenaan dengan pendidikan moral, seorang pengajar atau pendidik harus menjadi teladan, seperti halnya pelatih bagi siswa dalam mengakui kebajikan di sekolah dan kehidupan daerah. Untuk situasi ini, banyak pendidik dapat melakukan, misalnya, membuat lingkungan berbasis popularitas, menciptakan refleksi moral, menunjukkan kompromi dan jelas serta memunculkan budaya partisipasi (Zuriah, 2008:107-108).

Terkait pada pendidikan multikultur, Sarwiji (2010:19) mengungkapkan bahwasannya pendidik juga perlu secara konsisten berusaha untuk lebih mengembangkan kesepakatan siswa dan kemampuan relasional multifaset. Upaya ini meliputi memilih, memberi, dan menggunakan materi pertunjukan yang bergantung pada multikulturalisme. Penting untuk menjauhkan diri dari buku pendamping pelajaran memprofokasi terhadap perkembangan pertikaian yang menghebohkan, dan terlepas dari apa yang secara umum diharapkan, penting untuk memilih dan memanfaatkan bahan bacaan yang peka terhadap kualitas yang ketat, kualitas multikultural. Secara garis besar, Soeparno dan Kamdi (2009:14) menyarankan perlunya penyegaran informasi atau kapasitas pengajar di bidang studi. Jelas, informasi subjek Möfler sangat memengaruhi pelaksanaan pendidik, meskipun ini bukan satu-satunya variabel penentu. Demikian juga, instruktur wajib diperluas kategorisasi ilmiah tujuan pembelajaran. Kategorisasi Ilmiah Sprout yang menjelaskan hasil belajar ke dalam tiga ruang, khususnya: (1) Intelektual, (2) Sikap (berhasil), dan (3) Psikomotor.

Akhir-akhir ini, semakin dirasakan pentingnya membedah target pembelajaran menggunakan audit yang disusun berdasarkan kemampuan dasar, khususnya (1) kemampuan eksplisit (kemampuan eksplisit/kemampuan keras) dan (2) kemampuan konvensional (kemampuan noneksklusif/kemampuan halus) (Soeparno dan Kamdi, 2009:18). Selanjutnya, instruktur atau guru di zaman globalisasi ini tentunya dibutuhkan untuk memiliki kemampuan yang hebat dan luas, mengingat sulitnya

kehidupan yang tidak dapat disangkal. Instruktur dibutuhkan untuk menjadi spesialis kebebasan, perubahan seperti iluminasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari percakapan dan penggambaran di atas, cenderung diduga bahwa:

1. Dilihat dari segala aspek, masyarakat serta negara Indonesia telah memiliki nilai-nilai kejujuran dan kepribadian publik. Kualitas-kualitas ini dijalankan dalam keberadaan masyarakat, negara dan negara dan dikembangkan oleh pengalaman sejarah panjang pertempuran negara.
2. Di era globalisasi, kualitas kejujuran dan kepribadian masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan yang tidak main-main baik dari dampak luar maupun dalam, bidang-bidang penggabungan di bidang sosial-sosial, keuangan, politik dan keamanan secara teratur mengalami titik tinggi dan poin rendah sesuai dengan elemen publik dan di seluruh dunia. Kualitas karakter publik selama bertahun-tahun juga telah menghadapi disintegrasi dan korupsi yang nyata.
3. Tugas semesta pengajaran, termasuk guru, sangat vital dalam menjaga dan mengembangkan kualitas kejujuran dan kepribadian publik yang kita miliki. Akibatnya, pengajaran dengan sudut pandang globalisasi ekologis, moral dan multikultural dalam perjalanan pandangan dunia pelatihan yang baru benar-benar sangat penting. Terkait dengan tenaga pendidik, sangat diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan hebat dan jangkauan jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- C. Asri Budiningsih. 2008. *Pembelajaran Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwi Winarno. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, Abdul. (2016). Dinamika Integrasi Nasional Bangsa Indonesia (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama). *Jurnal Penelitian Ilmiah ISTIQRRA*, 4(2).
- Kaelan. 2001. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Ngainum

- Naim & Achmad Sauqi. 2008. *Pendidikan Kultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Soyomukti, Nurani. 2008. *Pendidikan Perspektif Globalisasi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Suwandi, Sarwiji. 2010. *Pemantapan Peran Bahasa Indonesia Sebagai Wahana Integrasi Bangsa Dalam Konteks Pendidikan Multikultural*. Surakarta: UNS Press.
- Suparno dan Waras Kamdi. 2009. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Malang: UM.
- Sztompka, Pior. 2002. *Teori Perubahan Sosial*. Jakarta: Renika Cipta.
- Widodo, Bali. (2019). Membangun Wawasan Kebangsaan yang Religius Demi Mewujudkan Integrasi Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(3), 13-24, Doi: 10.24269/jpk.v4.n3.2019.pp13-24.
- Zariah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksar.

**PERAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DALAM
MANAJEMEN BENCANA BANJIR DI DESA SIRNOBOYO KABUPATEN
PACITAN**

Mohamad Devic Pratama¹, Trisni Utami²
Universitas Sebelah Maret

ABSTRACT

The role of the community to be independent in disaster situations is the main goal in disaster risk reduction. The existence of knowledge about disasters and the ability to save themselves makes people no longer dependent on groups engaged in disaster. In an effort to make the people of Sirnobojo Village independent, the local village government in collaboration with local universities and BPBD formed a volunteer group for the Sirnobojo Disaster Risk Reduction Forum (FPRB) to help create a disaster-resilient community. As a theoretical basis in this research, the theory of social capital is used which then includes three main concepts, namely networks, norms, and trust which then as a whole, the results of research related to the role of FPRB are seen with these three concepts. In this study, a qualitative descriptive method was used to answer the role of FPRB in disaster management and creating a disaster-resilient community. From this study it was found that in creating a disaster-resilient community, the FPRB carried out socialization, simulation, physical and non-physical mitigation efforts during pre-disaster. Then during the emergency response, the evacuation process and the construction of public kitchens became the main focus, and after the disaster, the FPRB assisted in the reconstruction of public facilities as well as the rehabilitation of the psychological condition of the community. FPRB also uses local wisdom such as the use of recitation culture, mutual cooperation, river festivals as a medium of socialization. Then also the use of traditional kentongan tools as a means of communication. From the efforts carried out by the Sirnobojo FPRB, there are also supporting and inhibiting factors experienced by the Sirnobojo FPRB both from the internal and external sides of the community itself.

Keywords: Community, Disaster Management, Social Capital

ABSTRAK

Peran masyarakat untuk bisa mandiri dalam situasi bencana menjadi tujuan utama dalam pengurangan resiko bencana. Adanya pengetahuan mengenai kebencanaan dan kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri menjadikan masyarakat tidak akan bergantung lagi kepada kelompok-kelompok yang bergerak di bidang kebencanaan. Dalam upayanya memandirikan masyarakat Desa Sirnobojo, pemerintah desa setempat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat dan BPBD membentuk sebuah kelompok relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Sirnobojo untuk membantu menciptakan masyarakat tangguh bencana. Sebagai landasan teori dalam penelitian ini digunakan teori modal sosial yang kemudian mencakup tiga konsep utama yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan yang kemudian secara menyeluruh, hasil penelitian terkait peran FPRB dilihat dengan tiga konsep tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab bagaimana peran FPRB dalam manajemen bencana dan menciptakan masyarakat tangguh bencana. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam menciptakan masyarakat tangguh bencana FPRB melakukan upaya sosialisasi, simulasi, mitigasi fisik dan non fisik pada saat pra bencana. Kemudian ketika tanggap darurat proses evakuasi dan pembuatan dapur umum menjadi fokus utama, dan pasca bencana FPRB membantu proses rekonstruksi fasilitas umum dan juga rehabilitasi kondisi psikologis masyarakat. FPRB juga turut menggunakan kearifan lokal setempat seperti pemanfaatan budaya pengajian, gotong royong, festival sungai sebagai media sosialisasi. Kemudian juga penggunaan alat-alat tradisional kantong sebagai alat komunikasi. Dari upaya-upaya yang dilakukan FPRB Sirnobojo tersebut juga terdapat faktor pendukung maupun penghambat yang dialami oleh FPRB Sirnobojo baik dari sisi internal maupun eksternal komunitas itu sendiri.

Kata Kunci: Komunitas, Manajemen Bencana, Modal sosial

PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa yang menimbulkan berbagai kerusakan, mulai dari infrastruktur hingga gangguan psikologis. Di sini, bencana bisa disebut peristiwa yang mempengaruhi kelangsungan hidup umat manusia. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, bencana dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian dari sumbernya: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa di alam. Misalnya, angin topan, gempa bumi, tsunami. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa seperti wabah penyakit, wabah penyakit, atau rangkaian peristiwa non alam. Bencana ini disebabkan oleh campur tangan manusia. Hal ini berbeda dengan bencana sosial, yang merupakan rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia. Bencana sosial tersebut misalnya konflik dan terorisme antar kelompok atau masyarakat. (<https://jdih.kemenkeu.go.id> akan diakses 19:56 pada 5 Maret 2020).

Dilansir dari data BPBD Kabupaten Pacitan tahun 2019, Pacitan masih menjadi salah satu dari sekian banyaknya Kabupaten yang mempunyai banyak potensi bencana, mulai dari tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, gempa, kebakaran hutan, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, konflik sosial, hingga tsunami. Hal ini juga didukung dengan geografis wilayah Kabupaten Pacitan yang 86% wilayahnya adalah pegunungan karst yang disekitarnya masih banyak hutan yang rimbun dan di selatannya berbatasan langsung dengan samudra hindia. Selain itu wilayah Kabupaten Pacitan juga dipotong oleh satu aliran sungai besar di tengah kotanya, yaitu Sungai Grindulu yang mengalir dari ujung pegunungan hingga ke pantai selatan.

Desa Sirnobojo merupakan sebuah desa di Kabupaten Pacitan yang mana setiap tahunnya selalu mendapat langganan banjir. Wilayah Desa Sirnobojo sendiri meliputi 4 dusun dan terdiri dari 22 RT dan 4 RW. Menurut data yang diambil dari arsip desa sebagian besar wilayah desa Sirnobojo ini memang berada pada kawasan rawan bencana baik berupa banjir, gempa, kemungkinan tsunami, serta angin ribut atau puting beliung. Desa Sirnobojo merupakan kawasan rawan banjir yang berasal dari aliran sungai Grindulu di sebelah utara dan barat,

kemudian sungai Jelok di sebelah timur, serta adanya siklus lima tahunan akibat curah hujan yang sangat lebat selama kurang lebih 3-4 hari.

Banjir di Desa Sironoboyo yang terjadi semenjak tahun 1965 sampai terakhir tahun 2006 biasanya berasal dari arah utara, yaitu disebabkan oleh luapan sungai grindulu atau oleh putusnya tanggul sungai grindulu yang berada di desa sekitar Sironoboyo seperti desa Menadi, Desa Purworejo, dan Desa Banjarsari. Luapan air dan putusnya tanggul tersebut kemudian menyebabkan daerah aliran air terkena dampak utamanya seperti Desa Menadi, Arjowinangun, hingga Desa Sironoboyo sendiri. Atau juga adanya ancaman dari arah timur yaitu dari luapan aliran Kali Jelok desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung yang kemudian aliran ke selatannya mengancam desa Sironoboyo juga (arsip desa Sironoboyo,2012).

Melihat maraknya banjir yang terjadi, kemudian peristiwa tersebut menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih siaga terhadap bencana dan Pemerintah desa Sironoboyo untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang lebih baik dengan menyusun kebijakan dalam mitigasi bencana. Kemudian mengutip dari arsip Pengembangan Desa Tangguh Bencana Sironoboyo tahun 2012, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya bencana tersebut Pemerintah Desa Sironoboyo bersama BPBD Pacitan kemudian memfasilitasi pembentukan wadah atau kelompok pengurangan resiko bencana yang kemudian disebut Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB).

Dengan terbentuknya Forum PRB yang terdiri dari berbagai macam unsur masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat secara mandiri menangani dan bersiap siaga terhadap ancama bencana yang dapat mencancam kehidupan warga. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui sejauh mana peran komunitas ini dalam manajemen bencana di Desa Sironoboyo Kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan bentuknya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Danim,2002;51).

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Moelong, 2000; 17)

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Sirnobojo itu sendiri, dan juga pihak pendukung utama yaitu, BPBD Kabupaten Pacitan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data bencana dari BPBD, dan profil Forum PRB, serta dokumentasi kegiatan Forum PRB

Validitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dimana Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan (Moelong, 2000; 248). Kemudian melakukan ketekunan pengamatan dimana meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2008; 272). Dan yang terakhir dengan triangulasi sumber yang digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Peran relawan PRB pada situasi ini terbagi menjadi 3 situasi, yaitu:

1. Pra bencana meliputi simulasi, pemberian pelatihan, dan penyuluhan, penyebaran informasi, terlibat di kegiatan dan mitigasi, dll
2. Saat bencana meliputi dapur umum, pengelolaan logistik, pertolongan pertama, SAR dan evakuasi, kaji cepat, pengelolaan posko, dll
3. Pasca bencana meliputi kajian pasca bencana, rekonstruksi, rehabilitasi ekonomi, dll

a. Pra Bencana

Dalam memulai serangkaian kegiatan mitigasi pra bencana tugas paling pertama dari Forum PRB adalah mendekatkan diri dan beradaptasi kepada masyarakat sehingga masyarakat Sirnobojo secara umum mengetahui eksistensi dari FPRB dan turut bisa membantu berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana.

Pada kasus ini Forum PRB menggunakan metode adaptasi yang cukup mudah diterima masyarakat yaitu dengan masuk melalui forum-forum RT seperti arisan, kegiatan PKK, kelompok pengajian, dan berbagai kegiatan pertemuan lain yang ada di Desa. Sehingga masyarakat secara perlahan mulai bisa menangkap tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi bencana dan penanganannya menjadi lebih terorganisir.

Dalam melakukan pendekatan tersebut, Forum PRB menerapkan strategi pendekatan dari Suharto, 1997 yang nantinya disebut dengan 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan) diawali dengan Pemungkinan. Pada tahap pemungkinan ini yang diharapkan dari pemberdayaan adalah dapat membuat masyarakat berkembang secara optimal dengan mengurangi sekat-sekat kultural maupun struktural yang menghambat. Pada kasus masyarakat desa Sirnobojo sekat-sekat struktural yang dapat menghambat dihilangkan dengan cara menghadirkan pemangku kepentingan menjadi bagian dari Forum PRB desa. Kemudian dari segi kultural sendiri Forum PRB melakukan pendekatan dengan cara masuk ke forum masyarakat seperti pengajian rutin, arisan, dan yang telah disebutkan tadi. Sehingga dengan memanfaatkan situasi tersebut maka masyarakat bisa

semakin dekat sembari menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya isu kebencanaan

Setelah melakukan adaptasi dengan metode pemungkinan pada masyarakat, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Forum PRB adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan tahap awal dari lanjutan pendekatan 5P, yaitu Penguatan (Suharto, 2017). Dalam metode pendekatan ini pemberdayaan yang dilakukan diharapkan mampu menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dan menunjang kemandirian mereka.

Sosialisasi kebencanaan ini biasa dilakukan beberapa bulan sekali. Diadakannya sosialisasi ini bertujuan agar warga semakin tahu tentang bahaya bencana dan sekaligus memberi pemahaman bagaimana langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Selain itu juga diberikan pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan bencana itu terjadi. Sehingga tujuan dari pengurangan resiko bencana itu dapat berjalan. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengundang beberapa perwakilan dari masyarakat dan juga tokoh masyarakat untuk kemudian diberikan ilmu pengetahuan mengenai kebencanaan.



Gambar 1.1 Sosialisasi yang difasilitatori oleh BPBD Kabupaten Pacitan

Kemudian untuk memperkuat pengetahuan masyarakat atas pengetahuan yang didapatkan dari sosialisasi tersebut, kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh Forum PRB untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana adalah melakukan simulasi bencana. Simulasi bencana yang dikerjakan oleh Forum PRB terbagi atas dua jenis, yaitu simulasi investigasi dan simulasi beheran.

Simulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan. Menurut Ahmadi, 2005 dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar menjelaskan bahwa simulasi (*simulation*) berarti tiruan atau suatu perbuatan yang bersifat pura-pura saja. Sebagai sebuah metode pembelajaran, simulasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menggambarkan keadaan sebenarnya.

Sedangkan Investigasi menurut KBBI berarti penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan mendapat jawaban atas pertanyaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Simulasi Investigasi ini dilakukan dengan cara mereplikasi situasi yang ketika terjadi bencana mulai pra bencana sampai pasca bencana, sehingga masyarakat mendapat gambaran untuk menghadapi bencana ketika bencana itu terjadi.

Kegiatan simulasi ini dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat baik dari anak-anak, orang dewasa, manula, dan lain sebagainya. Simulasi ini biasanya menggandeng pihak luar baik itu dari komunitas lain misalnya seperti rumah zakat, dari BPBD Kabupaten Pacitan, termasuk Pemerintah Desa Sirnobojo itu sendiri.

Menurut Wina Sanjaya, 2012 dalam bukunya Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan menjelaskan bahwa simulasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis yaitu sosiodrama, psikodrama, dan role playing. Sosiodrama merupakan metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial,

permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter dan lain sebagainya. Kemudian Psikodrama merupakan metode pembelajaran dengan bermainperan yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan- tekanan yang dialaminya. Lalu yang terakhir Role Playingpermainan peran adalah metodepembelajaran sebagai bagian dari metode simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual. Dalam proses pelajarannya metode ini mengutamakan pola permainan dalam bentuk dramatisasi. Dramatisasi dilakukan olehkelompoknya masing-masing dengan mekanisme pelaksanaan yang diarahkan guru untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Metode simulasi role playing inilah yang nantinya digunakan oleh Forum PRB dalam pendekatan penguatan kepada masyarakat.

Simulasi kebencanaan dibuat semirip mungkin dengan situasi bencana demi menambah pemahaman masyarakat dan menambah kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2018 di dusun ngemplak, dikutip dari website desa sirnobojo, simulasi dimulai dengan pemberian materi mengenai pentingnya menyelamatkan dokumen-dokumen berharga seperti KK, Akta Kelahiran, Ijazah, surat nikah, akta tanah, dan sebagainya. Kemudian dipertengahan materi salah satu anggota BPBD yang terlibat akan membunyikan sirine tanda bahaya yang mana disini dimaksudkan sebagai sistem peringatan dini sekaligus menandakan bahwa ancaman bencana sedang terjadi.

Terdengarnya suara sirine ini kemudian membuat suasana menjadi riuh. Kemudian terdengar suara sahut-sahutan bunyi HT antara BPBD, relawan PRB dan juga ORARI/RAPI untuk segera mengevakuasi masyarakat menuju ke tempat Evakuasi Akhir. Peserta simulasi kemudian berlarian

sambil membawa tas yang berisi dokumen-dokumen penting serta menggendong anak dibawah umur untuk segera menaiki kendaraan evakuasi. Suasana menjadi riuh ketika anak-anak dan orang tua panik untuk berebut tempat di kendaraan evakuasi. Setelah itu mereka diantar menuju tempat evakuasi akhir di atas jembatan JLS Sirnobojo sembari menunggu surutnya banjir. Setelah air surut dan dirasa aman, peserta kemudian dibawa menuju tempat evakuasi sementara sekaligus untuk menikmati hasil masakan dari tim dapur umum.



Gambar 1.2 Peserta menaiki mobil evakuasi dari BPBD

Kemudian yang kedua dilakukan simulasi bebaran yang mana simulasi bebaran ini juga mengundang seluruh elemen masyarakat dengan tujuan masyarakat bisa terbuka tentang bahaya bencana dan masyarakat bisa mengambil poin-poin penting yang diperlukan dalam menghadapi bencana.

Simulasi bebaran ini menggunakan cara sederhana yang dapat diambil nilainya oleh masyarakat, yaitu dengan melalui dialog. Jadi pada simulasi bebaran ini masyarakat yang berpartisipasi akan dibagi ke beberapa kelompok. Misalkan ada masyarakat yang memerankan tokoh kepala desa, ada yang berperan sebagai tokoh masyarakat seperti ketua RT atau Kepala Dusun, kemudian ada yang berperan sebagai tokoh pemuda dan juga berperan sebagai masyarakat itu sendiri.

Adanya pembagian peran tadi bertujuan untuk memecahkan konflik bersama-sama yang mana pada kasus ini masalah yang muncul adalah masalah kebencanaan. Maka setelah itu masyarakat yang berpartisipasi tadi berperan sesuai dengan tokoh yang ia perankan. Semisal ada perangkat desa yang memerankan masyarakat mengutarakan pendapatnya bahwa ketika situasi bencana terjadi kita harus fokus pada diri kita dan keselamatan masing-masing. Kemudian muncul pendapat lain dari orang yang memerankan tokoh masyarakat bahwa ketika situasi bencana kita harus saling membantu satu-sama lain.

Perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul inilah yang kemudian digunakan sebagai evaluasi dan juga pertimbangan dalam melakukan tindakan dalam situasi bencana. Yang mana dari sekian banyaknya dialog nantinya akan dicari jalan keluar bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Diakhir beberan kemudian tokoh masyarakat atau pak lurah menyampaikan kesimpulan tentang bagaimana bencana itu sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kebencanaan. Dengan adanya metode seperti ini tentunya masyarakat akan lebih mudah memahami nilai-nilai yang terkandung ketimbang jika mereka diajak untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau pembinaan secara formal yang belum tentu mereka pahami karena keterbatasan sumber daya manusia juga. Disinilah terlihat bahwa simulasi role playing ini terlihat efektif untuk dilakukan kepada masyarakat karena mereka mendapat gambaran langsung dari situasi sosial masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Untuk mendukung pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan, Forum PRB tidak lupa untuk memberikan penyuluhan terkait masalah lingkungan. Lingkungan mempunyai andil yang cukup besar terhadap potensi bencana yang akan datang. Ketidakhahaman masyarakat akan keterkaitan lingkungan dengan bencana akan menimbulkan dampak bencana yang semakin buruk. Oleh karena itu dilakukan penyuluhan terkait masalah lingkungan kepada masyarakat dengan harapan mereka bisa memahami bahwa lingkungan juga memiliki peran dalam situasi bencana.

Sosialisasi penyuluhan yang dilakukan di Desa Sirnobojo ini dimulai dari hal-hal paling kecil seperti permasalahan sampah. Sampah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya banjir. Awalnya penyuluhan ini dilakukan karena masih dijumpai sekelompok masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan baik itu di darat maupun di sungai. Selain itu juga sampah adanya sampah kiriman dimana adanya sampah-sampah yang hanyut dari daerah hulu sungai menyebabkan aliran sungai di daerah hilir menjadi terganggu.

Hal ini tentunya dapat menyebabkan tersumbatnya saluran-saluran air yang mana ketika hujan terjadi akan membuat air meluap dan membanjiri pemukiman-pemukiman disekitar. Selain itu sampah yang dibuang di air juga dapat menyebabkan terganggunya ekosistem sungai karena tercemarnya sungai yang menyebabkan makhluk hidup tidak bisa tinggal disitu. Apalagi masyarakat yang tinggal disekitar sungai tentu saja akan menerima dampaknya juga seperti tercemarnya air yang dikonsumsi dan dapat menyebabkan masalah pencernaan. Kemudian sampah yang basah juga bisa menjadi sarang jentik-jentik nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah maupun malaria.

Selain berbahaya bagi ekosistem air, sampah juga dapat mencemari tanah. Ketika tanah sudah tercemar, bakteri pengurai tanah bisa mati dan menyebabkan tanah tersebut tidak subur. Tidak suburnya tanah ini akan menyebabkan tanaman tidak bisa ditanam di tanah tersebut. Tanah yang tertumpuk oleh sampah juga akan menyebabkan nyamuk membuat sarang sehingga juga bisa menimbulkan malaria dan demam berdarah. Permasalahan sampah ini terjadi karena tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang baik. Disinilah kemudian pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan sampah ini diberikan demi terciptanya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Dengan dilakukannya penyuluhan terkait masalah lingkungan maka dibutuhkan aksi nyata oleh masyarakat. Disini aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sirnobojo adalah dengan melakukan kerja bakti terutama

dalam membersihkan sampah-sampah yang sudah menumpuk di darat maupun di sungai.

Kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang kerap dilakukan oleh masyarakat pedesaan dan menjadi salah satu bentuk dari gotong royong. Hal ini mereka lakukan untuk mempermudah langkah mereka dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Bersatunya masyarakat ini terjadi karena adanya ikatan batin yang kuat diantara mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ferdinand Tonnies dalam Soerjono Soekanto (2009:116) tentang paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*). Paguyuban (*gemeinschaft*) merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Didukung dengan permasalahan lingkungan dan potensi kebencanaan yang sama, maka ikatan masyarakat akan semakin menguat demi menyelesaikan masalah bersama tersebut.



Gambar 1.3 Masyarakat gotong royong membersihkan sampah di area sungai

Terakhir untuk langkah pencegahan non fisik, Forum PRB juga membuat stiker yang dipasang di setiap rumah. Stiker ini berisi petunjuk tentang peta evakuasi jikalau terjadi bencana dan bagaimana prosedur evakuasi itu sendiri. Adanya stiker ini akan membantu mempermudah dalam mengorganisir masyarakat ketika situasi bencana. Namun sayangnya stiker

peta evakuasi tersebut masih berisi tentang ancaman tsunami dan belum diperbarui dengan ancaman-ancaman bencana yang lain

Secara garis besar, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Forum PRB hanya dilakukan sekali dalam periode tertentu. Namun kemudian teretus sebuah ide kegiatan yang mana dapat mencakup seluruh tindakan-tindakan pencegahan tersebut. Kegiatan itu kemudian dikenal dengan nama Festival Sungai. Diadakannya festival sungai ini juga merupakan salah satu penerapan dari prinsip pemberdayaan yang mana menurut Aswas (dalam Hamid, 2017) salah satu prinsip pemberdayaan adalah menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Secara umum local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahamisebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Aan, 2016). Sehingga nantinya pendekatan ini akan turut menumbuhkan tradisi untuk menganggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya.

Festival sungai ini bisa dilakukan berkat kerjasama antara Pemerintah Desa Sirnobojo, BPBD Pacitan, Komunitas Pacitan Sehat, dan Komunitas Hijau. Festival sungai memiliki beberapa rangkaian agenda diantaranya lomba perahu hias, cipta menu makanan tradisional, tangkap ikan (gogo), terjun sarung, pertunjukan seni kebudayaan, dan bersih sungai termasuk sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Festival ini digagas dengan harapan dapat menggugah partisipasi masyarakat dalam membentuk masyarakat yang tangguh bencana.

Kegiatan ini dilakukan di sekitar area sungai untuk mengingatkan masyarakat bahwa dahulu sungai merupakan tempat dimana banyak kegiatan dilakukan seperti memancing, bermain, berenang, dan masih banyak lagi.

Tangkap ikan kemudian menjadi salah satu kegiatan yang cukup populer dan diikuti mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tangkap ikan ini dilaksanakan di area sawah yang dekat dengan kali jelok. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa ekosistem air juga perlu dijaga dimana

sekarang banyak dijumpai orang-orang menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang dapat merusak ekosistem air.

Selain itu pada festival sungai ini yang menjadi pembeda dalam sosialisasi pengurangan resiko bencana adalah adanya keterlibatan anak-anak. Disini anak-anak mulai dikenalkan dengan apa itu bencana. Dimulai dari hal paling dasar seperti pengetahuan tentang sebab akibat membuang sampah disembarang tempat, kemudian diakhiri dengan lomba mewarnai yang mana gambar yang diwarnai masih berkaitan juga dengan kebencanaan. keterlibatan anak-anak ini menjadi salah satu bukti diberlakukannya pendekatan perlindungan (5P) yang mana menurut Suharto,1997 pendekatan ini mengharapkan bahwa dalam proses pemberdayaan dapat melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas dari kelompok kuat. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Dengan diajaknya anak-anak berpartisipasi, maka setidaknya anak-anak bisa memiliki pengetahuan dasar mengenai kebencanaan.

Dibangunnya rumah panggung atau bertingkat ini nantinya juga akan mempermudah masyarakat apabila nantinya terjadi banjir mendadak mereka tinggal memindahkan barang-barang berharganya ke lantai atas dan sekaligus juga bisa digunakan sebagai tempat evakuasi sementara.

Kemudian langkah lain yang dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan melakukan penanaman pohon pelindung atau pemecah gelombang di zona bencana. Dalam melakukan penanaman ini FPRB bekerja sama dengan pihak lain dari swasta dengan menanam bibit sengon yang mana penanaman ini kedepannya diharap dapat membantu memperbaiki ekosistem dan penyerapan air tanah juga. Kemudian juga dari dinas kelautan juga bekerjasama dengan menanam mangrove di sekitar pantai mengingat lokasi Desa Sirnobojo sendiri yang jaraknya tidak jauh dari bibir pantai. Mangrove ini nantinya berfungsi untuk mencegah abrasi dan juga berperan dalam meredam bencana banjir.

Terakhir dalam pencegahan fisik ini Forum PRB melakukan pembangunan perbaikan pintu saluran air yang tujuannya untuk memperlancar arus air dan mengatur derasnya air bah. Selain itu juga dilakukan penguatan tanggul salah satunya dengan penanaman pohon pelindung tadi yang mana bertujuan untuk mengantisipasi putusnya tanggul tanah.

Setelah dilakukan langkah-langkah pencegahan, selanjutnya untuk kesiapsiagaan pra bencana yang dilakukan komunitas pertama kali adalah menyiapkan posko siaga bencana. Posko siaga bencana ini nantinya mempunyai tugas utama untuk memantau informasi kejadian bencana. Di Desa Sirnobojo sendiri biasanya posko akan dibentuk di rumah kepala dusun atau tempat lain yang lokasinya dirasa strategis dan tidak terdampak banjir.

Selain itu FPRB juga membantu dalam menyiapkan sarana informasi dan transportasi. Dalam situasi bencana, komunikasi menjadi satu hal yang sangat penting untuk menyampaikan informasi mengenai bencana. Ketika banjir datang maka listrik akan dipadamkan karena akan sangat berbahaya ketika air bertemu dengan listrik.

Dengan dipadamkannya listrik ini kemungkinan paling buruk yang terjadi adalah terputusnya saluran komunikasi dimana telepon mulai kehabisan daya dan tidak bisa mengakses sumber informasi atau juga hilangnya sinyal telepon. Untuk mengantisipasi hal ini FPRB menjalin kerjasama dengan komunitas radio yaitu Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan juga Organisasi Amatir Radio Indonesia ORARI, Hal ini demi menjaga tetap terjalannya komunikasi ketika situasi bencana. Terlebih jangkauan dari sinyal radio yang relatif jauh ini menjadi salah satu keunggulan untuk saling bertukar informasi dengan lokasi lain.

Selain menyiapkan sarana komunikasi FPRB juga melakukan pengadaan tenda barak penampungan pengungsi sekaligus membuat skema penampungan. Tempat pertama yang biasa dijadikan sebagai lokasi penampungan adalah masjid atau surau. Hal ini dijadikan pertimbangan utama karena beberapa lokasi masjid di Desa Sirnobojo berada di lokasi

yang relatif aman dari dampak banjir. Lokasinya atau struktur bangunannya yang tinggi membuat masjid tidak begitu terdampak banjir.

Kemudian hal terakhir yang tidak kalah penting dalam kesiapsiagaan bencana adalah membuat akses atau jalur investigasi bencana ke tempat aman. Relawan FPRB harus menyiapkan jalur tersebut untuk kemudian memudahkan korban dalam melakukan proses evakuasi.

b. Tanggap Darurat (Saat Bencana)

Hal paling pertama yang menandakan ketika situasi bencana itu terjadi adalah munculnya sistem early warning atau sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mengurangi resiko bencana. Adanya sistem peringatan dini dapat membuat masyarakat lebih responsif untuk melakukan penyelamatan diri dan juga dapat membantu mengurangi korban jiwa sehingga dampak bencana juga akan minim.

Tujuan utama sistem peringatan dini berbasis masyarakat adalah menguatkan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik seseorang dan kematian.

Desa Sirnobojo mempunyai sistem peringatan dininya yang terkesan tradisional. Salah satunya dengan interaksi simbol. Menurut Herbert Blumer dalam Margareth Poloma (2007:264) interaksi simbolis ini mencakup penafsiran tindakan. Semisal seseorang batuk ketika orang lain sedang menyampaikan pendapat, maka batuk tersebut dapat ditafsirkan sebagai simbol ketidaksetujuan dengan pendapat orang tersebut.

Pada kasus masyarakat Desa Sirnobojo mereka masih menggunakan kearifan lokal kentongan yang kini mulai jarang digunakan oleh masyarakat luas. Dahulu kentongan merupakan salah satu alat komunikasi simbolis utama yang kerap digunakan untuk menyebarkan informasi secara luas. Dalam penggunaannya kentongan memiliki tafsir yang berbeda-beda dalam setiap pukulannya. Semisal kentongan dipukul hanya sekali secara berulang

dengan jeda waktu tertentu bisa jadi berarti sedang terjadi pencurian, begitu juga dengan kode lain semisal kentongan dipukul lima kali dengan jeda waktu tertentu akan ditafsirkan sebagai adanya ancaman bencana entah itu kebakaran, banjir, atau yang lainnya. Hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat desa agar ketika kentongan berbunyi mereka tau apa yang sedang terjadi.

Kemudian selain menggunakan kentongan, penyebaran informasi pertama dilakukan melalui grup sosial media yang telah FPRB buat. Grup tersebut selain berisi dari anggota FPRB juga diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Informasi-informasi pada situasi bencana ini seringkali berasal dari desa sebelah atau juga daerah hulu sungai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa situasi dan kondisi aman atau tidak. Kemudian informasi yang didapat dari grup tersebut akan disampaikan oleh kepala dusun atau tokoh masyarakat lain melalui surau atau masjid.

Media sosial digunakan menjadi media komunikasi karena dianggap lebih efektif dalam penyampaian pesan terutama di era perkembangan teknologi yang semakin cepat ini. Effendy (2009) berpendapat bahwa proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran itu bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan dan sebagainya yang muncul dari lubuk hati. Sehingga bagaimanapun bentuk komunikasi yang digunakan dalam penyebaran informasi bencana, setidaknya perasaan atau pikiran yang ada di benak komunikator bisa tersampaikan dengan baik dan jelas kepada komunikan.

Setelah adanya sistem peringatan dini ini, masyarakat kemudian dihimbau untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Selanjutnya

barang-barang yang berharga biasanya akan ditaruh loteng rumah atau juga dibawa ke tempat pengungsian.

Disinilah kemudian FPRB mempunyai peran untuk membantu dalam proses evakuasi. Terutama untuk membantu evakuasi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua (lansia), dan kelompok-kelompok disabilitas. Warga yang lain dapat menggunakan rambu-rambu evakuasi untuk menuju lokasi evakuasi. Menurut buku Pedoman Rencana Evakuasi Banjir yang dicetak BNPDB pada 2021, kriteria minimal tempat evakuasi adalah memiliki akses terhadap air bersih dan listrik, kemudian dapat diakses dengan mudah untuk pemberian bantuan baik medis maupun non medis yang berasal dari luar desa/kelurahan, dan juga tempat evakuasi boleh ditetapkan lebih dari satu lokasi dan bisa berada diluar lokasi terdampak

Mengacu pada hal tersebut FPRB menentukan masjid/atau surau sebagai salah satu tempat evakuasi karena memenuhi kriteria minimal dari BNPB tersebut. Selain itu semisal terjadi banjir yang lebih besar, warga akan ditempatkan diatas jembatan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang mana lokasinya berada di tempat yang cukup tinggi dan juga mudah untuk diakses apabila ada bantuan dari luar. Tempat inilah yang nantinya menjadi tempat evakuasi sementara. Apabila banjir kemudian mencapai titik tersebut, maka warga yang sudah berada disitu kemudian akan dipindahkan ke lokasi lain yang lebih aman.

Kemudian selain melakukan evakuasi, sebagian relawan PRB juga bertugas menyiapkan dapur umum. Dapur umum merupakan suatu tempat biasanya dalam bentuk tenda yang mana sebagai wadah penyelenggaraan makanan untuk korban bencana. Lokasi dapur umum ini biasanya berada di rumah masyarakat setempat yang sekiranya aman, dan terjangkau. Di Desa Sirnobojo sendiri rumah kepala dusun menjadi salah satu lokasi didirikannya dapur umum. Selain itu beberapa sekolah juga menjadi lokasi aman untuk didirikan dapur umum. Di dapur umum inilah kemudian relawan PRB melakukan kegiatan memasak dengan dibantu oleh beberapa warga yang kuat atau mampu.

c. Pasca Bencana

Pasca terjadinya banjir, tentu masyarakat akan kesulitan dalam mendapat bahan makanan, terlebih jika yang terjadi banjir besar. Disini dapur umum menjadi salah satu solusi utama dimana masyarakat yang dapurnya belum bisa digunakan akibat banjir bisa mencari bantuan makanan di dapur umum. Selain bahan makanan, obat-obatan juga menjadi salah satu hal yang dibutuhkan pasca terjadinya bencana. Hal ini juga mengingat sulit diaksesnya air bersih yang mana ada kemungkinan air yang dikonsumsi masyarakat saat itu mengandung bakteri yang dapat menyebabkan sakit perut atau masalah pencernaan. Kemudian gatal-gatal juga rawan menyerang pasca banjir, terutama karena adanya kontak dengan air banjir yang kotor. Sehingga disini FPRB membantu dalam pengadaan obat-obatan. Biasanya FPRB bekerjasama dengan instansi kesehatan seperti PMI.

Pasca banjir terutama juga menyebabkan trauma bagi masyarakat. Terlebih jika banjir yang terjadi skalanya cukup besar. Kerugian harta benda dan yang lainnya bisa menyebabkan seseorang menjadi sedih berlebihan dan seakan tidak menampakkan semangat hidup. Belajar dari hal ini, FPRB bekerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya rumah zakat untuk membantu melakukan trauma healing kepada korban banjir.

Trauma healing ini tujuannya adalah untuk menghibur korban banjir. Yang jadi target utamanya lebih ke anak-anak. Sebab trauma yang dialami anak-anak ini bisa berdampak ke psikologis anak selanjutnya jika tidak segera ditangani. Disini tim trauma healing biasanya mengajak anak-anak untuk bersenang-senang, bermain, dan banyak hal lain untuk mengalihkan perhatian anak sehingga anak-anak bisa senang dan ceria kembali.

Selain itu pasca terjadinya banjir akan membuat lingkungan sekitar menjadi sangat kotor dimana bekas air kotor yang memasuki rumah kemudian akan menambah kotoran yang masuk ke rumah. Kemudian akses

jalan yang licin karena tertutupi oleh air berlumpur juga sangat membahayakan transportasi yang lewat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka relawan FPRB dibantu dengan masyarakat akan bergotong royong kerja bakti untuk membersihkan sisa-sisa banjir tersebut. Tentunya pada awalnya mereka akan fokus pada rumah mereka terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan membantu membersihkan fasilitas-fasilitas umum terutama daerah-daerah saluran air yang pastinya dipenuhi sampah dari hulu. Dalam pembersihan fasilitas ini biasanya FPRB juga meminta bantuan dari BPBD Kabupaten.

Kotornya lingkungan ini juga sedikit berpengaruh terhadap air konsumsi warga. Air yang kotor apabila dipakai untuk mandi tentunya juga bisa menyebabkan gatal-gatal, begitu juga apabila dipakai sebagai air minum, tentunya akan menyebabkan masalah pencernaan. Disini FPRB biasanya mencoba meminta bantuan pengadaan air bersih ke PDAM sehingga masyarakat dapat menikmati air bersih yang layak konsumsi.

1.2. Kendala FPRB dalam Menjalankan Perannya

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan SDM ini memang menyebabkan banyaknya proses pembangunan menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan kurangnya produktifitas tenaga kerja yang memadai. Pada kasus ini tujuan FPRB untuk menciptakan masyarakat tangguh bencana juga dapat terhambat.

Kurangnya SDM pada masyarakat Desa Sirnobojo ini ditandai dengan masih adanya warga yang sulit diberitahu alias bandel dan kurang begitu peduli terhadap kebencanaan. Terkadang mereka juga ikut mencibir kegiatan dari FPRB sendiri karena mereka menganggap tidak perlu sok membantu orang lain kalau keselamatan dirinya sendiri saja belum tentu terjamin.

Namun untuk menghadapi masyarakat yang seperti ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang kasar. Pendekatan yang persuasif, halus, dan

sangat kekeluargaan sangat dibutuhkan karena komunitas menganggap bahwa komunikasi yang baik akan membantu untuk meluluhkan masyarakat sehingga rasa keingintahuannya terhadap kebencanaan terbentuk. Pendekatan-pendekatan ini biasanya mereka lakukan ketika ada forum-forum kumpul di masyarakat. Sembari berbincang mereka juga menyampaikan permasalahan-permasalahan kebencanaan dan juga berembuk untuk mencari jalan keluarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Forum PRB juga turut melakukan pendekatan penyokongan (5P) yang mana menurut Suharto, 1997 pada pendekatan ini komunitas diharapkan mampu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan yang dilakukan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Kurangnya SDM ini bisa dilihat juga dengan kaca mata lain, dimana jumlah relawan yang tidak banyak juga cukup menghambat dalam proses pengurangan resiko bencana. Hampir seluruh relawan PRB selalu berfokus pada rumah tangganya terlebih dahulu yang tentunya juga memakan waktu yg tidak sebentar. Sehingga hal ini juga menyebabkan proses-proses seperti evakuasi dan pemulihan kondisi pasca bencana terhambat.

Minimnya SDM tersebut juga disebabkan oleh kurangnya kaderisasi. Bahkan untuk mencari orang yang gampang diajak kumpul dan mau peduli terhadap isu ini saja relatif susah. Kalaupun ada kegiatan kumpul-kumpul, hampir bisa dipastikan yang hadir hanya orang-orang yang itu itu saja.

Apabila hal seperti ini dibiarkan, maka bisa dipastikan eksistensi relawan FPRB ini tidak akan bertahan lama lagi. Tidak adanya generasi penerus yang sulit diajak bekerja sukarela akan mematikan eksistensi kelompok relawan ini. Maka dari itu dibutuhkan peran dari tokoh-tokoh

masyarakat pula untuk menyadarkan generasi muda sehingga mereka mau meneruskan perjuangan dari relawan PRB.

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang dapat membantu menunjang komunitas dalam melakukan serangkaian upaya pengurangan resiko bencana. Tidak adanya plafon anggaran menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan pengurangan resiko bencana. Sedangkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan simulasi dan berbagai macamnya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Itulah kenapa terkadang untuk memulai sebuah kegiatan saja FPRB harus menunggu instruksi dari desa, karena anggarannya didapatkan dari dana desa tersebut. Selain itu kerjasama dengan komunitas dan instansi lain juga menjadi pilihan untuk tetap melakukan serangkaian kegiatan pengurangan resiko bencana.

Tidak adanya pendanaan ini juga berdampak pada kurangnya alat-alat kebutuhan yang dapat menunjang upaya pengurangan resiko bencana. Misalnya saja kendaraan atau transport untuk membantu evakuasi. Kendaraan ini bisa berupa mobil atau juga perahu karet atau boat. Untuk mobil sendiri terkadang Forum PRB harus menunggu bantuan dari pihak lain seperti BPBD atau dari Pemerintah Desa. Terkadang untuk menggunakan mobil desa pun memerlukan proses juga yang tentunya akan menghambat pengurangan resiko bencana. Untuk mengatasi hal ini, mengingat kultur masyarakat yang mempunyai ikatan batin kuat satu sama lain, maka alat transportasi yang dimiliki warga dijadikan salah satu opsi untuk membantu proses evakuasi.

Selain itu perahu juga menjadi elemen penting dalam situasi banjir. Kendaraan darat tidak akan bisa digunakan apabila terjadi banjir yang cukup besar. Kehadiran perahu ini tentunya akan sangat berarti dalam membantu proses mobilisasi. Namun sayangnya Forum PRB sendiri belum memiliki satupun perahu untuk menunjang proses ini. Pada

beberapa kasus, mereka harus menunggu kapal dari BPBD terlebih dahulu yang jumlahnya juga minim, sehingga hal ini juga menghambat dari proses evakuasi tersebut. Beruntungnya sebagian masyarakat Desa Sirnobojo berprofesi sebagai nelayan, sehingga terkadang kapal-kapal milik mereka juga digunakan untuk membantu proses evakuasi pula.

Kemudian kendala lainnya juga kurangnya alat-alat penunjang seperti generator, dan penerangan yang juga harus menunggu terlebih dahulu. Lalu tikar dan tenda barak yang jumlahnya masih tidak sebanding dengan jumlah pengungsi. Juga termasuk alat-alat dapur umum yang masih sangat kurang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dapur umum FPRB hanya menggunakan alat seadanya sampai adanya bantuan dari pihak lain.

1.3 Bentuk dukungan yang diterima FPRB

Bentuk dukungan yang didapatkan oleh FPRB Sirnobojo sebagian besar berasal dari BPBD Kabupaten Pacitan sendiri, dimana BPBD selalu ikut serta dan mendampingi setiap kegiatan FPRB dari awal terbentuknya. Bentuk dukungan tersebut meliputi proses awal sosialisasi dimana BPBD menyadari bahwa kapasitas komunitas tidak memungkinkan jika sepenuhnya harus bisa membantu disegala aspek mulai dari pra bencana hingga pasca bencana nantinya. Sehingga BPBD turut membantu dan memberi pengetahuan tambahan yang dibutuhkan. Kemudian dengan adanya interaksi dengan pihak BPBD, maka akses relasi juga menjadi terbuka bagi FPRB untuk berhubungan dengan komunitas kebencanaan yang lainnya. Disisi lain dengan semakin banyaknya dukungan, maka pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari proses interaksi akan bertambah dan dapat membantu FPRB dalam mengembangkan strategi pada pengurangan resiko bencana.

Selain itu dengan adanya hubungan kerjasama dengan BPBD dan komunitas lain juga turut membantu FPRB Sirnobojo dalam menjalani proses tanggap darurat dan pasca bencana. Dimana pada skala banjir yang besar, FPRB akan kewalahan untuk mengatasi wilayahnya sendiri, sehingga disini

BPBD akan membantu proses koordinasi dengan wilayah lain untuk meminimalisir resiko. Selain itu tugas perlindungan kepada kelompok rentan juga menjadi salah satu bentuk dukungan dari komunitas lain dan BPBD untuk membantu FPRB Sirnobojo. Yang terakhir dalam situasi pasca bencana pada proses rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas umum seperti pembersihan saluran air, perbaikan parit, dan fasilitas umum lainnya, FPRB Sirnobojo juga mendapat dukungan dalam bentuk tenaga karena memang dalam hal demikian tidak mungkin dilakukan dalam kelompok kecil saja. Kemudian dukungan dengan instansi kesehatan menjadi yang terpenting dalam fase ini terkait dengan adanya potensi penyakit kulit atau bahkan gangguan psikologis.

KESIMPULAN

1. Ketika menjalankan perannya dalam manajemen bencana di Desa Sirnobojo, FPRB Sirnobojo melakukan pengurangan resiko bencana melalui mitigasi dalam bentuk fisik dan non fisik. Pemberdayaan yang dilakukan ke masyarakat dengan pendekatan 5P terlihat cukup efektif dilakukan. Unsur-unsur kebudayaan juga turut dimasukkan untuk menarik minat masyarakat dalam berpartisipasi. Pada situasi tanggap darurat dan pasca bencana, FPRB Sirnobojo banyak berperan sebagai pelindung khususnya bagi kelompok lemah dan juga memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

2. Dukungan yang diterima oleh FPRB Sirnobojo berasal dari instansi-instansi pemerintah dan juga komunitas lain yang bergerak di bidang kebencanaan, lingkungan maupun komunikasi. Bentuk dukungan yang diterima berupa dukungan pikiran, pengetahuan, akses relasi, maupun dukungan yang berbentuk materi dan barang. Selain itu adanya rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi bencana membuat masyarakat mudah untuk diajak berkontribusi.

3. Ketika menjalankan perannya dalam manajemen bencana di desa Sirnobojo, FPRB memiliki kendala berupa kurangnya Sumber Daya

Manusia terkait dengan kurangnya kaderisasi dan juga kurangnya pemahaman masyarakat pada isu kebencanaan. Kemudian kendala lain yang menghambat berjalannya komunitas dalam menjalankan perannya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya plafon anggaran yang dimiliki oleh komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu, Joko Tri Pasetya. (2005). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arsip Desa, 2012. *Rencana Pengembangan Desa Tangguh Bencana Desa Sirnobojo*
- Danim, Sudarwan. (2002) *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Komunikasi teori dan praktek*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya
- Moleong, Lexy. J. (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009:212-213, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru,
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian. Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, PT. Refika Aditama

**Kontrol Tubuh Perempuan Pada Praktik Sunat Perempuan
(Studi Dengan Pendekatan Relasi Kuasa Di Desa Ngemplak, Karangpandan)**

Setyawidi Rahayu¹, Sri Hilmi Pujihartati²

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Abstract

In general, female circumcision is the cutting or scraping of all or part of female genitalia, especially the clitoris part. Ngemplak Village is one of village that still practiced female circumcision until now. In addition, from the results of pre-studies that have been done, it is known that 85% of adolescents in Ngemplak Village have performed female circumcision on average when they were less than 10 years old. The purpose of this study is to explain the existence and control of the body on female circumcision in Ngemplak Karangpandan Village.

The theory used in this study is Michel Foucault's theory of power. This concept of power also exists in the practice of FGM, the community interaction that led to the birth of female circumcision. In the practice of female circumcision, women become helpless because women do not have power over their own bodies, especially in the reproductive function of their bodies.

The results of this study are: 1) The existence of female circumcision in Ngemplak Village exists from the past until now. In its implementation, female circumcision in the past was carried out at the age of under 7 years while the present day of female circumcision is still carried out even by medical personnel and is done at a younger age such as under 6 months. 2) Female circumcision is one of the control tools for women's bodies because the advice about circumcision is mostly done by female parents. Women are not given a choice of yes or no in performing circumcision because it is considered at the age of under 7 years, children do not understand about the benefits and what is female circumcision.

Keywords: Female Circumstance, Body Otonomy, Power

Abstrak

Secara umum, sunat perempuan merupakan pemotongan atau penggoresan seluruh atau sebagian alat genital perempuan khususnya bagian klitoris Desa Ngemplak merupakan desa yang masih terdapat praktik sunat perempuan masih dilakukan hingga sekarang, dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan diketahui 85% remaja di Desa Ngemplak pernah melakukan sunat perempuan rata-rata saat umur mereka kurang dari 10 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai eksistensi dan kontrol tubuh pada sunat perempuan di Desa Ngemplak Karangpandan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan Michel Foucault. Konsep kekuasaan ini juga ada pada praktik sunat perempuan, interaksi masyarakat yang menyebabkan lahirnya sunat perempuan. Dalam praktik sunat perempuan, perempuan menjadi tidak berdaya sebab perempuan tidak memiliki kuasa akan tubuhnya sendiri terutama pada fungsi reproduksi tubuhnya.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Eksistensi sunat perempuan di Desa Ngemplak ada dari masa dahulu hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya sunat perempuan pada masa lalu dilakukan pada umur di bawah 7 tahun sedangkan masa sekarang sunat perempuan masih dilakukan bahkan oleh tenaga medis dan dilakukan pada umur yang lebih belia seperti di bawah 6 bulan. 2) Sunat perempuan merupakan salah satu alat kontrol bagi tubuh perempuan dikarenakan anjuran mengenai sunat kebanyakan dilakukan oleh orangtua perempuan. Perempuan tidak diberi pilihan iya atau tidak nya

dalam melakukan sunat karena dianggap pada umur di bawah 7 tahun, anak belum mengerti mengenai manfaat dan apa itu sunat perempuan.

Kata kunci: sunat perempuan, kontrol tubuh, relasi kuasa

A. PENDAHULUAN

Istilah sunat berasal dari bahasa arab khitan yang secara etimologis memiliki arti “memotong”, memotong yang dimaksudkan adalah sebagian kulit yang menutupi kepala penis. Umumnya, istilah khitan digunakan untuk sunat laki-laki sedangkan untuk sunat perempuan dalam bahasa arab disebut khafdh yang memiliki arti memotong ujung klitoris (Farida, J. 2017). Secara umum, sunat perempuan merupakan pemotongan atau penggoresan seluruh atau sebagian alat genital perempuan khususnya bagian klitoris (Musyarofah, Ristiani. 2003).

Dalam sejarahnya, belum diketahui secara pasti di mana asal muasal tradisi sunat perempuan ini, namun berdasarkan catatan pada tahun 2000 SM di Mesir ditemukan dokumen-dokumen yang berupa relief menyebutkan mengenai praktik sunat perempuan (KG, Fisaha. 2016). Praktik sunat perempuan atau secara global dikenal dengan istilah *Female Genital Mutilation* (FGM) juga ditemukan melalui mumi yang klitorisnya di potong yang telah diperkirakan dari abad ke 5 SM. Roma, Yunani, Saudi Arabia juga menjadi daerah yang populer dengan praktik FGM. Pada abad ke -18 praktik FGM juga populer di negara-negara seperti Kanada, Inggris dan Amerika Serikat, pada saat itu tujuan adanya praktik sunat perempuan yaitu pencegahan masturbasi, mengobati histeria dan kondisi mental lainnya.

Kemudian di dalam penelitian Kosla, R (2017) disebutkan jika di Afrika, praktik sunat perempuan populer di daerah Barat, Timur dan Timur Laut, penyebaran praktik ini ke seluruh belahan dunia seperti Asia, Timur Tengah dan beberapa daerah lain merupakan akibat dari adanya migrasi internasional. Meskipun telah menyebar ke berbagai negara angka sunat perempuan tergolong tidak turun melainkan tetap sama bahkan ada yang mengalami kenaikan.

Negara yang saat ini mempunyai representasi sunat perempuan terbanyak salah satunya adalah Mesir. Dalam penelitian Modrek, S (2016) disebutkan, praktik sunat perempuan yang umum di Mesir adalah tipe 1 yaitu menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris

(klitorikmi) dan tipe 2 yaitu menghilangkan sebagian maupun seluruh bagian klitoris atau labia minora (eksisi). Praktik ini secara tradisional dilakukan oleh orang awam seperti dayas tukang cukur dan lain-lain. Pada tahun 2014 sebanyak 92% perempuan di Mesir dalam rentang usia 15-49 tahun termasuk yang sudah pernah menikah telah mengalami sunat perempuan. Berdasarkan survei untuk remaja pada tahun 2014, sebanyak 74 % remaja perempuan berusia 13 – 17 tahun telah disunat angka ini lebih sedikit dibandingkan perempuan rentang usia 25-29 tahun yang mempunyai persentase sebanyak 84%..

Di negara barat seperti Belanda dan Spanyol praktik sunat perempuan menyebar melalui imigran yang datang dari negara-negara penganut praktik sunat perempuan tradisional. Dalam penelitian Kawaous, R (2020), pada tahun 2018 sebanyak 41.000 perempuan dan anak perempuan di Belanda mengalami sunat perempuan.

Sedangkan, praktik sunat perempuan di Indonesia paling populer di tanah Jawa, menyebar ke beberapa daerah lain seperti Sulawesi (Makassar, Gorontalo), Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin), Sumatra (Lampung, Riau, Padang, Aceh), Pulau Kei di Ambon, Pulau Alor dan Suku Sasak di Lombok. Menurut Putranti, D B (2005) Tidak diketahui sejak kapan sunat perempuan masuk ke Indonesia, meskipun saat ini sunat perempuan erat dengan pelaksanaan agama rupanya sunat secara umum sudah ada sebelum masyarakat mengenal masjid, gereja dan kerajaan Jawa. Dugaan mengenai hal ini berdasarkan mitologi yang menyatakan jika sunat merupakan pembebasan diri dari dewa pemangsa manusia (Betara Kala).

World Health Organization (WHO) sendiri menggolongkan sunat perempuan menjadi 4 tipe diantaranya yaitu penggoresan permukaan tanpa penghilangan sebagian atau seluruh klitoris, penghilangan sebagian atau seluruh klitoris, pemotongan klitoris disertai penyempitan vulva dan sunat tidak terklasifikasi (Zamroni, I. 2011: 229).

Sedangkan tipe sunat perempuan di Indonesia menurut Farida, J (2017), umumnya menggunakan praktik simbolik, meskipun di beberapa daerah terdapat praktik sunat yang memotong klitoris perempuan dengan sesungguhnya. Sunat perempuan simbolik biasanya pemotongan digantikan dengan kunyit, kunyit dipotong diibaratkan sebagai klitoris perempuan kemudian kunyit tersebut digosokkan ke lubang vagina perempuan, sedangkan

praktik sunat perempuan yang sesungguhnya biasanya berupa pengambilan sebagian kecil atau penggoresan klitoris. Pada tradisi sunat perempuan di Demak umumnya dilakukan bersamaan dengan tradisi lain seperti puputan (pemotongan tali pusar bayi saat berumur 7 hari), wetonan (bayi berumur 35 hari), dan tidhak siti (ketika bayi menginjak tanah pertama kali berumur 7 bulan).

Meskipun identik dengan budaya patriarki, praktik sunat perempuan di Indonesia juga terjadi pada garis matriarkal (keturunan ibu). Menurut penelitian Hikmalisa (2016), salah satu daerah yang melakukan sunat perempuan pada masyarakat bergaris ada matriarkal yaitu Sumatra Barat. Selain itu, Dukuh Kuntu Provinsi Riau sebagai tempat penelitian ini juga merupakan dukuh dengan adat matriarkal dan sebanyak 800 anak perempuan telah melakukan sunat perempuan.

Berdasarkan tujuannya, sunat perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan dan perampasan hak perempuan, beberapa tujuan tersebut diantaranya supaya perempuan ketika dewasa tidak menjadi binal dan dapat mengontrol nafsu birahinya. Bahkan untuk beberapa masyarakat, sunat perempuan dipercaya sebagai meningkatkan kesuburan, menambah kecantikan dan dilakukan agar perempuan pandai memasak, kegiatan memasak ini identik dengan budaya patriarki (Musyarofah, Ristiani. 2003).

Sunat perempuan merupakan alat kontrol bagi perempuan, makna dari sunat perempuan sendiri merupakan bentuk dari diskriminasi gender seolah perempuan digambarkan seperti makhluk yang liar dan perlu dikendalikan. Selain itu, sunat perempuan juga dilakukan tanpa persetujuan perempuan terlebih dahulu sebab kebanyakan perempuan tidak ditanya mengenai mau atau tidaknya mereka melakukan sunat. Perempuan pun tidak diberi pengetahuan lebih lanjut mengenai bagaimana risiko maupun manfaat sunat perempuan bagi tubuh mereka.

Menurut Foucault dalam Martono, N (2014), kekuasaan tidak selalu harus berada dalam ruang lingkup penggulingan pemerintahan, institusi maupun birokrasi. Kekuasaan dapat digunakan dalam hal untuk memberikan pengaruh maupun mengubah cara pandang seseorang akan sesuatu. Tokoh yang satu dengan tokoh lain mengartikan kekuasaan dengan caranya sendiri, berbeda dengan konsep teoritikus lain konsep kekuasaan milik

Foucault bersifat menyebar dan ada dimana-mana. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu melainkan dapat berasal darimana saja.

Jika dalam masyarakat tersebut terdapat interaksi maupun relasi meskipun hanya melibatkan dua orang saja, didalam interaksi tersebut dapat muncul sendiri praktik-praktik kekuasaan. Kekuasaan pun sulit dipahami dan sulit dihilangkan dari masyarakat karena norma yang sudah tertanam di masyarakat seolah masyarakat diawasi oleh-nya.

Konsep kekuasaan ini juga ada pada praktik sunat perempuan, interaksi masyarakat yang menyebabkan lahirnya sunat perempuan. Dalam praktik sunat perempuan, perempuan menjadi tidak berdaya sebab perempuan tidak memiliki kuasa akan tubuhnya sendiri terutama pada fungsi reproduksi tubuhnya. Gagasan ini sesuai dengan yang diungkapkan Foucault (1997) mengenai pematuhan tubuh dengan mitos yang berkembang di masyarakat (Betrayani, 2020).

Desa Ngemplak merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Lokasi desa ini cukup strategis karena terletak tak jauh dari Jalan Solo – Tawangmangu yang merupakan jalur yang biasa digunakan wisatawan untuk ke Tawangmangu, meskipun letaknya strategis dan tidak terpencil desa ini masih melakukan tradisi yang terkait budaya jawa salah satunya adalah sunat perempuan. Di desa ini, praktik sunat perempuan masih dilakukan hingga sekarang, hal ini ditandai dengan adanya data kepala desa terdapat 2 dukun bayi yang masih aktif. Selain itu dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan diketahui 85% remaja di Desa Ngemplak pernah melakukan sunat perempuan rata-rata saat umur mereka kurang dari 10 tahun.

Penelitian ini menarik dilakukan karena meskipun sudah berada di jaman yang sudah maju praktik tradisional seperti sunat perempuan masih dilakukan. Adanya praktik sunat yang masih dilakukan oleh dukun bayi sampai sekarang pun juga menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Kuasa akan tubuh perempuan sehingga memberikan kontrol pada masyarakat dan sunat perempuan yang menjadi alatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi eksistensi dan kontrol tubuh pada praktik sunat perempuan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Ngemplak Karangpandan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. (Slamet, Y. 2006).

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi, fenomenologi ini digunakan untuk mengembangkan struktur pengalaman hidup dari suatu fenomena dalam mencari kesatuan makna dengan mengidentifikasi inti fenomena dan menggambarkan secara akurat dalam pengalaman hidup sehari-hari (Rose, Beeby & Parker, dalam Steubert & Carpenter, 2003). Pendekatan fenomenologi menekankan pada subjektivitas pengalaman hidup manusia yang bermakna bahwa peneliti melakukan penggalian langsung pengalaman yang disadari dan menggambarkan fenomena yang ada tanpa terpengaruh oleh teori atau asumsi sebelumnya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kontrol tubuh perempuan dalam praktik sunat perempuan di Desa Ngemplak Karangpandan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Eksistensi sunat perempuan di Desa Ngemplak Karangpandan

Eksistensi menurut Dagun (1990) merupakan segala hal yang ada dengan fakta dan yang telah dialami, dalam hal ini ditekankan bahwa sesuatu itu ada. Fakta menjadi faktor yang membedakan dari ada dan tiada.

Menurut Andriani (2013) Eksistensi merupakan proses yang dinamis jadi eksistensi mempunyai sifat fleksibel dapat berkembang maupun mengalami kemunduran tergantung pada proses aktualisasi potensinya. Eksistensi akan mempunyai makna karena terjadi kontinuitas dan kontinuitas ini akan terjadi jika terdapat kegiatan di dalamnya.

Sunat perempuan merupakan tindakan tradisional menghilangkan sebagian maupun seluruh alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitasnya. Dalam sejarahnya sunat perempuan diterapkan kepada perempuan untuk mengobati histeria, mencegah masturbasi dan untuk mengatur perempuan agar tidak binal. Selain itu, paham kepercayaan suatu agama pun ada yang mewajibkan sunat perempuan dengan tujuan untuk memuliakan perempuan yang melaksanakan sunat.

Meskipun sudah memasuki era modern, praktik sunat perempuan masih cukup populer dilakukan di berbagai negara, Indonesia yang erat dengan agama dan tradisi pun tidak luput dari masih ditemukannya tradisi sunat perempuan hingga sekarang.

a. Eksistensi Berdasarkan Apa Yang Dialami

Eksistensi merupakan sesuatu yang dinamis, artinya eksistensi tidak hanya berhenti di dalam suatu waktu yang tidak mengalami perkembangan maupun kemunduran, artinya eksistensi bersifat fleksibel/tidak kaku.

Praktik sunat perempuan hingga saat ini masih tetap dilaksanakan, hal ini dapat diartikan sebab kegiatan di dalam praktik sunat perempuan tetap berjalan sehingga tradisi ini bersifat kontinu. Kontinuitas dalam keberjalanan sunat perempuan dapat mengalami perkembangan maupun kemunduran karena sifat eksistensi itu sendiri.

Untuk menerangkan mengenai bagaimana eksistensi sunat perempuan di Desa Ngemplak saat ini, dibutuhkan mengenai pengalaman-pengalaman tentang sunat perempuan yang telah dialami masyarakat Desa Ngemplak. Pengalaman yang dialami ini seperti pengertian sunat yang mereka ketahui, umur saat melakukan sunat, dan tindakan apa yang dilakukan saat itu.

Sunat perempuan merupakan suatu adat yang masih dilakukan hingga sekarang. Kebiasaan ini dilakukan turun-temurun dikarenakan tradisi yang diajarkan langsung oleh kakek nenek.

“Ya, adat simbah melakukan terus ya ikut melakukan gitu aja sih” (Endang, 10 Oktober 2021)

Selain itu, sunat perempuan dianggap sebagai tradisi yang bertujuan untuk melengkapi perempuan.

“Tradisi, tradisi untuk melengkapi perempuan seperti itu” (Walinem, 10 Oktober 2021)

Tradisi sunat perempuan pun dianggap sebagai salah satu cara untuk membuang sial bagi perempuan. Orang-orang zaman dahulu pun mempercayai jika sunat perempuan merupakan tradisi yang dapat membantu perempuan dalam persalinan nantinya.

“Nggih nak namung jaman ndisik ndisik nggih namung artine ngguwak suker ngoten niko, niku supaya pas enten ngapane ngelahirke niku mboten kesusahan niku” (Saminem, 13 Oktober 2021)

Sunat perempuan pun berbeda dengan sunat yang biasa dilakukan oleh laki-laki, pada sunat laki-laki ada bagian yang dipotong sedangkan sunat perempuan belum tentu adanya pemotongan pada proses penyunatannya.

“Sebenarnya aku nggak bisa menjelaskan spesifiknya gimana tapi kaya itu berbeda gitu sama sunat laki-laki aku dulu nggak ada bagian yang dipotong. Kan kalo laki-laki ada yang dipotong sedangkan aku nggak.” (Suci P, 12 Oktober 2021)

Menurut informan Anis, sunat perempuan merupakan kegiatan yang menggores alat genital perempuan.

“Kegiatan menggores punyanya perempuan (vagina)” (Anis S, 10 Oktober 2021)

Sunat perempuan merupakan pemotongan bagian dari alat genital perempuan dengan ani-ani (ani-ani merupakan alat keris kecil yang tajam yang biasanya digunakan untuk memotong padi pada jaman dahulu).

“Sunat perempuan itu ya kaya potongan punyanya perempuan pake ani-ani gitu” (Sopita, 10 Oktober 2021)

Selain berkaitan dengan adat dan tradisi, sunat perempuan juga merupakan perintah dari kepercayaan agama tertentu seperti islam.

“Sunat perempuan itu salah satu anjuran di agama islam juga ada sih terus tradisi” (Halimah, 12 Oktober 2021)

Setelah pengertian mengenai sunat, pengalaman yang dialami oleh informan yaitu proses sunat yang dilakukan dikerjakan oleh siapa dan alasan mengapa dipilihnya orang tersebut dalam mempercayai untuk melakukan sunat perempuan.

Informan Endang mengatakan jika sunat yang telah dialami olehnya dan kedua anaknya dilakukan oleh Mbah Dukun.

“Mbah dukun yang melakukan” (Endang, 10 Oktober 2021)

Pemilihan dukun sebagai tempat sunat dikarenakan salah satu tradisi masyarakat jawa jika melakukan sunat dilakukan di Mbah Dukun.

“Di mbah dukun karena udah tradisi orang tua orang jawa” (Walinem, 10 Oktober 2021)

Selain sunat perempuan, menurut informan Suci, Mbah dukun juga menyunati laki-laki. Pemilihan dukun karena adat jawa itu sendiri. Pelaksanaan yang berbarengan ini dikarenakan terdapat tradisi selamatan yang bisa dilakukan secara bersamaan.

“Mbah dukun, di klangon, Karena dibarengin sama sepupuku tapi dia cowok jadi harinya sama jadi sekalian kalo adat jawa kan ada kondangan nah makanya dikondangin bareng gitu. ” (Suci P, 12 Oktober 2021)

Sifat sunat perempuan yang identik dengan pelaksanaan tradisi membuat sunat sampai sekarang masih dilakukan oleh Mbah Dukun.

“Mbah dukun, karena modelnya tradisional itu mbah dukun sampai sekarang ya mbah dukun”(Winarsih, 10 Oktober 2021)

Pemilihan dukun bayi untuk melakukan sunat juga karena sudah terbiasa menggunakan jasanya untuk melakukan tradisi pada bayi sejak bayi itu lahir

“Karena ya biasanya sekalian jadi bayi baru lahir kan diurut sampai umur satu tahun kan selalu urut rutin terus sekalian aja udah terbiasa gitu” (Halimah, 12 Oktober 2021)

Selain dilakukan dukun, sunat juga ada yang dilakukan oleh keluarga terdekat seperti bude. Meskipun tidak memiliki latar belakang medis, bude informan Anis merupakan seseorang yang masih menjunjung adat jawa.

“Seingat saya budhe, Karena budhe itu menjunjung nilai adat jawa gitu” (Anis S, 10 Oktober 2021)

Pengalaman sunat yang telah dialami ini juga merujuk pada kapan sunat itu dilakukan oleh informan maupun keluarga terdekat yang melakukan sunat. Menurut informan Endang sunat yang telah dia alami maupun anak-anaknya dilakukan pada usia di bawah 7 tahun. Pemilihan umur untuk sunat ini karena ketika sudah berada di atas umur 7 tahun, anak cenderung malu karena orang lain melihat alat genitalnya.

“Di bawah 7 tahun saya juga dulu di bawah 7 tahun, Semakin besar malu karena diliat orang gitu kan” (Endang, 10 Oktober 2021)

Pengalaman sunat yang dialami sunat informan Anis, dilakukan pada umur 6 tahun informan saat ini berumur 21 tahun sehingga sunat ini dilakukan pada tahun 2006.

“Sd sekitar umur 6 tahun” (Anis S, 10 Oktober 2021)

Sunat yang dialami informan Sopita dilakukan pada umur 8 tahun.

“Umur 8 tahun” (Sopita, 10 Oktober 2021)

Sunat yang dialami anak informan Walinem dilakukan pada umur 7 tahun sedangkan sebelumnya dia melakukan sunat pada umur di bawah 5 tahun.

“Iya, sunat semuanya umur 7 tahun” (Walinem, 10 Oktober 2021)

Informan Suci melakukan sunat pada umur sekitar 7 tahun saat masih di bangku Sekolah Dasar.

“Sekitar sd umur 7 taunan” (Suci P, 12 Oktober 2021)

Informan Halimah tidak mengalami sunat perempuan karena bukan berasal dari Desa Ngemplak. Meskipun begitu kedua anak perempuannya mengalami sunat perempuan dan dilakukan pada umur sebelum 5 tahun, sama seperti informan Endang, umur ini dipilih berdasarkan alasan untuk menghindari rasa malu.

“Dia sebelum 5 tahun karena nanti kalo besar ya agak-agak malu, karena diliat orang gitu” (Halimah, 12 Oktober 2021)

Pengalaman mengenai disunatnya perempuan tentu berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Pengalaman ini menjadi fakta eksistensi sunat

perempuan dari apa yang sudah dialami. Setelah mengenai arti sunat perempuan, pemilihan waktu dalam melakukan sunat, eksistensi berdasarkan apa yang dialami yaitu berupa proses sunat yang pernah dilakukan masing-masing informan.

Menurut Endang, proses sunat yang pernah dilakukannya dan kedua anaknya yaitu digores dan tidak berdarah. Dalam proses penyunatan dilakukan oleh Mbah Dukun dan informan tidak melihat detailnya sehingga ingatan informan cenderung samar-samar namun alat yang digunakan berupa ani-ani.

“Digores gitu, nggak terlalu inget detailnya tapi nggak berdarah cuma digores aja” (Endang, 10 Oktober 2021)

“Nggak ingat kalo saya soalnya kalo anak pas dilakukan saya nggak liat, digores gitu ga dihilangin pake ani-ani buat memetik padi itu” (Endang, 10 Oktober 2021)

Berdasarkan yang telah dialami informan Sopita, saat sunat diberi kunyit yang diiris kemudia digesekkan ke alat genital perempuan dan tidak langsung dipotong pada alat genital perempuan.

“Nggak inget sebenarnya mbak, ya kaya dikasih kunir gitu diiris terus digesekin ke punyanya perempuan jadi bukan langsung alat kelaminnya yang diiris”(Sopita, 10 Oktober 2021)

Menurut informan walinem, proses sunat menggunakan ani-ani dan kunyit yang diberikan kepada alat genital perempuan. Rasanya sedikit perih namun yang digores adalah kunyit tersebut.

“Dulu alatnya pake ani-ani sama kunir terus dikasih ke itunya pokoknya ada rasa perih-perihnya gitu. Tapi ya ada yang digores kunirnya.”(Walinem, 10 Oktober 2021)

Sama dengan informan sebelumnya, informan Suci juga membenarkan jika teknik sunat perempuan yang ia alami dengan keris kecil yang digesekkan ke genital perempuan. Informan berada di kamar bersama Mbah Dukun saja kemudian melakukan proses sunat.

“Itu ada tata caranya sendiri dari mbah dukunnya terus kan aku dimasukkin ke kamar sama mbah dukunnya itu tapi seingetku gak ada bagian yang dipotong Cuma mbah dukunnya tuh kaya keris kecil banget terus digesek gesekin doang gitu tok” (Suci P, 12 Oktober 2021)

Efek yang ditimbulkan pun tidak perih dan hanya geli saja.

“Nggak sakit, tapi geli” (Suci P, 12 Oktober 2021)

Pada saat itu informan lupa apakah duduk atau berdiri tetapi alat yang digunakan untuk sunat hanya digoreskan satu hingga 3 kali dan tidak merasakan sakit hanya geli.

“Aku lupa berdiri apa duduk tapi ya itu disret sret sret terus yaudah gitu antara satu sampai tiga kali terus nggak merasakan sakit Cuma geli aja” (Anis S, 10 Oktober 2021)

Dalam melakukan sunat perempuan ada yang diminta untuk membawa telur ayam. Telur ayam ini diletakkan di mangkok sebagai persyaratan untuk nantinya dibawa pulang kembali.

“Persyaratannya disuruh bawa telur ayam itu aja” (Halimah, 12 Oktober 2021)

“Ya cuman ditaruh di mangkok kecil gitu nanti dibawa pulang lagi” (Halimah, 12 Oktober 2021)

Sama seperti informan lain, informan Halimah membenarkan jika sunat dilaksanakan dengan menggunakan kunyit yang nantinya digoreskan ke alat genital perempuan dan tidak disilet.

“Iya beliau pakenya kunir digores-gores tidak disilet gitu nggak” (Halimah, 12 Oktober 2021)

Informan Saminem selaku dukun bayi pun juga membenarkan jika praktik sunat perempuan menggunakan kunyit dan ani-ani merupakan alat yang pada jaman dahulu digunakan untuk memotong padi.

“Peralatan e supit niku nggih namung kunir, ani-ani”
(Peralatan supit itu ya cuma kunyit, ani-ani) (Saminem, 13 Oktober 2021)

“ani-ani niku nek jaman ndisik ngge pari niku leh mbak damel motongi pari niku” *(Ani-ani itu kalo jaman dahulu untuk padi itu mbak digunakan untuk memotong padi)* (Saminem, 13 Oktober 2021)

Dukun Bayi juga menerangkan jika nanti kunyit seolah-olah diberikan di depan alat genital perempuan, ani-ani yang ada digunakan untuk menghilangkan kotoran sekitar alat genital perempuan. Kunyit disini tidak diapa-apakan karena untuk mengeringkan ani-ani tadi.

“Nggih mengke rekak e nggih ditongke nggen ngajeng e senuk niku terus ani-ani ne damel ngeruk reget e sik enten sekitar e mriku mengke kunir e mboten diapa-apakke mengke kan damel ngesatne ani-ani ne niku” *(Iya nanti pura-puranya diberdirikan di depan alat kelaminnya itu lalu ani-aninya untuk ngeruk kotoran disekitarnya terus kunyitnya nggak diapa-apain cuma nanti untuk ngeringkan ani-ani nya)* (Saminem, 13 Oktober 2021)

Proses sunat ini juga tidak berdarah atau melukai alat genital perempuan.

“Mboten berdarah mbak” *(tidak berdarah mbak)* (Saminem, 13 Oktober 2021)

Saminem juga menambahkan dalam pelaksanaan sunat perempuan biasanya sebelum melakukan sunat anak yang akan disunat dimandikan dengan bunga setaman dan ketika sudah bersih dipakaikan baju baru lalu disunat.

“Sebelum disupiti niku dimandiin mandi ngangge kembang setaman nggen ember diken ngedusi ngoten sik damel ngresiki ngoten mbak nak sampun resik klambi anyar mengke terus dipangku ibuk e terus kula supiti ngoten”
(Saminem, 13 Oktober 2021)

Informan Anis juga mengatakan hal serupa jika setelah dilakukan sunat oleh budenya, dimandikan menggunakan air dengan campuran bunga

“bude dateng terus melakukan proses sunat lalu seingetku dimandiin pake kembang”(Anis S, 10 Oktober 2021)

b. Eksistensi Berdasarkan Apa Yang Ada

Eksistensi menurut Dagun (1990), dilihat berdasarkan apa yang telah dialami dan apa yang ada. Di Desa Ngemplak saat ini masih erat dengan pelaksanaan sunat perempuan. Dalam menerangkan eksistensi sunat perempuan berdasarkan apa yang ada, hal ini termasuk kepada perbedaan sunat saat ini dan apa yang dilakukan dulu. Perbedaan ini termasuk tradisi-tradisi yang dilakukan, siapa yang melakukan proses sunat dan kapan sunat itu dilakukan.

Tradisi sunat perempuan biasanya merupakan suatu tradisi yang digunakan masyarakat untuk melengkapi perempuan. Karena dasar sunat perempuan merupakan salah satu perayaan, biasanya di dalamnya terdapat selamatan atau kerap disebut bancakan/kondangan di masyarakat Jawa.

Selamatan/tasyakuran yang dilakukan setelah melakukan proses sunat perempuan ini ada baik pada masa dahulu maupun masa sekarang. Besar

atau kecilnya perayaan biasanya tergantung oleh bagaimana keluarga anak perempuan itu sendiri.

Menurut informan Endang, biasanya tidak ada acara apa-apa setelah melakukan sunat. Kegiatan yang biasa dilakukan yaitu bancakan (syukuran) maupun kondangan kecil-kecilan.

“Kalo disini sih biasa nggak ada acara apa-apa paling ya bancakan kondangan kecil-kecilan gitu”(Endang, 10 Oktober 2021)

Setelah dilakukan proses sunat biasanya diadakan *bancakan*. Jika keluarga memilih untuk melakukan perayaan kecil maka hanya dilakukan *bancakan*, yang biasanya hanya membagi-bagi nasi kepada tetangga sekitar kemudian melakukan kondangan dan dukun yang menjadi pemandu acara. Jika keluarga memilih untuk melakukan perayaan besar, setelah melakukan sunat selain melakukan syukuran, keluarga mengundang musik orkestra seperti acara nikahan pada jkkkumumnya dan biasanya keluarga juga menerima tamu dalam skala besar.

“tadi kan udah disunati gitu, setelah itu kaya dibancakin gitu. Kalo kecil Cuma bancakan kalo besar itu ibaratnya ditanggap pake tip nerima tamu kalo sederhana ya cukup supitan terus kondangan gitu. Yang ngondang gitu palingan ya dukun”(Winarsih, 10 Oktober 2021)

Syukuran bisa berupa kondangan yaitu kondangan sunat perempuan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Kondangan ini kondangan supitan. Nasi diurak merupakan nasi yang biasanya nasi uduk dengan ayam *ingkung* kemudian pelaksana acara membagi nasi dan ayam tersebut kepada yang hadir dengan bungkusan daun pisang.

“Oh nggih kondangan niku dikondangi nak kondangan nggih kondangan supitan sik kondangan nggih bapak-bapak

mboten ibu-ibu nggih kondangan sekul diurak tiyang kathah niku mbak dados e syukuran niku” (Saminem, 13 Oktober 2021)

Seiring dengan perkembangan jaman, sunat perempuan masih tetap dilakukan. Meskipun dalam pelaksanaan sunat terdapat perbedaan dari jaman dahulu, sunat perempuan masih eksis di kalangan masyarakat Desa Ngemplak.

Sunat perempuan masih ada hingga sekarang, bahkan saat ini dilakukan di bawah 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk merayakan perayaan berbarengan dengan tradisi lain seperti tujuh harian, wetonan dll.

“Masih, malah bayi biasanya di bawah umur 6 bulan sekalian 7 harian bancakan sunat sekalian masak-masaknya” (Endang, 10 Oktober 2021)

Pendapat ini juga disetujui oleh informan Winarsih, pada masa sekarang sunat perempuan umumnya dilakukan lebih awal dibanding dahulu agar dapat dibarengi dengan kegiatan lainnya seperti peringatan setaun, selapanan (45 hari) dan dilakukan pada umur lebih kecil.

“sunatnya masih ada, kalo jaman sekarang palingan setaunnya atau selapannya gitu sekalian disupitin gitu. Kalo jaman sekarang kebanyakan yang masih kecil gitu udah disunat” (Winarsih, 10 Oktober 2021)

Perayaan yang disebutkan tadi biasanya juga terdapat Mbah Dukun yang ikut melakukan tradisi sehingga jika sunat dilakukan bersama-sama, dukun bisa langsung menyunati anak perempuan. Meskipun begitu hal ini tidak terlalu menjadi patokan sebab pilihan diberikan kepada orang tua anak itu sendiri-sendiri mengenai kapan anak akan disunat.

“biasanya itu karena sekalian mengadakan perayaan apa kaya yang disebutin tadi terus mbah dukunnya langsung

menyunati gitu. Karena ya orangtua itu sendiri-sendiri bagaimana mau nyunatnya umur segini-segini gitu ga kaya orang dulu.”(Winarsih, 10 Oktober 2021)

Sunat perempuan pada saat ini sebenarnya tergantung pada pilihan keluarga masing-masing. Ada yang melaksanakan sunat pada lebaran namun saat ini kebanyakan bayi perempuan setelah lahir juga sudah disunat oleh rumah sakit saat aqiqahan (umur 7 hari). Berbeda dengan pada masa dahulu masih di dukun, bukan untuk melahirkan di dukun melainkan diminta untuk memijat bayi.

“Kalo jaman sekarang ‘kamu sunatnya pas ini nak’. Kaya anaknya ponakan saya itu juga pas lebaran umur 7 tahun disunatkan. Tapi kalo bayi sekarang itu lahir langsung disunatkan dari rumah sakit, kaya chalista (cucu perempuan) pas aqiqahan dari rumah sakit udah disunatkan. Kalo jaman dulu kan masih ke dukun tapi anak saya itu lahirnya dirumah sakit, di mbah dukun Cuma di kiuk tapi nggak dikondangi karena itu yang nyuruh orang tua saya dikiuk di tempatnya mbah dukun gitu dulu.” (Walinem, 10 Oktober 2021)

Semua anak perempuan yang berada di usia Sekolah Dasar kebanyakan telah disunat karena dilihat dari keluarga terdekat yang masih melakukan sunat hingga saat ini.

“Kayaknya semua anak perempuan diusia yang maksudnya kaya SD itu semua disunat deh karena semua keluargaku kaya gitu terus sepupu-sepupuku juga kaya gitu” (Suci P, 12 Oktober 2021)

Ada juga informan yang sudah lama tidak mendengar berita mengenai undangan untuk kondangan maupun *bancakan* sunat perempuan dan baru

mengetahui masih adanya tradisi untuk melakukan syukuran setelah sunat sampai saat ini karena informasi dari ibunya.

“Aku malah kurang tau kaya aku udah lama udah nggak tau berita disuruh kondangan atau bancakan buat sunat perempuan gitu kalo tentang supitan aku lama nggak tau sebenarnya tapi ternyata kata ibuku masih jadi ya itu “ (Anis S, 10 Oktober 2021)

Menurut informan Halimah mungkin saat ini telah ada sedikit perubahan dan berbeda dengan sekarang tapi sunat perempuan masih ada.

“Mungkin sekarang ada perubahan ya (informan sedikit ragu) tapi pas anak saya masih kecil masih” (Halimah, 12 Oktober 2021)

Menurut dukun bayi di Desa Ngemplak, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan sunat perempuan. Tradisi sunat masih menggunakan ani-ani dan masih menggunakan kunyit.

*“Peralatan e supit niku nggih namung kunir, ani-ani”
(peralatan sunat perempuan itu ya Cuma kunyit dan ani-ani)
(Saminem, 13 Oktober 2021)*

Tradisi sebelum sunat kurang lebih sama yaitu dengan memandikan anak dengan air bunga dan diberikan baju baru setelahnya lalu ibu anak memangku kemudian proses sunat dapat dilakukan.

*“Sebelum disupiti niku dimandiin mandi ngangge kembang setaman nggen ember diken ngedusi ngoten sik damel ngresiki ngoten mbak nak sampun resik klambi anyar mengke terus dipangku ibuk e terus kula supiti ngoten”
(sebelum dilakukan sunat itu dimandikan dengan air kembang setaman di ember untuk diminta dimandikan agar*

bersih, jika sudah dipangku ibu lalu saya supiti gitu)
(Saminem, 13 Oktober 2021)

Setelah dilakukan proses penyucian sebelum sunat, kemudian sunat dilakukan dengan kunyit yang diposisikan di depan alat genita perempuan dan tidak diapa-apakan. Ani-ani digunakan untuk membersihkan kotoran sekitar kemudian kunyit digunakan untuk mengesatkan ani-ani setelah digunakan.

“Nggih mengke rekak e nggih ditongke nggen ngajeng e senuk niku terus ani-ani ne damel ngeruk reget e sik enten sekitar e mriku mengke kunir e mboten diapa-apakke mengke kan damel ngesatne ani-ani ne niku” (Iya nanti pura-puranya diberdirikan di depan alat kelaminnya itu lalu ani-aninya untuk ngeruk kotoran disekitarnya terus kunyitnya nggak diapa-apain cuma nanti untuk ngeringkan ani-ani nya)
(Saminem, 13 Oktober 2021)

Tradisi selanjutnya juga kurang lebih sama yaitu masih dilakukan syukuran maupun *bancakan*. Adanya sunat perempuan masih hingga sampai sekarang pun dikarenakan tradisi itu sendiri. Tradisi setelahnya seperti syukuran juga tergantung kapan sunat itu dilakukan, semisal hari sunat bertepatan dengan hari lebaran, keluarga anak perempuan dibebaskan membuat syukuran atau tidak mengenai anaknya yang telah disunat.

“Nggih tradisi niku mbak, nek tradisi mriki nggih ngoten niku tetep e ngih ngoten niku nak pas barengi lebaran niku boten dinapak napakke boten dibancaki boten diapa-apakke boten nopo- nopo mbak nek pas boten lebaran tetep bancakkan ngoten” (ya tradisi itu mbak kalo tradisi di sini ya seperti itu kalo bareng sama lebaran itu nggak diapa- apain nggak dibancakkin nggak apa-apa kalo nggak lebaran ya tetap ngadain bancakkan/syukuran) (Saminem, 13 Oktober 2021)

“Lah kirangan niku (informan tertawa) kula nggih boten ngerti nggih namung adat tradisine nak supitan kedah dibancakki nak pas lebaran (bodo) niku boten nggih boten nopo-nopo, nak pas boten lebaran nggih kedah dibancakki”
(saya nggak tau kenapa api tradisi supitan iu memang dibancakin kalo pas lebaran itu iya boleh, nggak juga boleh tapi kalau bukan lebaran ya tetap dibancakin) (Saminem, 13 Oktober 2021)

B. PEMBAHASAN

Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang karena sifatnya yang menyebar kekuasaan bisa dimiliki dan bersumber darimana saja. Wujud dari kekuasaan itu bisa tampak dan bisa tersembunyi (Martono, N. 2014). Di dalam masyarakat, praktik-praktik kekuasaan bisa hadir meskipun hanya ada dua orang yang sedang berinteraksi.

Di masyarakat terdapat macam-macam hubungan kekuasaan yang membentuk sistem sosial. Hubungan kekuasaan dapat dilaksanakan dengan produksi, akumulasi, sirkulasi dan perlu melibatkan wacana. Kekuasaan mampu menciptakan skala yang luas dan menciptakan pengaruh yang besar kepada manusia. Kekuasaan dapat bekerja melalui hubungan sosial, keluarga, ekonomi, seks untuk membentuk kekuatan yang mencakup semua elemen masyarakat.

Sunat perempuan merupakan salah satu contoh hasil dari bentuk hubungan sosial di masyarakat. Kekuasaan dalam sunat perempuan mampu membentuk kekuatan sehingga hingga saat ini sunat perempuan masih menjadi salah satu bagian di masyarakat. Mekanisme kekuasaan dalam sunat perempuan dijalankan sebagai bagian dari kebiasaan, dipraktikkan

sebagai bentuk dari tradisi, diterima dan dilihat sebagai kebenaran sehingga keberadaannya masih ada hingga sekarang.

1. Proposisi kekuasaan

Menurut Foucault (1966) terdapat lima proposisi mengenai kekuasaan. Berikut proposisi kekuasaan pada praktik sunat perempuan di Desa Ngemplak Karangpandan:

1. Kekuasaan Bukan Sesuatu yang Dimiliki dan Tidak Dimiliki Melainkan Sesuatu yang Dapat Dilakukan pada Setiap Hubungan Apapun.

Dalam hal kekuasaan, kuasa bukan hanya sesuatu yang dimiliki oleh segelintir orang seperti penguasa maupun yang tidak dimiliki kuasa seperti masyarakat yang menjalankan kuasa pada hal ini seperti pengaturan undang-undang. Kekuasaan dapat dilakukan dalam hubungan apapun termasuk sunat perempuan, masyarakat melakukannya bersama sama secara kolektif dan sadar.

2. Kekuasaan Tidak Hanya Diterapkan Pada Hubungan Eksternal Melainkan Juga Menentukan Struktur Hubungan Internal.

Sunat perempuan bukan merupakan hanya sesuatu yang diterapkan pada hubungan eksternal, melainkan hubungan internal seperti melanjutkan tradisi atau tidak. Meyakini apa yang dilakukan turun temurun atau tidak. Dalam sunat perempuan hubungan internal ini lebih kepada kepercayaan dan keyakinan pada tradisi maupun suatu agama.

3. Kekuasaan Tidak Hanya Berasal Dari Atas, Tidak Semua Hubungan Kekuasaan Dibentuk Sesuai Dengan Kemauan Penguasa Melainkan Kekuasaan Dapat Muncul Dari Segala Tingkat Maupun Golongan Masyarakat Yang Mandiri.

Sunat perempuan dilakukan tidak berasal dari keinginan penguasa sebab tidak ada aturan pemerintah baik negara maupun daerah untuk mewajibkan sunat perempuan. Kekuasaan dalam sunat

perempuan berasal dari golongan masyarakat itu sendiri, berasal dari kebiasaan dan tradisi juga kepercayaan .

4. Ada Kemungkinan Untuk Mengidentifikasi Kekuasaan Namun Tidak Ada Subjek Individu Yang Menjalankan Maupun Yang Mengatur Hubungan Kekuasaan.

Proposisi ini dimaksudkan bahwa tidak ada subjek individu yang secara langsung mengatur hubungan kekuasaan, sunat perempuan tidak diatur oleh individu karena muncul dari masyarakat itu sendiri secara kolektif dan bersama-sama. Tidak ada subjek individu yang berkewajiban untuk mengatur semua masyarakat untuk patuh menjalankan sunat perempuan.

5. Penolakan Merupakan Bagian dari Kekuasaan.

Penolakan ini seperti sikap anak yang tidak mau melakukan sunat karena malu ketika orang lain melihat alat genitalnya saat dilakukan sunat.

2. Teknik kekuasaan

Menurut Foucault (1996) setidaknya ada 3 analisis mengenai teknik kekuasaan yaitu pengaturan kekuasaan, praktik pendisiplinan dan praktik-praktik individualisasi.

a. Pengaturan kekuasaan

Terdapat wilayah dan teknik tertentu dalam praktik kekuasaan yang dinamakan sebagai teknik pengaturan kekuasaan. Teknik ini memusatkan perhatian pada kekuasaan yang dilaksanakan sebagai permainan strategis dan taktis dan dilakukan dari sisi maupun titik mana saja dan tidak terhitung jumlahnya. Hal ini dapat berasal dari bawah, subjek yang berasal dari hubungan lain baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Pada sunat perempuan terdapat wilayah praktik kekuasaan dalam hal ini adalah masyarakat dan perempuan. Pemerhatian kekuasaan

berasal dari hubungan masyarakat yang menjalankan tradisi secara disengaja. Disebut sebagai kesengajaan karena anjuran yang dilakukan kebanyakan bersifat turun temurun yang mengakibatkan sunat perempuan mempunyai sifat berkelanjutan.

Titik dalam permainan strategis sunat perempuan yaitu dari setiap keluarga masing-masing yang menganjurkan sunat. Selain itu, dukun bayi juga menganjurkan untuk sunat.

b. Praktik pendisiplinan

Praktik pendisiplinan yang menghubungkan pengetahuan dan kekuasaan. Teknik ini merupakan strategis kekuasaan diwujudkan dengan manuver normativitas, strategi integrasi dan taktik produktivitas. Pendisiplinan ini merupakan suatu kondisi ketika individu ada di bawah pengetahuan dan hierarki tertentu. Salah satu contoh terbaik pendisiplinan ini dengan pemeriksaan, karena pendisiplinan merupakan bentuk ketaatan dan kesetiaan individu.

Praktik pendisiplinan sunat perempuan berupa penanaman jika sunat merupakan tradisi dan kepercayaan. Setiap individu yang melakukan sunat perempuan biasanya dianjurkan oleh orang tua maupun orang dengan pengetahuan yang lebih tinggi dibanding individu tersebut.

Sunat perempuan menjadi suatu hal yang normal dilakukan oleh anak perempuan karena orang tua maupun orang-orang di masyarakat secara langsung memberikan pengertian bahwa sunat perempuan merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat. Pendisiplinan ini dilakukan pada anak perempuan yang berumur di bawah 7 tahun pada masa dahulu dan dilakukan pada anak perempuan di bawah 1 tahun pada kebanyakan anak sekarang.

Pemeriksaan dalam praktik pendisiplinan ini cenderung dilakukan oleh orang tua, kakek nenek maupun dukun bayi yang biasanya menangani anak perempuan tersebut. Pelabelan ketaatan dan

kesetiaan individu dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing. Pendisiplinan ini juga dilihat dari ketika diberi pertanyaan mengenai apakah akan melanjutkan tradisi sunat kedepannya atau tidak. Kebanyakan dari mereka setuju untuk melanjutkan tradisi ini dengan alasan bagian kepercayaan dan tradisi. Selain itu, praktik sunat yang dilakukan berupa simbolis sehingga individu beranggapan jika tidak ada pihak yang dirugikan ketika melakukan sunat.

Berdasarkan hal ini dapat diberi kesimpulan jika taktik produktivitas dalam sunat perempuan yaitu dengan pengetahuan secara kolektif oleh orang tua, dukun dan kakek-nenek mengenai esensi dari sunat perempuan.

dikarenakan tradisi yang mengikat, ketika masyarakat menganggap bahwa orang tua dulu melakukan maka mereka akan melakukannya. Tidak adanya resiko yang begitu besar dalam pelaksanaan sunat perempuan karena praktik yang dilakukan bersifat simbolis menjadikan sunat perempuan merupakan salah satu kelengkapan dianggap tidak terlalu membebani pada perempuan.

Praktik pendisiplinan ini juga ditanamkan melalui kepercayaan agama yang menganjurkan untuk melakukan sunat perempuan sebagai salah satu wujud dari ketaatan umat beragama sehingga hal ini menyebabkan sunat perempuan masih tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

c. Praktik-praktik individualisasi

Praktik individualisasi merupakan teknik untuk menghubungkan diri dan kekuasaan. Contoh praktik ini menurut Foucault yaitu seperti menjelaskan dikotomi gila dan waras, sakit dan sehat baik dari diri mereka sendiri maupun dari yang lain.

Praktik sunat perempuan di masyarakat Desa Ngemplak merupakan kebiasaan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat, semua masyarakat melakukannya. Baik dari jenjang latar belakang tidak

sekolah hingga SMA/SMK. Meskipun disadari dan dilakukan secara kolektif, sunat perempuan tidak memiliki konsekuensi jika perempuan tidak melakukannya.

Akan tetapi meskipun tidak adanya konsekuensi ini, masyarakat tidak ada yang tidak melakukan sunat perempuan. Untuk menghubungkan antara individu dengan kekuasaan disebabkan oleh kontrol dari keluarga anak perempuan tersebut. Kebanyakan mereka tidak diberi pengertian ketika akan melakukan sunat dikarenakan mereka tidak memiliki kuasa atau diberi pilihan mengenai tubuhnya. Pemilihan usia sunat yang dini menyebabkan anak perempuan dinilai belum mengerti sehingga akan tetap melakukan sunat tersebut. Jika tidak mau orang tua yang merupakan aktor penghubung individu dengan kekuasaan akan membujuk. Sifatnya tidak memaksa namun perlu dilakukan.

Ketika dewasa, dalam menghubungkan diri dengan kekuasaan, sunat perempuan mempunyai dikotomi sebagai salah satu bentuk taat dan tidak taat, baik dalam hal tradisi maupun kepercayaan.

Jika dilihat dalam konteks adat dan tradisi mereka memberikan arti jika sunat merupakan sebuah kebiasaan turun temurun yang perlu dilanjutkan. Sunat perempuan dipercayai sebagai salah satu cara untuk membuang sial dan melancarkan kelahiran. Jika dalam konteks agama sunat perempuan dipercayai sebagai salah satu syarat sah perempuan dalam memeluk agama. Jika perempuan taat kepada perintah agama, perempuan akan melakukan sunat, jika tidak melakukan perempuan dianggap sebaliknya.

Secara sengaja, orang tua menjadi agen yang melanggengkan praktik individualisasi yang nantinya sunat perempuan tetap dikembangkan seiring jaman.

3. *Episteme*

Foucault menyebutkan bahwa perkembangan pengetahuan berhubungan dengan proses produksi pengetahuan hal ini disebut *episteme*.

Episteme memiliki beberapa karakter, yang pertama adalah ia menentukan bagaimana manusia melihat, memaknai dan mengalami kenyataan. Dalam praktik sunat perempuan di Desa Ngemplak, masyarakat memahami jika sunat perempuan merupakan proses yang dilakukan untuk membersihkan perempuan, membuang sial dan dapat memperlancar kelahiran. Masyarakat sama-sama memaknai bahwa sunat perempuan merupakan tradisi turun temurun yang merupakan kebiasaan yang harus dilakukan, Sunat perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngemplak selaras dengan sunat perempuan simbolis menggunakan kunyit dan ani-ani. Masyarakat pun mengalaminya pada waktu umur yang sama yaitu pada umur 7 tahun.

Pemaknaan mengenai sunat perempuan ini dipengaruhi hal lain di dalam diri mereka maupun apa yang mereka telah alami.

Karakter kedua dalam *episteme* yaitu adanya perintah, larangan, penyangkalan, penolakan dan pengabaian. Dalam praktik sunat perempuan, ketika perempuan sudah pada usia yang dimungkinkan untuk melakukan sunat, orang tua akan menganjurkan untuk melakukan sunat. Meskipun ada yang menyetujui begitu saja, ada beberapa anak perempuan yang menolak sunat dikarenakan malu karena alat genitalnya akan dilihat orang lain. Pada akhirnya penolakan itu diabaikan oleh orang tua dan tetap berusaha untuk membujuk anak dalam melakukan sunat.

Karakter ketiga, yaitu hubungan bahasa dan realitas. Dalam praktik sunat perempuan, bahasa-bahasa ini adalah pemaknaan sunat perempuan, bagaimana orang tua membujuk anak mereka ketika tidak

melakukan sunat perempuan. Melalui bahasa-bahasa ini orang tua mampu melegitimasi kebenaran.

Episteme berdasarkan ketiga karakter ini mengendalikan dan mengontrol pengetahuan individu dengan ketabuan, ketidakbenaran dan kegilaan.

Menurut Foucault (1996), *episteme* dapat dijelaskan sebagai sistem tersembunyi yang berada dibalik sejarah masa lalu. Setiap periode sejarah memiliki pengetahuan/kebenaran yang disepakati. Pengetahuan ini yang membatasi dan mempengaruhi pemikiran individu.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Eksistensi sunat perempuan di Desa Ngemplak ada dari masa dahulu hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya sunat perempuan pada masa lalu dilakukan pada umur di bawah 7 tahun sedangkan masa sekarang sunat perempuan masih dilakukan bahkan oleh tenaga medis dan dilakukan pada umur yang lebih belia seperti di bawah 6 bulan. Pelaksanaan yang lebih awal ini dikarenakan untuk membarengi dengan pelaksanaan tradisi lain seperti *wetonan*, *selapanan*, *aqiqah* dan sebagainya.

Keputusan mengenai kapan anak akan disunat cenderung kepada keputusan keputusan keluarga masing-masing dan bukan keputusan kolektif. Sunat dapat dilakukan pada umur bayi maupun ketika berada di bangku TK-SD berbeda dengan jaman dahulu yang cenderung melakukan sunat dalam rentang umur yang sama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sunat perempuan di Desa Ngemplak baik pada masa dulu hingga sekarang merupakan sunat dengan tipe sunat simbolis. Hal ini dikarenakan sunat menggunakan alat ani-ani dan kunyit. Ada juga yang memakai telur hanya sebagai pelengkap. Proses sunat pun tidak menggores ataupun melukai alat genital perempuan, kebanyakan

sunat dilakukan dengan menggesekkan kunyit atau hanya membersihkan dengan menggunakan ani-ani.

Sunat perempuan merupakan salah satu alat kontrol bagi tubuh perempuan. Alasan mengenai dilakukannya tradisi ini dikarenakan anjuran yang kebanyakan dilakukan oleh orang tua perempuan. Tradisi turun temurun juga yang menjadi kebiasaan menjadikan sunat perempuan merupakan alat kontrol dari waktu ke waktu. Orang tua berperan penting dalam keputusan sunat, perempuan tidak diberi pilihan iya atau tidak nya dalam melakukan sunat karena dianggap pada umur di bawah 7 tahun, anak belum mengerti mengenai manfaat dan apa itu sunat perempuan.

Mengenai keputusan mengenai iya atau tidaknya sunat perempuan di masa mendatang, sunat tetap dilakukan dan kebanyakan diserahkan kepada keluarga laki-laki hal ini menunjukkan bukti mengenai budaya patriarki yang seiringan dengan pelaksanaan sunat perempuan.

2. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, peneliti memberikan kritik dan saran. Hal ini sebagai tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan. Berikut adalah

1. Masyarakat Desa Ngemplak

Dalam melakukan tradisi ada baiknya anak perempuan diberikan pengertian mengenai manfaat ataupun proses yang akan dilakukan pada tubuh anak. Meskipun anak belum diberi pilihan tetapi orang tua perlu memberikan arahan mengenai tradisi ini sehingga anak tidak menemui kebingungan di kemudian hari.

2. Peneliti

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai kontrol tubuh pada sunat perempuan pada masa akan datang agar penelitian dikaji lebih mendalam. Tidak hanya eksistensi, bentuk kontrol tubuh dan relasi

kuasa di dalamnya melainkan topik yang lebih luas lagi. Selain itu juga dapat dikaji dengan teori dan metodologi yang lain dan bervariasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Akdon dan Hadi, S. 2005. Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi dan Manajemen. Bandung: Dewa Ruchi*
- Andriani, Marifta Nika dan Ali, Mohammad Mukti. 2013. Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. *Jurnal Teknik PWK* Vol 2 (2)
- Ariesta, PRS. 2018. Praktik Sunat Anak Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa dan Reproduksi Kuasa dalam Praktik Sunat Anak Perempuan dalam Perspektif Gender). *Jurnal Tesis Universitas Airlangga Surabaya*
- Benedicta, G D. 2011. Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh. *Jurnal Sosiologi* Vol 16 (02)
- Betrayani Angela Frenzia. 2020. Kontrol Terhadap Tubuh Perempuan Pada Praktik Rejuvenasi Vagina. *Jurnal Kawistara* Vol 10 (2)
- Dzuhayatin & Faqih, M. 1998. Wacana Perempuan. Yogyakarta : Dr. CIDES-UII
- Farida, J dkk. 2017. Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) Dan Perlindungan Anak Perempuan Di Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Demak. *Jurnal Sawwa*, Volume 12 : 3
- Fibrianto, A L. 2016. Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol 5 (1)

- Galink. 2013. Seksualitas Rasa Rainbow Cake Memahami Keberagaman Orientasi Seksual Manusia. Yogyakarta: PKBI DIY
- Hikmalisa. 2016. Peran Keluarga dalam Tradisi Sunat Perempuan di Desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Analisis Gender sebagai Ketimpangan HAM dalam Praktik Sunat Perempuan). Jurnal Musawa, Volume 15:1
- Inayati, I N, dkk. 2016. Ketentuan Tentang Sunat Perempuan Dikaitkan Dengan Asas Gender Dan Nondiskriminatif. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan vol 2 (1)
- Katuuk, Oktaviani Margareta. 2016. Peran Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica
- Kawaous, R dkk. 2020. Female genital mutilation and women's healthcare experiences with general practitioners in the Netherlands: A qualitative study. Journal PLoS ONE 15(7)
- KG, Fisaha. 2016. Female Genital Mutilation: A Violation of Human Rights. J Pol Sci Pub Aff 4 (198)
- Khosla, R, dkk. 2017. Gender Equality and Human Rights Approaches to Female Genital Mutilation: a Review of International Human Rights Norms And Standards. Reproductive Health vol 14 (59)
- Modrek, S dan Sieverding, M. 2016. Mother, Daughter, Doctor: Medical Professionals and Mothers' Decision Making About Female Genital Cutting in Egypt. International Perspectives on Sexual and Reproductive Health Vol 2 (2)
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Musyarofah ,Ristiani, dkk. 2003. Khitan Perempuan antara Tradisi dan Ajaran Agama. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Nanang, M. 2014. Sosiologi Pendidikan: Michel Foucault. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nurdiyana, T. 2010. Sunat Perempuan pada Masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin. Jurnal Komunitas Volume 2:2
- Pastor-Bravo , María del Mar. 2018. Living with mutilation: A qualitative study on the consequences of female genital mutilation in women's health and the healthcare system in Spain. Midwifery 66 119-126
- Puspawati, H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor: PT IPB Press
- Putranti, D B. 2005. Sunat Perempuan: Cermin Bangunan Sosial Seksualitas Masyarakat Yogyakarta dan Madura. Jurnal Populasi Vol 16 (1)
- Oktarina. 2011. Permenkes Sunat Kaum Perempuan: Pro Dan Kontra Antara Tradisi Dan Perlindungan Kepentingan Perempuan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol 14 (4)
- Rokhmah, I & Hani, U. 2015. Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya, Agama Dan Kesehatan (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, Vol 11 : 2.
- Sa'dan, Masthuriyah. 2016. Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman. Buana Gender Vol 1 (2)

- Saragih, OK dkk. 2019. Kuasa Tubuh Terhadap Seksualitas Reproduksi Pada Keluarga Nelayan Di Dusun Bagan Desa Percut Sei Tuan. Jurnal Antropologi Sumatera Vol 17 (1)
- Slamet, Y. 2006. Metode Penelitian Sosial Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Sukardi. 2006. Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Sulahyuningsih, E dkk. 2021. Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesenjangan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol 12 (1)
- Sumarni, 2005, Sunat Perempuan di bawah bayang-Bayang Tradisi, Yogyakarta: Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Hlm. 14
- Wardhina, F dan Susanta, B. 2017. Sikap Ibu Terhadap Larangan Sunat Pada Anak Perempuan Di Kelurahan Sekumpul Kabupaten Banjar. Jurkessia Vol 8 (1)
- Zamroni, I. 2011. Sunat Perempuan Madura (Belenggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia). Karsa Vol 19 (2)
- Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia melalui Filsafat, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33